

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah





Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><u>Program :</u> Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat</p> <p><u>Kegiatan :</u> Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Prov. Sumatera Barat</p> <p><u>Tujuan :</u> membumikan Alquran sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang sesuai dengan filosofi Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah</p>	<p>-Kegiatan MTQ yang di ikuti Laki-laki dan perempuan berjumlah 60 orang, Laki-Laki (35 orang)peserta perempuan (25 orang) dengan 11 cabang lomba,</p> <p>-disini kita lihat perbandingan antara peserta perempuan dan laki-laki tidak seimbang,maka dari itu bagian kesra ingin mengadakan seleksi secara intensif agar mendapatkan peserta yang berkompeten dan seimbang,</p>	<p><u>Akses:</u> Di utamakan Kepada Peserta yang terpilih Di kecamatan</p> <p><u>Partisipasi:</u> semua peserta baik laki-dan perempuan berminat mengikuti seleksi tersebut</p> <p><u>Kontrol:</u> -Setiap peserta kurangnya rasa kesdaran untuk mengikuti seleksi tersebut yg selalu dingatkan.</p> <p><u>Manfaat:</u> dalam seleksi tersebut tidak semua yg di utus karena ada terpilih dan ada tereliminasi</p>	<p>-Pelatih Provinsi dan Kabupaten tidak tepat waktu</p> <p>-Waktu untuk melatih peserta tidak maksimal.</p> <p>-Panitia harus saling bekerja sama dalam Menentukan Jadwal seleksi</p>	<p>-Tempat dan Lokasi seleksi yang kurang memadai,</p> <p>-Al-Qur'an dan Perlengkapan Seleksi kurang lengkap</p> <p>-Sound Sistem tidak memadai setiap cabang lomba</p>	<p>-Meningkatnya Minat Baca Al-qur'an setiap Peserta Dalam Mengikuti Lomba MTQ</p>	<p>-meningkatnya peserta laki-laki yang ikut seleksi di bandingkan peserta perempuan</p> <p>-meningkatnya peringkat juara peserta laki-laki di setiap Lomba</p>	<p>-dalam Seleksi peserta di fasilitasi dengan sebaik2nya baik agar dapat serius dan konsentrasi dalam ikut pelatihan.</p> <p>-menjadikan peserta MTQ yang bisa bersaing di tingkat nasional</p>	<p><u>Output:</u> -Menjadikan Qori-Qoriah yang Bersaing dalam Setiap Cabang Lomba</p> <p><u>Input</u> Rp.1.500.000.000</p> <p>-Menyetarakan Minat Peserta Laki-laki dan Perempuan Seleksi untuk ikut Lomba MTQ</p> <p><u>Outcome</u> -Tersedianya Qori-Qoriah yang Terbaik dalam Daerah.</p>

Pulau Punjung, 24 Maret 2020

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan Dan Kesra
U.b
Kepala Bagian Kesra

H. Salsabaini, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19650818-198604 1 007

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPPEDA	KEPALA DINSOSP3APPKB
 <u>KANDAM, S.Sos</u> NIP.19670607 199103 1 004	 <u>PARYANTO, S.Sos., MT</u> NIP19690609 198902 1 001	 <u>Drs. ANDY SUMANTO, CFrA</u> NIP.19681220 199009 1 001	 <u>BOBBY P RIZA, S.STP., M.Si</u> NIP19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat		
KODE PROGRAM	4.01.4.01.02.81		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>a. Kegiatan MTQ yang di ikuti Laki-laki dan perempuan berjumlah = peserta Laki-Laki (35 orang) peserta perempuan (25 orang) dengan 11 cabang lomba.</p> <p>b. disini kita lihat perbandingan antara peserta perempuan dan laki-laki tidak seimbang, maka dari itu bagian kesra ingin mengadakan seleksi secara intensif agar mendapatkan peserta yang berkompenten dan seimbang.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di utamakan Kepada Peserta yang terpilih Di kecamatan - Qori-Qori'ah terbaik yang berada di pondok tahfiz <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - semua peserta baik laki-dan perempuan berminat mengikuti seleksi tersebut <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap peserta kurangnya rasa kesedaran untuk mengikuti seleksi tersebut yg selalu dingatkan. <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalam seleksi tersebut tidak semua yg di utus karena ada terpilih dan ada tereliminasi <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatih Provinsi dan Kabupaten tidak tepat waktu 2. Waktu untuk melatih peserta tidak maksimal. 3. Panitia harus saling bekerja sama dalam Menentukan Jadwal seleksi <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat dan Lokasi seleksi yang kurang memadai 2. Al-Qur'an dan Perlengkapan Seleksi kurang lengkap 3. Sound Sistem tidak memadai di setiap Cabang Lomba 		
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <p>Jumlah Dana Rp.1.500.000.000,-</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p><u>Input</u></p> <p>Dana yang diusulkan sebesar Rp.1.500.000.000,-</p> <p><u>Output</u></p> <p>Menjadikan Qori-Qoriah yang Bersaing dalam Setiap Cabang Lomba</p> <p><u>Outcome</u></p> <p>Tersedianya Qori-Qoriah yang Terbaik dalam Daerah.</p>		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 1.500.000.000,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1		
	Masukan	Rp. 1.500.000.000,-	
	Keluaran	Menjadikan Qori-Qoriah yang Bersaing dalam Setiap Cabang Lomba	
	Hasil	Tersedianya Qori-Qoriah yang Terbaik dalam Daerah.	

Pulau Punjung, 25 Maret 2020





An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan Dan Kesra
U.b

Kepala Bagian Kesra



H. Serbaini, SE
Pembina Tingkat I (PwB)
NIP. 19650818 198604 1 007

TIM VERIFIKASI


<p>INSPEKTUR</p>  <p>KANDAM, S.Sos NIP.19670607 199103 1 004</p>	<p>KEPALA BKD</p>  <p>PARYANTO, S.Sos., MT NIP.19690609 198902 1 001</p>	<p>KEPALA BAPPPEDA</p>  <p>Drs. ANDY SUMANTO, CPTA NIP.19681220 199009 1 001</p>	<p>KEPALA DINSOSP3APPKB</p>  <p>BOBBY F. RIZA, S. STP., M.Si NIP.19820521 200012 1 002</p>
---	---	--	---

Bagian Humas Setda

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis. "Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa".	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Eksternal	Sebab Kesenjangan Internal	Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
"Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)"	-Data tahun 2019 kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) hanya dominan di akses oleh laki-laki serta sedikit oleh perempuan -Petugas operator penyebarluasan informasi mengenai kegiatan di masing-masing OPD lebih cenderung	(akses, manfaat, partisipasi, penguasaan) -Petugas informasi OPD/PPID pembantu mengalami banyak tantangan apabila mengambil/mencari informasi dilapangan sehingga kepala OPD lebih cenderung mengaskan laki-laki dari pada perempuan karena lokasi kegiatan lebih mudah di kuasi laki-laki dari pada perempuan.	1. Dalam surat perjanjian kerja/SPK personil Bagian Humas, kegiatan peliputan dan pembuatan release berita lebih dominan memilih laki-laki di bandingkan perempuan. 2. Dari data tahun 2020 laki-laki yang bertugas di bidang peliputan sebanyak 9 orang laki-laki, sedangkan	1. Medan lapangan yang begitu berat serta jauh dari pusat pemerintahan 2. Sering mengalami kelelahan/letih dalam meliput berita di lapangan. 3. Kadang kala kegiatan dilaksanakan pada malam hari/dini hari.	Mereformulasi tujuan (kebijakan/program/kegiatan) sehingga menjadi responsif gender 1. Peningkatan pelayanan informasi mengenai kebijakan kepala daerah yang responsif gender. 2. Peningkatan tugas peliputan serta pemberitaan/relase yang mempunyai kompetensi	1. Membuat/menyelenggarakan kegiatan pelatihan jurnalistik bagi petugas peliputan baik di Bagian Humas/PPID utama maupun di OPD/PPID pembantu. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kameramen berita sehingga dihasilkan kameramen yang responsif gender.	Memilih data yang akan dipakai untuk mengukur kemajuan. -Data tahun 2019 kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) hanya dominan di akses oleh laki-laki serta sedikit oleh perempuan -Petugas operator	Ukuran untuk memperhatikan: - kesenjangan gender hilang/bertuang (output) - perubahan perilaku dan perubahan relasi gender - (outcome) 1. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam melakukan peliputan serta pembuatan Release berita di masing-masing OPD/PPID pembantu (Output).


<p>Kebijakan Daerah</p> <p>2. Menyebarkan Informasi Mengenai Pembangunan Dan Kegiatan Kepala Daerah.</p>	<p>di lakukan oleh laki-laki di bandingkan perempuan</p>	<p>-Dalam menggunakan dan memanfaatkan kamera digital hanya laki-laki yang lebih paham dibandingkan perempuan termasuk dalam mencari momen yang tepat sebelum mengambil foto.</p>	<p>perempuan sebanyak 2 orang</p>		<p>dalam menyebarkan informasi pembangunan daerah yang responsif gender.</p>		<p>penyebarkan informasi mengenai kegiatan di masing-masing OPD lebih cenderung di lakukan oleh laki-laki di bandingkan perempuan</p>	<p>2. Menipitikan petugas kumramen yang tertatih dalam pengambilan gambar ataupun baik petugas Bagian Humas (PPID, utama) maupun petugas kumramen OPD/PPID pembantu (Outcome).</p>
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Inspektur

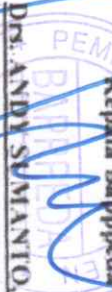


KANDAM. S. Sos
NIP. 19670607 199103 1 004

Kepala BKD
Tim Verifikasi :
Kepala Bappeda



PARYANTO. S. Sos, M.T
NIP. 19690609 198902 1 001



DR. ANDI SUMANTO, CTA
NIP. 1968 1220 199009 1 001

Kepala Dinas Sosial Peng
BOBY PERMANA RIZA, S.STP, M.Si
NIP. 19830521 200102 1 002









SEIDA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NIP. 19830314 198303 2 003

Kepala Bagian Humas
Maret 2020
Kabupaten Dharmasraya

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	: BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH		
TAHUN ANGGARAN	: 2021		
PROGRAM	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
KODE PROGRAM	2.10. 4.01.02.15		
KEGIATAN	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).		
HASIL/OUTPUT	Peningkatan pelayanan informasi mengenai kebijakan kepala daerah serta informasi pembangunan di daerah yang berimbang.		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). <i>Petugas operator penyebarluasan Informasi mengenai kegiatan di masing-masing OPD lebih cenderung di lakukan oleh laki-laki di bandingkan perempuan.</i></p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. <i>Petugas informasi OPD/PPID pembantu mengalami banyak tantangan apabila mengambil/mencari informasi dilapangan sehingga kepala OPD lebih cenderung menugaskan laki-laki dari pada perempuan karena lokasi kegiatan lebih mudah di kuasi laki-laki dari pada perempuan.</i></p> <p>b. <i>Dalam surat perjanjian kerja/SPK personil Bagian Humas, kegiatan peliputan dan pembuatan release berita lebih dominan memilih laki-laki dibandingkan perempuan.</i></p> <p>c. <i>Medan lapangan yang begitu berat serta jauh dari pusat pemerintahan.</i></p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Membuat/menyelenggarakan kegiatan pelatihan jurnalistik bagi petugas peliputan baik di Bagian Humas/PPID utama maupun di OPD/PPID pembantu.	
		Tujuan	Terwujudnya sumber daya manusia(SDM) yang terampil dalam melakukan peliputan serta pembuatan Release berita di masing-masing OPD/PPID pembantu.
		Alokasi Anggaran	Rp.67.500.000
	Komponen/ aktifitas 2	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kameramen berita sehingga dihasilkan kameramen yang responsif gender.	
		Tujuan	Menciptakan petugas kameramen yang terlatih dalam pengambilan gambar dilapangan baik petugas Bagian Humas (PPID utama)

		maupun petugas kameramen OPD/PPID pembantu.
	Alokasi Anggaran	Rp.51.300.000
	Total anggaran	Rp.118.800.000
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Menciptakan SDM yang handal di bidang peliputan, Release berita, kameramen sehingga informasi yang berkualitas dan proporsional dapat terwujud baik bagi PPID utama (Humas Sekda) maupun bagi PPID pembantu (OPD).	

Inspektur  KANDAM, S.Sos NIP. 19670607 199103 1 004	Kepala BKD  PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	Kepala Bapppeda  Drs. ANDY SUMANTO, Cfra NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial PPKB  BOBY PERDANA RIZA, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200102 1 002
---	---	--	---

Pulau Pinang, Maret 2020
An. Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya
Kepala Bagian Humas,

ENDANG PURWANINGSIH, SE, M.Si
NIP. 19630314 195803 2 003

OPD : Bag. Organisasi SEPPA.

Program : Laporan kelembagaan, ketatalaksanaan & pengembangan kerja

Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Standar Pelayanan OPD

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : peran lembaga	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
tatalaksana an dan ngembangan Kerja	Mengacu pada Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan melakukan koordinasi untuk mendorong peningkatan pelayanan publik pada unit kerja.	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
giatan : silitasi nyusunan tandar layanannya PD	Mengawalasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta	Akses - Diutamakan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik - Semua ASN Partisipasi - Pelayanan Khusus bagi yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) Manfaat - Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	- Kurangnya sosialisasi tentang Standar Pelayanan Publik ke Masyarakat sebagai pengguna layanan - Kurangnya SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan	- Kurangnya inovasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan dalam rangka	- Agar meningkatkan pemahaman tentang standar pelayanan publik bagi perangkat daerah - Agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang standar Pelayanan	- Melakukan kerjasama dengan perangkat daerah, puskesmas, dan Nagari - Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepatuhan terhadap standar pelayanan bersama perangkat daerah, puskesmas dan Nagari	Jumlah Jenis layanan perangkat Daerah, Puskesmas dan Nagari	Output : - Jumlah Unit pelayanan publik yang memiliki pelayanan terhadap berkebutuhan khusus (Disabilitas) Outcome : - Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

	permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya	Kontrol - kesenjangan (akses, pelayanan, penilaian, hasil)		pelayanan publik				
1		3	4	5	6	7	8	9

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	: Bagian Organisasi		
TAHUN ANGGARAN	: 2020		
PROGRAM	Laporan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kerja		
KODE PROGRAM	4.01.4.01.02.78		
KEGIATAN	Fasilitas Penyusunan Standar Pelayanan OPD		
HASIL/OUTPUT	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang memiliki pelayanan terhadap berkebutuhan khusus (Dissabilitas)		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka wawasan</p> <p>a. Mengacu pada Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan melakukan koordinasi untuk mendorong peningkatan pelayanan publik pada unit kerja.</p> <p>b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diutamakan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik - Semua ASN <p>a. Partisipasi</p> <p>Pelayanan Khusus bagi yang berkebutuhan khusus (Dissabilitas)</p> <p>b. Manfaat</p> <p>Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik</p> <p>c. Kontrol</p> <p>kesenjangan (akses, pelayanan, , penilaian, hasil)</p> <p>d. Faktor Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi tentang Standar Pelayanan Publik ke Masyarakat sebagai pengguna layanan - Kurangnya SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan <p>b. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Inovasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan dalam rangka peningkatan 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktivitas 1	Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepatuhan terhadap standar pelayanan bersama perangkat daerah, puskesmas dan Nagari	
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Agar meningkatnya pemahaman tentang satandar pelayanan publik bagi perangkat daerah - Agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang standar Pelayanan 	
	Alokasi Anggaran	Rp. 116.511.000,-	
	Total anggaran	Rp. 116.511.000,-	

CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output : Jumlah Unit pelayanan publik yang memiliki pelayanan terhadap berkebutuhan khusus (Dissabilitas) Outcome : Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
---	---



a.n Kepala Bagian Organisasi
Kasubag Ketatalaksanaan,

Indra Kadican, S.Kep
Penata (III/c)
NIP. 19610102 200501 1 008

*NIM VERIFIKASI

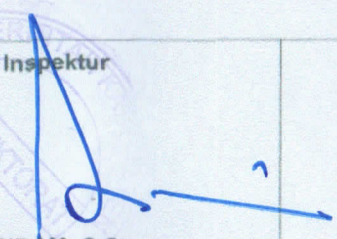



 INSPEKTUR KANDAM, S.Sos NIP. 19670607 199103 1 004	 KEPALA DINAS PARTANTO, S.Sos, M.P. NIP. 19630609 199002 1 001	 KEPALA BAPPEDA Drs. ANDY SUMANTO, CFA NIP. 19681720 199006 1 001	 KEPALA BPS ROBILANZA, S.STP, M.Si NIP. 19820812 199712 1 002
--	---	---	--

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

D : Badan Pertencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Daerah
STRATEGIS : Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Tujuan : - Terselenggaranya Musrenbang RKPD	1. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang perencanaan partisipatif, bottom-up, top- down, teknokratik, politik 2. Usulan masyarakat lebih banyak pada bidang fisik dan prasarana minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan	Keterlibatan mayoritas laki-laki pada musrenbang Musrenbang RKPD Kabupaten Akses: - Org yang menghadiri sudah ditentukan (undangan menghadiri untuk orang tertentu) Partisipasi: (dalam menyampaikan aspirasi) - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding peserta laki-laki	- ASN yang berperan sebagai Fasilitator dan narasumber tidak memahami konsep responsive Gender - Kesenjangan Gender dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting daripada perempuan Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender	- Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep Gender yang menganggap gender sebagai mendahulukan perempuan - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender - Budaya Patriarki yang mengutamakan pria sebagai pemimpin dalam hal kepada keluarga, tokoh	Terakomodir nya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan	- sosialisasi dan undangan secara adil dan merata - partisipasi kelompok perempuan yang mewakili gender minimal 30% - sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan guna meningkatkan kualitas peserta musrenbang	- kurangnya usulan masyarakat yang berbasis gender - Terakomodirnya usulan musrenbang pada RENja OPD	Output: Dokumen perencanaan (RKPD) yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan Outcomes : Terakomodirnya perencanaan pembangunan yang responsif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		<p>dan kualitas perwakilan perempuan relatif pasif dibandingkan peserta laki-laki sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan</p> <p>- Utusan Perwakilan dari kecamatan pada kegiatan musrenbang didominasi laki-laki dibanding perempuan, karena terkait petugas/pejabat wewenang nagari didominasi kaum laki-laki</p> <p>Control:</p> <p>- Kemampuan masyarakat menentukan usulannya tergantung pada prioritas, keselarasan</p>		<p>masyarakat, ketua kelompok, dll</p> <p>- Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta</p>		<p>(khususnya) perempuan -juknis yang responsif gender dalam proses musrenbang (advokasi, sosialisasi Pengarusutamaan gender)</p>		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		pembangunan daerah, provinsi Manfaat : - Tersampaikan aspirasinya masyarakat						
Tim Verifikasi :								
 Inspektur KANDAM, S.Sos NIP. 19670607 199103 1004		 Kepala BKD PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001		 Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, C.FrA NIP. 19681220 199009 1 001		 Kepala Dinas Sosial PPKB BOBY PERDANA RIZA, S.STP, M.SI NIP. 19820521 20012 1 002		

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)





SKPD : BAPPPEDA DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Perencanaan Pembangunan Daerah		
KODE PROGRAM	4.03.4.03.01.21		
ANALISA SITUASI	<div>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</div> <div>1. Usulan masyarakat lebih banyak pada bidang fisik dan prasarana minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan</div> <div>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</div> <div>a. Faktor Kesenjangan</div> <div><div>- Sosialisasi/undangan menghadiri sudah ditentukan</div><div>- Mayoritas peserta laki-laki dibandingkan perempuan</div><div>- Kualitas peserta laki-laki lebih aktif dibandingkan perempuan</div><div>- Manfaat minim untuk permasalahan pembangunan nonfisik seperti pembangunan mental dan pembangunan manusia</div></div> <div>b. Penyebab Internal</div> <div><div>- Fasilitator dan narasumber yang tidak responsif gender</div><div>- Kesenjangan gender, dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting dibanding perempuan</div><div>- Juknis musrenbang yang belum responsive gender</div></div> <div>c. Penyebab Eksternal</div> <div><div>- Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep responsive gender</div><div>- Budaya patriaki yang mengutamakan pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh masyarakat dan jabatan penting</div><div>- Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan , dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta</div></div>		
CAPAIAN PROGRAM	<div>1. Tolak Ukur</div> <div><div>-Input : Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang</div><div>-Output : Terlaksananya forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2019</div><div>-Outcomes : Terakomodirnya dan sinkronnya usulan kegiatan nagari/kecamatan kedalam Dokumen RKPD Tahun 2020</div></div> <div>2. Indikator dan Target Kinerja</div> <div><div>Indikator : Persentase penjabaran program perencanaan pembangunan daerah</div><div>Target Kinerja : 70%</div></div>		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 1.780.637.350,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	
		Masukan	Rp. 253.529.850,-
		Keluaran	Dokumen perencanaan pembangunan yang responsive gender

	Masukan	Rp. 75,000,000,-
	Keluaran	Aplikasi e-Planing SIMDA Perencanaan
	Hasil	Terimplementasikannya SIMDA Perencanaan

Tim Verifikasi:

 Inspektur KANDAM, S.Sos NIP. 19570907 199103 1004	 Kepala BKD PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala Dinas Sosial PPKB BOBY PERDANA RIZA, S.STP, M.Si NIP. 19820921 200121 1 002
--	---	--	---

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala Bappeda



Drs. ANDY SUMANTO, CFA
NIP. 19681220 199009 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : BKPSDM Kab. Dharmasraya
Program : Pendidikan Kedinasan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Pendidikan Kedinasan Kegiatan : Pendidikan Perjenjangan Struktural dalam pelaksanaan Diklat PIM III Tujuan: Peningkatan kapasitas dan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan Jabatan bagi PNS, dimana Diklat PIM merupakan salah satu syarat untuk menduduki Jabatan Eselon. - Jumlah PNS yang menduduki jabatan Eselon (II, III, IV) Kab. Dharmasraya saat ini sebanyak 528 orang terdiri dari 313 orang laki-laki dan 215 orang perempuan. Pejabat yang belum mengikuti diklat PIM sebanyak 418 orang terdiri dari 241 orang laki-laki dan 177 orang perempuan 	Akses : Jumlah PNS Kab. Dharmasraya per 31 Desember 2019, perempuan (2395 orang) lebih banyak dari laki-laki (1237 orang) Partisipasi : Jumlah pegawai perempuan yang telah memenuhi kepangkatan lebih besar daripada laki-laki Jabatan Struktural di dominasi oleh laki-laki Belum semua pejabat/ eselon III bersedia mengikutinya Kontrol:	Keterbatasan : <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Anggaran mengakibatkan peserta PIM III sedikit, sedangkan peminat Tinggi untuk mengikuti PIM III. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya kuota peserta untuk mengikuti PIM III dari penyelenggara - Jumlah Pejabat Eselon berjenis kelamin perempuan lebih sedikit daripada laki-laki - Belum memenuhi syarat kepegawaian untuk Diklat PIM yang lebih tinggi 	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Pejabat eselon III Kab. Dharmasraya dengan dibuktikan sertifikat Diklat PIM III sehingga syarat pengisian jabatan bisa terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - BKPSDM melakukan penambahan kuota peserta PIM III dan mengirim peserta tersebut melalui pola kontribusi ke BKPSDM Prov. Sumbar - BKPSDM meningkatkan dan memberi motivasi kepada pejabat eselon III untuk ikut berpartisipasi dalam diklat PIM III 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Eselon III yang belum mengikuti Diklat PIM III sebanyak 109 orang terdiri dari 33 orang perempuan dan 76 orang laki-laki - Pejabat eselon III yang akan ikut Diklat PIM III sebanyak 44 orang terdiri dari 17 orang perempuan dan 27 orang laki-laki 	Output : sebanyak 44 orang peserta Diklat PIM III selesai dilaksanakan Outcome : Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pejabat Eselon III menjadi lebih baik

<ul style="list-style-type: none"> - Eselon III, laki-laki 97 orang, perempuan 34 orang - Jumlah Pejabat eselon III yang sudah Diklat PIM III, laki-laki 21 orang ($21/97 \times 100\% = 21,64\%$) dan perempuan 1 orang ($1/34 \times 100\% = 2,94\%$), sehingga pejabat Eselon yang sudah mengikuti Diklat PIM III yaitu 22 orang ($22/131 \times 100\% = 16,79\%$) 	keikutsertaan peserta ditentukan oleh pimpinan/atasan					<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pejabat Eselon III yang ikut naik menjadi 33,20% 	
--	---	--	--	--	--	---	--

Pulau Punjung, Maret 2020
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

KHAIRUDIN, SE,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650525 198601 1 005

VERIFIKASI KEGIATAN			
Inspektur  (KAMDAM, S.Sos) NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD  (PARYANTO, S.Sos, MT) NIP 19690609 198902 1 001	Kepala BAPPEDA  (Drs. ANDY SUMANTO, CfrA) NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB  (BOBBY P. RIZA, S. STP, M.Si) NIP 19820521 200012 1 002

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD		: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
TAHUN ANGGARAN		: 2021	
PROGRAM		Pendidikan Kedinasan	
KODE PROGRAM		4.05.4.25.01.30	
KEGIATAN		Pendidikan Perjenjangan Struktural	
HASIL/OUTPUT		Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Pejabat eselon III Kab. Dharmasraya dengan dibuktikan sertifikat Diklat PIM III sehingga syarat pengisian jabatan bisa terpenuhi	
ANALISIS SITUASI		<div>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</div> <div><div>- Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan Jabatan bagi PNS, dimana Diklat PIM merupakan salah satu syarat untuk menduduki Jabatan Eselon.</div><div>- Jumlah PNS yang menduduki jabatan Eselon (II, III, IV) Kab. Dharmasraya saat ini sebanyak 528 orang terdiri dari 313 orang laki-laki dan 215 orang perempuan. Pejabat yang belum mengikuti diklat PIM sebanyak 418 orang terdiri dari 241 orang laki-laki dan 177 orang perempuan</div><div>- Eselon III, laki-laki 97 orang, perempuan 34 orang</div><div>- Jumlah Pejabat eselon III yang sudah Diklat PIM III, laki-laki 21 orang($21/97*100\%= 21,64\%$) dan perempuan 1 orang ($1/34*100\%= 2,94\%$), sehingga pejabat Eselon yang sudah mengikuti Diklat PIM III yaitu 22 orang ($22/131*100\%= 16,79\%$)</div></div> <div>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</div> <div><div>a. Faktor Kesenjangan :</div><div><div>- Akses : Jumlah PNS Kab. Dharmasraya per 31 Desember 2019, perempuan (2395 orang) lebih banyak dari laki-laki (1237 orang)</div><div>- Partisipasi : Jumlah pegawai perempuan yang telah memenuhi kepangkatan lebih besar daripada laki-laki</div><div>- Jabatan Struktural di dominasi oleh laki-laki</div><div>- Belum semua pejabat eselon III bersedia mengikutinya</div><div>- Kontrol: keikutsertaan peserta ditentukan oleh pimpinan/atasan</div></div><div>b. Penyebab Internal :</div><div>Keterbatasan :</div><div><div>- Kebijakan Anggaran mengakibatkan peserta PIM III sedikit, sedangkan peminat Tinggi untuk mengikuti PIM III.</div></div><div>c. Penyebab Eksternal :</div><div><div>- Terbatasnya kuota peserta untuk mengikuti PIM III dari penyelenggara</div><div>- Jumlah Pejabat Eselon berjenis kelamin perempuan lebih sedikit daripada laki-laki</div><div>- Belum memenuhi syarat kepegawaian untuk Diklat PIM yang lebih tinggi</div></div></div>	
RENCANA AKSI		Komponen/ Aktifitas	<div>- BKPSDM melakukan penambahan kuota peserta PIM III dan mengirim peserta tersebut melalui pola kontribusi ke BPSDM Prov. Sumbar</div> <div>- BKPSDM meningkatkan dan memberi motivasi kepada pejabat eselon III untuk ikut berpartisipasi dalam Diklat PIM III</div>
		Tujuan	Agar Pejabat Eselon 3 yang mengikuti Diklat PIM III meningkat dan termotivasi

		Alokasi Anggaran	APBD Dharmasraya Tahun 2021 Rp. 767.132.000
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output : sebanyak 44 orang peserta Diklat PIM III selesai dilaksanakan Outcome : Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pejabat Eselon III menjadi lebih baik		

Pulau Punjung, Maret 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



KHAIRUDDIN, SE,MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19650525 198601 1 005

VERIFIKASI KEGIATAN			
Inspektur	Kepala BKD	Kepala BAPPEDA	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
			
(KAMDAM, S.Sos) NIP 19670607 199103 1 004	(PARYANTO, S.Sos, M.T) NIP 19690609 198902 1 001	(Drs. ANDY SUMANTO, CfrA) NIP 19681220 199009 1 001	(BOBBY PRIZA, S.STP, M.Si) NIP 19820521 200012 1 002

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Nama Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kelompok rentan yang terdampak oleh bencana diantaranya kaum perempuan, anak- anak dan lansia	1. Partisipasi (Minimnya minat kaum perempuan menngikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keslapiagaan bercana di daerah rawan bencana)	Belum maksimal dalam meminta peserta sosialisasi dan pelatihan gladi keslapiagaan bencana kepada Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana	Kecendrungan dimasyarakat yang mengikuti kegiatan terkait dgn keslapiagaan bencana hanya diikuti oleh laki- laki	Memprioritaskan kepersertaan perempuan dalam kegiatan pelatihan dan gladi keslapiagaan bencana	Meminta Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana untuk memprioritaskan atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan keslapiagaan bencana.	Kelompok rentan yang terdampak oleh bencana diantaranya kaum perempuan, anak- anak dan lansia	Output : Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi keslapiagaan bencana dari kaum perempuan
Kegiatan : Pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana								Outcome : pelatihan dan gladi keslapiagaan bencana yang responsive gender

Tujuan : Mengurangi resiko bencana bagi kelompok rentan bencana								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

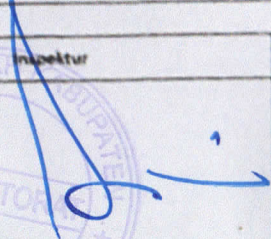



Sungai Dareh, Maret 2020

Kepala Pelaksana,



ELISON, ST

NIP. 31230712 2005012 012

TIM VERIFIKASI			
Inspektur	KEPALA BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, PIA, PKKB
			
KANDAM, S. Sot NIP. 196706071991031004	Dr. ANDY SUMANTO, CHA NIP. 196812201990091001	Dr. ANDY SUMANTO, CHA NIP. 196812201990091001	BUDI PRIZA, S. STP, M. SI NIP. 196505212000121003

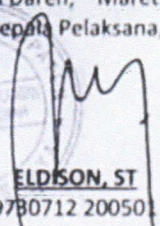
FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)																								
SKPD	: <i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i>																							
TAHUN	: <i>2021</i>																							
ANGGARAN																								
PROGRAM	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																							
KODE PROGRAM	1.06 . 1.06.02 . 22																							
KEGIATAN	Pelatihan dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana																							
HASIL/OUTPUT	- Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum perempuan																							
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). kegiatan pelatihan dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana pesertanya didominasi oleh laki-laki. Sementara ketika terjadinya bencana yang banyak menjadi korban bencana adalah perempuan dan anak-anak.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan (<i>Minimnya kaum perempuan mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana</i>)</p> <p>b. Penyebab Internal(<i>Belum maksimal dalam meminta peserta sosialisasi dan pelatihan gladi kesiapsiagaan bencana kepada Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana</i>)</p> <p>c. Penyebab Eksternal (<i>Kecendrungan dimasyarakat yang mengikuti kegiatan terkait dgn kesiapsiagaan bencana hanya diikuti oleh laki-laki</i>)</p>																							
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">(Mengikutsertakan perempuan dalam sosialisasi dan pelatihan gladi kesiapsiagaan bencana)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tujuan</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">MemintaPemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencanaa untuk memprioritaskan atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">100.000.000,- (Seratus juta rupiah)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tujuan</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Di isi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Total anggaran</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">100.000.000,- (Seratus juta rupiah)</td> </tr> </table>			Komponen/ Aktifitas 1	(Mengikutsertakan perempuan dalam sosialisasi dan pelatihan gladi kesiapsiagaan bencana)		Tujuan	MemintaPemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencanaa untuk memprioritaskan atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.		Alokasi Anggaran	100.000.000,- (Seratus juta rupiah)		Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Di isi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender		Alokasi Anggaran			Total anggaran	100.000.000,- (Seratus juta rupiah)	
Komponen/ Aktifitas 1	(Mengikutsertakan perempuan dalam sosialisasi dan pelatihan gladi kesiapsiagaan bencana)																							
Tujuan	MemintaPemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencanaa untuk memprioritaskan atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.																							
Alokasi Anggaran	100.000.000,- (Seratus juta rupiah)																							
Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)																							
Tujuan	Di isi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender																							
Alokasi Anggaran																								
Total anggaran	100.000.000,- (Seratus juta rupiah)																							

CAPAIAN PROGRAM
(Mengurangi resiko bencana bagi kelompok rentan bencana)

- output dan dampak kegiatan yang memperlihatkan perbaikan kearah KKG (Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum perempuan)

Sungai Darch, Maret 2020

Kepala Pelaksana, 



ELDISON, ST

NIP. 19780712 200501 1 012

TIM VERIFIKASI			
Inspektur	KEPALA BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
			
KANDAM, S. Sos NIP. 196706071991031004	PARYANTO, S. Sos, M.T NIP. 196906091989021001	Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 196812201990091001	BOBBY P. RIZA, S. STP, M. SI NIP. 196105122000121002



OPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina = 33 Cabang	Kurangnya Pembinaan Cabang Olahraga	Kelembagaan anggaran	Rendahnya Tingkat Kesadaran masyarakat khususnya perempuan dalam Berolahraga	Menumbuhkan Budaya Olahraga dan Prestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event - event daerah dan nasional	Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Bantuan Yang Dialokasikan	Output : Cabang Olahraga Yang Diperfungsikan
Kegiatan : Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi = 15 Cabang Peningkat Dalam Porprov = 15 (event 2 tahunan)	Kurangnya Minat Masyarakat Khususnya Perempuan dalam Olahraga	Pelaksanaan kegiatan Olahraga belum responsive gender Kurangnya Cabang Olahraga yang bisa di ikuti perempuan	Dukungan peralatan dan perlengkapan Olahraga yang kurang Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha Terhadap Pengembangan Olahraga dan Hanya Bergantung Pada Pemerintah		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Olahraga Daerah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Olahraga Daerah Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembinaan Berkelanjutan Klub Perkumpulan Organisasi Di Bidang Olahraga	Jumlah Klub/kelompok/ Organisasi Olahraga Yang dibina Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Jumlah Atlet Yang Dibina	Outcome : Jumlah Klub/ Atlet yang Mengikuti Kompetisi
Tujuan : Menumbuhkan Budaya Olahraga dan Prestasi								



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	: DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAHA																		
TAHUN ANGGARAN	: 2021																		
PROGRAM	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga																		
KODE PROGRAM	2.13 . 2.16.01 . 21																		
KEGIATAN	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga																		
HASIL/OUTPUT	- Menumbuhkan Budaya Olahraga dan Prestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event – event daerah dan nasional																		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina = 33 Cabor - Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi = 15 Cabor - Peringkat Dalam Porprov = 15 (event 2 tahunan) <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Minat Masyarakat Khususnya kaum Perempuan dalam Bidang Olahraga b. Keterbatasan Anggaran dan Kurangnya Pembinaan cabang olahraga yang Bisa dilakukan Oleh perempuan c. Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha Terhadap Perkembangan Olahraga dan Hanya bergantung Pada Pemerintah 																		
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td>Tujuan</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan Kapasitas Kompetensi Olahraga Daerah - Pembinaan Berkelanjutan Klub/ Perkumpulan/ Organisasi di Bidang Olahraga </td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp. 474.773.200,-</td> </tr> <tr> <td>Komponen/ aktifitas 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tujuan</td> <td>- Menumbuhkan Budaya Olahraga dan Prestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event – event daerah dan nasional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp. 474.773.200,-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total anggaran</td> <td>Rp. 474.773.200,-</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan Kapasitas Kompetensi Olahraga Daerah - Pembinaan Berkelanjutan Klub/ Perkumpulan/ Organisasi di Bidang Olahraga 	Alokasi Anggaran	Rp. 474.773.200,-	Komponen/ aktifitas 2			Tujuan	- Menumbuhkan Budaya Olahraga dan Prestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event – event daerah dan nasional		Alokasi Anggaran	Rp. 474.773.200,-	Total anggaran		Rp. 474.773.200,-		
Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan Kapasitas Kompetensi Olahraga Daerah - Pembinaan Berkelanjutan Klub/ Perkumpulan/ Organisasi di Bidang Olahraga 																
	Alokasi Anggaran		Rp. 474.773.200,-																
	Komponen/ aktifitas 2																		
	Tujuan	- Menumbuhkan Budaya Olahraga dan Prestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event – event daerah dan nasional																	
	Alokasi Anggaran	Rp. 474.773.200,-																	
Total anggaran		Rp. 474.773.200,-																	
CAPAIAN PROGRAM	Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan dapat meningkatkan Prestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi maupun Nasional																		



TIM VERIFIKASI

 <p>INSPEKTUR</p> <p>KANDAM.S.Sos NIP.19670607 199103 1 004</p>	 <p>KEPALA BKD</p> <p>ARYANTO.S.Sos.MT NIP.19690609 198902 1 001</p>	 <p>KEPALA BAPPEDA</p> <p>Drs. ANDY SUMINTO.C.Fra NIP.19681220 199009 1 001</p>	 <p>KEPALA DISBUDPEKERJAAN</p> <p>DINAS SOSIAL, PEMERATAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUKUNG DAN KEHARGA BENCANA</p> <p>CHARMASRAYA NIP.19681220 199009 1 002</p>
---	--	--	---

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KODE PROGRAM	2.08.2.08.
KEGIATAN	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
HASIL/OUTPUT	Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Kondisi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini memiliki luas tanah 2.170 M2 dan luas bangunan ± 200 M2 yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ruang pelayanan - 3 ruang bidang - 1 ruang sekretariat - 1 ruang sekretaris - 1 ruang kepala - 1 ruang arsip - 1 ruang informasi - WC <p>Bangunan ini ditempati oleh 25 orang ASN, 2 orang Non ASN dan 23 orang THL.</p> <p>Saat ini bangunan kantor terasa terlalu sempit, hal ini membuat aparaturnya dan masyarakat kurang aman dan nyaman dalam bekerja dan berurusan.</p> <p>Jumlah Penduduk tahun 2018 = 215.341 Org yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lk-kk = 108.309 = 50,76 % - Pr = 108.032 = 49,24 % <p>Usia 5-8 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lk-kk = 4.261 = 3,90 % - Pr = 4.144 = 3,91 % <p>Usia 7-12 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lk-kk = 13.841 = 12,86 % - Pr = 12.850 = 12,12 % <p>Usia 13-15 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lk-kk = 8.468 = 5,92 % - Pr = 8.099 = 5,75 % <p>Usia 15-59 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lk-kk = 88.471 = 63,55 % - Pr = 88.484 = 64,59 % <p>Usia 60 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lk-kk = 736 = 0,67 % - Pr = 638 = 0,60 % <p>Penyandang cacat (disabilitas):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lk-kk = 49 = 0,04 % - Pr = 38 = 0,04 % <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidaknyamanan di kantor membuat pegawai kurang maksimal dalam bekerja sebagai aparat pelayanan publik. - Masyarakat yang kurang nyaman dalam berurusan <p>Control:</p> <p>Manfaat:</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desain interior kantor yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebutuhan kantor - Kurangnya pemahaman dari ASN tentang Pengarusutamaan gender <p>c. Penyebab Eksternal</p>

CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Jumlah Dana Rp. 300.000.000.-</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p><u>Input:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengusutan dana untuk rehab gedung kantor, penataan interior dan usulan penghapusan aset sebesar Rp. 300.000.000.- <p><u>Output:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tertualisasinya bangunan gedung kantor Dinas Capil yang Responsif Gender <p><u>Outcome:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Aparatur dan Masyarakat merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan berurusan 						
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)						
RENCANA AMBI	<p>Kegiatan 1 Mengajukan pengusutan anggaran sebesar Rp. 300.000.000.- untuk Rehab gedung kantor, dan penataan interior gedung kantor diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruang Pelayanan Disabilitas ruang ibu menyusui Mushalla Taman Bermain Gudang <table border="1" data-bbox="550 1019 1516 1120"> <tr> <td>Masukan</td><td>Rp 300.000.000.-</td></tr> <tr> <td>Keluaran</td><td>Rehabilitasi Gedung Kantor</td></tr> <tr> <td>Hasil</td><td>Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif</td></tr> </table>	Masukan	Rp 300.000.000.-	Keluaran	Rehabilitasi Gedung Kantor	Hasil	Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif
Masukan	Rp 300.000.000.-						
Keluaran	Rehabilitasi Gedung Kantor						
Hasil	Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif						

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dharmasraya

ADDI AMRI, SE

Pembina TK.I

NIP.19641231 198612 1 002

VERIFIKASI KEGIATAN

<p>Inspektur</p>  <p>KANDAM S. Soe NIP.196706071991031004</p>	<p>KEPALA BID</p>  <p>BARYANTO S. Soe, M.T NIP.196904081988021001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. ANDY SUMANTO, Cita NIP.196812311990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPAD</p>  <p>BOENI M. S. P. M. S. I NIP.198212311980121002</p>
--	--	--	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DPO : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya


PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Identifikasi Masalah	Data Pemetaan Transaksi	Identifikasi Gender	Identifikasi Gender	Identifikasi Gender	Kebijakan dan Rencana Strategis	Kebijakan dan Rencana Strategis	Identifikasi Gender	Identifikasi Gender
Program/Proyek	Data Pemetaan Transaksi	Pelaku Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Rekomendasi Tindakan	Rekomendasi Tindakan	Rekomendasi Tindakan	Rekomendasi Tindakan
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan : Terwujudnya Gedung Kantor yang Representatif	Kencal kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini memiliki luas tanah 2.170 M2 dan luas bangunan 200 M2 yang terdiri dari : - 1 ruang pelayanan - 3 ruang bidang - 1 ruang sekretariat - 1 ruang sekretaris - 1 ruang kepala - 1 ruang antri - 1 ruang informasi - WC Bangunan ini ditempati oleh 25 orang ASN, 2 orang Non ASN dan 23 orang TH. Saat ini bangunan kantor terasa terlalu sempit, hal ini membuat aparat dan masyarakat kurang aman dan nyamannya dalam bekerja dan berurusan. Jumlah Penduduk tahun 2019 = 215.341 Org yang terdiri dari : - Lk - Ik = 109.309 = 50,76 % - Pr = 106.032 = 49,24 % Usia 5-6 th : - Lk - Ik = 4.261 = 3,90 % - Pr = 4.144 = 3,91 %	Akibat : Permasalahan : - Ketidakefisienan di kantor membuat pegawai kurang maksimal dalam bekerja sebagai aparat pelayanan publik. Masyarakat yang kurang nyaman dalam berurusan. Control : Manfaat :	Desain interior kantor yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebutuhan kantor. Kurangnya pemahaman dari ASN tentang Pengarusutamaan gender.	Kesenjangan (Gap)	Terwujudnya bangunan gedung kantor yang representatif	Mengajukan pengajuan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- untuk Rehab gedung kantor, penataan interior gedung kantor diantaranya : - Ruang Pelayanan Disabilitas - Ruang Ibu menyusui - Mushola - Taman bermain - Gudang	Luas Tanah 2.170 M2 Luas bangunan 200 M2 Jumlah ruangan 10 ruangan Jumlah Penduduk tahun 2019 = 215.341 org yang terdiri dari : - Lk - Ik = 109.309 = 50,76 % - Pr = 106.032 = 49,24 % Usia 5-6 th : - Lk - Ik = 4.261 = 3,90 % - Pr = 4.144 = 3,91 % Usia 7-12 th : - Lk - Ik = 13.841 = 12,66 % - Pr = 12.650 = 12,12 % Usia 13-15 th : - Lk - Ik = 6.468 = 5,92 % - Pr = 6.099 = 5,75 % Usia 15-59 th : - Lk - Ik = 69.471 = 63,55 % - Pr = 68.404 = 64,59 % Usia 60 th : - Lk - Ik = 736 = 0,67 % - Pr = 638 = 0,60 % Penyandang cacat (disabilitas) : - Lk - Ik = 49 = 0,04 % - Pr = 38 = 0,04 %	Input : Pengajuan dana untuk rehab gedung kantor, penataan interior dan sebesar Rp.300.000.000,- Output : Terwujudnya bangunan gedung kantor Dinas Cipta Yang responsif gender Outcome : Aparatur dan Masyarakat merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan berurusan

PEMERINTAH KABUPATEN
Dharmasraya
DINAS KEPERBUKHAHAN
DAN KECERDASAN
KABUPATEN
10 APRIL 2012
Pembina TKI
NIP. 196008022119806121002

<p>Inspektur Kardam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004</p>	<p>Tim Verifikasi Kasie Rik Panglima, S.Pd NIP. 196008 199210 1 004</p>	<p>Ketua Bappeda Drs. Endangmanto, S.Pd NIP. 19601220 199009 1 301</p>	<p>Ketua Dinas SOS Dinas SOS, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN PEMUDITA, DAN KELOMPOK BERENCANA NIP. 19600721 199210 1 002</p>
---	---	--	---

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)									
SKPD	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik								
TAHUN ANGGARAN	: 2021								
PROGRAM	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat								
KODE PROGRAM	1.05.4.01.16.21								
KEGIATAN	Pembinaan Administrasi Partai Politik								
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya pemahaman tentang administrasi Partai Politik								
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Data pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 33 Orang yang terdiri dari Pengurus Partai Politik adapun Jumlah keterlibatan antara laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan yaitu 24 Laki-laki dan 9 orang Perempuan</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang pembinaan administrasi dalam pengajuan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik. ➤ Partisipasi Keikutsertaan perempuan dalam mengikuti kegiatan ini lebih sedikit dikarenakan kurangnya keinginan bahwa keikutsertaan laki-laki sudah mewakili yang perempuan. ➤ Manfaat Anggapan bahwa kegiatan ini hanya bermanfaat bagi pengurus partai yang dominan laki-laki. <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan Perempuan dalam ikut serta sebagai pengurus partai politik <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anggapan di masyarakat bahwa keorganisasian wanita didalam partai politik tidaklah memiliki peran yang banyak 								
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td>Komponen/ Aktifitas 1</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengundang Pengurus Partai Politik yang Responsive Gender ➤ Memfasilitasi pengurus parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku </td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Meningkatnya pemahaman tentang Administrasi Partai Politik</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp. 73.168.500,-</td> </tr> <tr> <td>Total anggaran</td> <td>Rp. 73.168.500,-</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengundang Pengurus Partai Politik yang Responsive Gender ➤ Memfasilitasi pengurus parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku 	Tujuan	Meningkatnya pemahaman tentang Administrasi Partai Politik	Alokasi Anggaran	Rp. 73.168.500,-	Total anggaran	Rp. 73.168.500,-
Komponen/ Aktifitas 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengundang Pengurus Partai Politik yang Responsive Gender ➤ Memfasilitasi pengurus parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku 								
Tujuan	Meningkatnya pemahaman tentang Administrasi Partai Politik								
Alokasi Anggaran	Rp. 73.168.500,-								
Total anggaran	Rp. 73.168.500,-								
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Input. Rp. 73.168.500,-								

Pulau Pinang, 24 Maret 2020
 Kepala,
 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Dharmasraya

 ASRI S, Pd, MM
 NIP. 19691225 199109 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN			
INSPEKTUR  KANDAM, S. Sos NIP. 196706071991031004	KEPALA BKD  PARIYANTO, S. Sos, M. I NIP. 196906091989021001	KEPALA BAPPEDA  DRS. ANDY SUMANTO, CvrA NIP. 196812201990091001	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB  BOBBY P RIZA, S. STP, M. Si NIP. 198205212000121002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DHARMASRAYA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Pengembangan Pendekatan Politik Kebijakan Kebijakan Kebijakan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Kegiatan : Pembinaan Administrasi Partai Politik Tujuan : Meningkatkan Pemahaman tentang Administrasi Partai Politik	➤ Data pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 33 Orang yang terdiri dari Pengurus Partai Politik adapun Jumlah keterlibatan antara laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan, yaitu 24 laki-laki dan 9 orang perempuan.	➤ Akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang pembinaan administrasi dalam pengujian dan laporan pergangguhan ban bantuan keuangan partai politik pengurus partai politik	Keterbatasan perempuan dalam ikut serta sebagai pengurus parpol	Anggapan di masyarakat bahwa keorganisasian wanita didalam partai politik tidaklah memiliki peran banyak.	1. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan terpenuhi dalam berkegiatan. 2. Meningkatkan pemahaman tentang administrasi partai politik	➤ Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender ➤ Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku	➤ Jumlah Pengurus Partai Politik	Input : Output : Meningkatkan pemahaman tentang administrasi Partai Politik Outcome: ➤ Meningkatnya pendidikan Politik masyarakat

		<p>yang perempuan.</p> <p>➤ Manfaat</p> <p>Anggapan bahwa hanya bermanfaat bagi pengurus partai yang dominan laki-laki</p>						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pulau Pinang, 24
Kepala

PEMERINTAH
KANTOR
KESANTIAAN BANGSA DAN PE
DHARMASRI

ASRI, S.Pd
Nip. 19691225 19

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

PROGRAM : Perbaikan Gizi Masyarakat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL		
Program : Perbaikan gizi masyarakat		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
Kegiatan Posyandu Balita	Jumlah puskesmas di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 14 Puskesmas, dengan 43 Puskesmas Pembantu, Poskesri 99 dan 243 Posyandu yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Akses: Jika dilihat dari akses, akses pelayanan kesehatan telah memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana pelayanan kesehatan yang telah tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Dharmasraya baik berbentuk Puskesmas, Pustu, Poskesri Klinik, dan Posyandu. Serta sudah ada Pos Gizi di beberapa Kecamatan	- Petugas kesehatan belum melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap gizi bayi dan balita berdasarkan PPRG sehingga sebagian besar pendampingan hanya dilakukan pada ibu. - Dinas Kesehatan belum membuat Anggaran berdasarkan PPRG berupa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan pada partisipasi ayah dalam tumbuh kembang anak	- Status ekonomi masyarakat mempengaruhi makanan yang diberikan kepada balita - Tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang tentang pentingnya makanan gizi pada bayi dan balita serta resiko atau bahaya kurangnya gizi pada bayi dan balita. - Masih ada daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau oleh tenaga kesehatan	- melakukan kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan peran serta ayah dalam pemantauan dan pengawasan tumbuh kembang anaknya dan kegiatan yang meningkatkan kepedulian orang tua terhadap pemantauan gizi anak-anaknya	- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi dengan melakukan penganggaran untuk Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan khusus untuk ayah. - Revitalisasi Nagari Sadar Gizi dengan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya meningkatkan status gizi pada bayi dan balita serta bahaya kurang gizi pada anak dan balita dengan cara pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat. - Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) kurang vitamin	- Penduduk Tahun 2019 → 247.579 - Laki-laki → 128.401 - Perempuan → 119.178 - Jumlah Puskesmas → 14 Puskesmas - Rumah sakit → 2 - Pustu → 43 - Posyandu → 243 Jika dilihat dari data yang ada Balita gizi buruk : tahun 2018 berjumlah laki-laki 6 orang, perempuan 5 orang tahun 2019 berjumlah laki-laki 7 orang, perempuan 15 orang Balita BGM tahun 2018 laki-laki 84 orang perempuan 92 orang sebanyak 176(1,1%) tahun 2019 laki-laki 41 orang perempuan 95 orang sebanyak 136 (0,8%) Sedangkan untuk balita	- Output Perbaikan gizi masyarakat mempunyai 100% - Outcome Keperluan terhadap pemantauan status gizi dan kembang an
Tujuan : Meningkatnya Gizi masyarakat khususnya bayi dan balita	Status gizi kurang pada bayi dan balita dapat dilihat dari kontrol menggunakan buku KMS apabila KMS menunjukkan garis pertumbuhan pada bawah garis merah (BGM) yang dibandingkan dengan BB/TB maka bayi/balita tersebut dapat diindikasikan mengalami kekurangan Gizi, hal ini dapat difeksi dengan pelaksanaan kegiatan posyandu balita di setiap wilayah kerja Puskesmas. Jika dilihat dari data yang ada	Partisipasi: - Masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap gizi anak dan balita serta masih ada masyarakat yang menganggap makanan bergizi itu mahal khususnya masyarakat kurang mampu dan daerah sulit - Sebagian besar yang melakukan kontrol tumbuh kembang anaknya adalah ibu, hanya sebagian kecil						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator K
	Balita gizi buruk : tahun 2018 berjumlah laki-laki 6 orang, perempuan 5 orang tahun 2019 berjumlah laki-laki 7 orang, perempuan 15 orang Balita BGM tahun 2018 laki-laki 84 orang perempuan 92 orang sebanyak 176(1,1%) tahun 2019 laki-laki 41 orang Perempuan 95 orang sebanyak 136 (0,8%) Sedangkan untuk balita stunting yang dipengaruhi oleh status gizi bayi dan balita pada tahun 2018 sebanyak 4.198 (20,4%) Menurun di tahun 2019 sebanyak 2.067 (16,6%)	ayah yang melakukan kontrol terhadap tumbuh kembang anaknya. Hanya sebagian kecil ayah yang mengantarkan anaknya ke Posyandu Control: - Rendahnya pengawasan dan pendampingan pemberian PMT terhadap keluarga yang memiliki bayi dan balita BGM atau hasil penimbangan tidak meningkat 3 kali berturut-turut. - Kontrol petugas kesehatan terhadap bayi yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas masih kurang, sehingga bayi dan balita yang tidak datang ke posyandu masih ada yang tidak dilakukan sweeping oleh petugas kesehatan Manfaat : - Orang tua yang memiliki anak dengan pengukuran BGM atau tidak meningkat selama 3 kali berturut dapat				A dan kurang zat mikro lainnya pada bayi dan balita.	stunting yang dipengaruhi oleh status gizi bayi dan balita pada tahun 2018 sebanyak 4.198 (20,4%) Menurun di tahun 2019 sebanyak 2.067 (16,6%)	



GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
TAHUN ANGGARAN: 2021

PROGRAM	Perbaikan Gizi Masyarakat
KODE PROGRAM	1.02. 1.02.1. 20
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Jumlah puskesmas di Kapupaten Dharmasraya sebanyak 14 Puskesmas, dengan 43 Puskesmas Pembantu, Poskesri 99 dan 243 Posyandu yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.</p> <p>Status gizi kurang pada bayi dan balita dapat dilihat dari kontrol menggunakan buku KMS apabila KMS menunjukkan garis pertumbuhan pada bawah garis merah (BGM) yang dibandingkan dengan BB/TB maka bayi/balita tersebut dapat diindikasikan mengalami kekurangan Gizi, hal ini dapat deteksi dengan pelaksanaan kegiatan posyandu balita di setiap wilayah kerja Puskesmas</p> <p>Jika dilihat dari data yang ada</p> <p>Balita gizi buruk :</p> <p>tahun 2018 berjumlah laki-laki 6 orang, perempuan 5 orang</p> <p>tahun 2019 berjumlah laki-laki 7 orang, perempuan 15 orang</p> <p>Balita BGM tahun 2018 laki-laki 84 orang perempuan 92 orang sebanyak 176(1,1%) tahun 2019 laki-laki 41 orang</p> <p>Perempuan 95 orang sebanyak 136 (0.8%)</p> <p>Sedangkan untuk balita stunting yang dipengaruhi oleh status gizi bayi dan balita pada tahun 2018 sebanyak 4.198 (20,4%)</p> <p>Menurun di tahun 2019 sebanyak 2.067 (16,6%)</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika dilihat dari akses tidak ada kesenjangan, akses pelayanan kesehatan telah memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana pelayanan kesehatan yang telah tersebar diseluruh kecamatan kabupaten dharmasraya baik berbentuk puskesmas, pustu, poskesri, klinik dan posyandu serta sudah ada pos gizi di beberapa kecamatan. - Masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap gizi anak dan balita serta masih ada masyarakat yang menganggap makanan bergizi itu mahal khususnya masyarakat kurang mampu dan daerah sulit - Sebagian besar yang melakukan kontrol tumbuh kembang anaknya adalah ibu, hanya sebagian kecil ayah yang melakukan kontrol terhadap tumbuh kembang anaknya. - Hanya sebagian kecil ayah yang mengantarkan anaknya ke Posyandu - Rendahnya pengawasan dan pendampingan pemberian PMT terhadap keluarga yang memiliki bayi dan balita BGM atau hasil penimbangan tidak meningkat 3 kali berturut-turut. - Kontrol petugas kesehatan terhadap bayi yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas masih kurang, sehingga bayi dan balita yang tidak datang ke posyandu masih ada yang tidak dilakukan sweeping oleh petugas kesehatan.

	<p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Petugas kesehatan belum melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap gizi bayi dan balita berdasarkan PPRG sehingga sebagian besar pendampingan hanya dilakukan pada ibu.- Dinas Kesehatan belum membuat Anggaran berdasarkan PPRG berupa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dikhususkan pada partisipasi ayah dalam tumbuh kembang anak <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">- Status ekonomi masyarakat mempengaruhi makanan yang diberikan kepada balita- Tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang tentang pentingnya makanan gizi pada bayi dan balita serta resiko atau bahaya kurangnya gizi pada bayi dan balita.- Masih ada daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau oleh tenaga kesehatan		
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <ul style="list-style-type: none">- Cakupan Nagari Sadar Gizi Aktif <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah Nagari sadar Gizi Aktif :39 Nagari- Jumlah Puskesmas yang melakukan pemberdayaan masyarakat diwilayah puskesmas masing-masing : 14 Puskesmas		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 1.190.200.000		
RENCANA AKSI RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	
		Masukan	Rp.255.000.000
		Keluaran	Jumlah keluarga sadar gizi yang diberdayakan
		Hasil	terbentuknya Nagari sadar gizi
	Kegiatan 2	Revitalisasi Nagari Sadar Gizi	
		Masukan	Rp. 85.200.000
		Keluaran	Revitalisasi Nagari Sadar Gizi
		Hasil	Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi
	Kegiatan 3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kurang zat mikro lainnya	
		Masukan	Rp.850.000.000
		Keluaran	pemberdayaan kelompok masyarakat peningkatan kualitas kesehatan pada balita dan anak sekolah, dalam rangka penanggulangan KEP, AGB , GAKY DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA
		Hasil	Meningkatnya prevalensi status gizi baik pada balita, anak sekolah dan bumil

Pulau Penjung, Maret 2020
 Penanggung Jawab Kegiatan,

 (d. Rahmadian)
 NIP. 19671206 199903 1 001

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p> <p><u>KANDAM, S.Sos</u> NIP.196706071991031004</p>	<p>KEPALA BKD</p> <p><u>PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP.196906091989021001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p><u>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</u> NIP.196812201990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p> <p><u>BOBBY P RIZA, S.STP, M.Si</u> NIP.198205212000121002</p>
---	---	--	--

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
 PROGRAM : Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Monitoring
Program : Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan: Pembinaan dan Peningkatan Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Ketersediaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang signifikan, seiring dengan tuntutan perkembangan di era globalisasi saat ini. Sehingga disatukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikucilkan. Hal ini sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Governance</i> . Kemudian dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan Pemerintah atau sebaliknya. Akan tetapi setelah dibentuk 11 SK KIM dari Nagari mewakili satu setiap Kecamatan tidak ada seorangpun Perempuan yang terdaftar dalam	Akses: - Tidak ada kesulitan akses Partisipasi: - Kurangnya keterwakilan Perempuan dalam Kelompok Informasi Masyarakat. Kontrol: - Tidak ada kesulitan kontrol Manfaat: - Perempuan tidak mengetahui tidak responsive terhadap informasi terutama dalam perkembangan Pembangunan.	- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama Perempuan dalam pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).	- Kurangnya keinginan Masyarakat Terutama Perempuan dalam ikut berpartisipasi dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	- Tersedianya ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kelompok informasi Masyarakat (KIM)	- Mengajukan Pengusulan anggaran sebesar Rp. 80.000.000 - Mengikutsertakan Perempuan dalam Keanggotaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Ketersediaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang signifikan, seiring dengan tuntutan perkembangan era globalisasi saat ini. Sehingga disatukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikucilkan. Hal ini sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Governance</i> . Kemudian dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan	Input: - Surat Keputusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Nagari Output: - Terwakilinya suara Perempuan dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Nagari Outcome: - Semua masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan mengetahui perkembangan informasi termasuk dalam pembangunan.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	anggota TIM tersebut. Sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bagi perempuan dalam mengetahui informasi.						Pemerintah atau sebaikanya. Akan tetapi setelah dibentuk SK KIM tidak ada satupun Perempuan yang terdaftar dalam anggota TIM tersebut. Sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bagi perempuan dalam mengetahui informasi perkembangan zaman, lingkup kecilnya Daerah tempat tinggalnya.	

Pulaupung, Maret 2020
 Pih, Kepala Dinas
 Dan Informatics
 Reno Lazuardi, S.Pd, M.Si
 Pembina/Iva
 NIP.197512232000121003

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR KANDAM,S.Sos NIP.19670607 199103 1 004	KEPALA BKD PARYANTO,S.Sos.M.I NIP.19690609 198902 1 003	KEPALA BAPPEDA Drs. ANDY SUMANTO, t/a NIP. 19681220 199009 1 001	KEPALA DINAS SOSIAL, PSA, PPKB BOBBY P RIZA,S.STPM,SI NIP.19820521 200012 1 002
--	---	--	---

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya

TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
KEGIATAN	Pembinaan dan Peningkatan Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
KODE PROGRAM	1.25.07.17.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang signifikan, seiring dengan tuntutan perkembangan di era globalisasi saat ini. Sehingga disahkannya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan. Hal ini sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government dan good Governance</i>.</p> <p>Kemudian dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan Pemerintah atau sebaliknya. Akan tetapi setelah dibentuk 11 SK KIM dari Nagari mewakili satu setiap Kecamatan tidak ada seorangpun Perempuan yang terdaftar dalam anggota TIM tersebut. Sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bagi perempuan dalam mengetahui informasi perkembangan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Keterwakilan Perempuan dalam Kelompok Informasi Masyarakat. <p>Kontrol:</p> <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan tidak mengetahui/ tidak responsive terhadap Informasi terutama dalam perkembangan Pembangunan. <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama Perempuan dalam pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Keinginan Masyarakat Terutama Perempuan dalam ikut berpartisipasi dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <p>Jumlah Dana Rp. 35.000.000,-</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Surat Keputusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Nagari</u> <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwakilinya suara Perempuan dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Nagari. <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Semua masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan mengetahui perkembangan Informasi termasuk dalam pembangunan.</u>

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- untuk Pembinaan dan Peningkatan Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	
		Masukan	Rp. 80.000.000,-
		Keluaran	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap Nagari yang melibatkan Laki-Laki dan Perempuan
		Hasil	Tersebar nya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat

Pulau Pinang, Maret 2020
 Pjt. Kepala Dinas,
 Reno Lazuardi, S.Pd, M.Si
 Pembina/ IVa
 NIP. 19751223 200012 1 003

VERIFIKASI KEGIATAN			
INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPEDA	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB
KANDAM, S.Sos NIP.196706071991031004	RARYANTO, S.Sos, M.T NIP.196906091989021001	Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP.196812201990091001	BOBBY PRIZA, S.STP, M.Si NIP.198206212000121002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)


PD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

PROGRAM : Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM</p> <p>Kegiatan: Pelatihan Perkoperasian, Pelatihan Manajemen, Pelatihan Pengelolaan Koperasi, Pelatihan Akuntansi, Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pinjam Koperasi, Pelatihan Kewirausahaan, Penyusunan Laporan Neraca dan Lain-lain)</p> <p>Tujuan : Peningkatannya perekonomian masyarakat dan terciptanya wirausaha muda</p>	<p>Jika dilihat dari sudut pandang sebelum-sebelumnya bahwa pengelola koperasi lebih didominasi oleh para kaum laki-laki. Maka dengan adanya kegiatan pelatihan perkoperasian dan pelatihan kewirausahaan tidak tertutup kemungkinan kaum perempuan juga memiliki peran yang baik dan bahkan juga bisa berwirausaha agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terbentuk 120 orang dari jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 30 orang per kegiatan.</p>	<p><u>Akses:</u> - Pada umumnya di dominasi oleh kaum laki-laki</p> <p><u>Partisipasi:</u> - Perempuan kurang diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan perkoperasian</p> <p><u>Control:</u> - kurang nya pemahaman dalam mengaplikasikan jaringan internet</p> <p><u>Manfaat:</u> - Anggapan bahwa pelatihan ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki</p>	<p>Kurangnya pengetahuan terhadap pengaplikasian jaringan internet, sehingga bisa menghambat pada proses pemasaran barang yang akan di perjual belikan.</p>	<p>Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak usah terlalu aktif dalam pelatihan perkoperasian, sebaliknya ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki.</p>	<p>- Terangkatnya Perekonomian masyarakat dan terciptanya pewartasaha (laki-laki dan perempuan) muda</p>	<p>- Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- untuk kegiatan tersebut</p> <p>- Memberikan penjelasan terhadap cara-cara dalam jual beli online, sehingga masyarakat bisa langsung mempraktekkan dan mempromosikan barang dengan mereka kepada dunia luar.</p>	<p>- Dalam kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh 120 orang dan jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 30 orang per kegiatan.</p> <p>- Sementara itu diperkirakan yang akan menghadiri pelatihan ini hanya sekitar 100 Orang jumlah keseluruhan kegiatan</p>	<p><u>Input :</u> <u>Output :</u> Hasilnya terciptanya para pewartasaha muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat</p> <p><u>Outcome :</u> Perekonomian masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi.</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja

Pulau Punjung, Maret 2020
Kepala
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan


Drs. H. ZUBRIZAL
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19630807 198703 1 007

TIM VERIFIKASI,			
Inspektur	Kepala BKK	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial P3A, PRKB
 KANDAM S. Sos NIP.19620807 199103 1 004	 BARYANTO S. Sos, M. S. NIP.19690609 198903 1 001	 Drs. ANDY SUMANTO, S. P. NIP.19681220 199008 1 001	 BOBRY P RIZA S. STP, M. SI NIP.198521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM								
KEGIATAN	Pelatihan perkoperasian (pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, pelatihan akuntansi, pelatihan pengelolaan struktur pinjam koperasi, pelatihan kewirausahaan dan penyusunan laporan kinerja)								
KODE KEGIATAN	10.30								
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Jika dilihat dari sudut pandang sebelum sebelumnya bahwa pengelola koperasi lebih didominasi oleh para kaum laki-laki. Maka dengan adanya kegiatan pelatihan perkoperasian dan pelatihan kewirausahaan bahwasanya kaum perempuan juga memiliki peran yang baik dan bahkan juga bisa berwirausaha agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terbentuk 120 orang dan jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 30 orang per kegiatan</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <p>Pada umumnya di dominasi oleh kaum laki-laki</p> <p>Partisipasi:</p> <p>Perempuan kurang diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan perkoperasian</p> <p>Control:</p> <p>kurang nya pemahaman dalam mengaplikasikan jaringan internet</p> <p>Manfaat :</p> <p>Anggapan bahwa pelatihan ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>Kurangnya pengetahuan terhadap pengaplikasian jaringan internet, sehingga bisa menghambat pada proses pemasaran barang yang akan di perjual belikan</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak usah terlalu aktif dalam pelatihan perkoperasian, sebaliknya ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki</p>								
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <p>Jumlah Dana sebesar Rp. 275.000.000</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p><u>Input :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 275.000.000 <p><u>Output :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Hasilnya terciptanya para pewira usaha muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat <p><u>Outcome :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perekonomian masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi. 								
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)								
RENCANA AKSI	<table> <tr> <td>Kegiatan 1</td><td>Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- untuk Kegiatan Pelatihan Perkoperasian</td></tr> <tr> <td>Masukan</td><td>Rp. 275.000.000,-</td></tr> <tr> <td>Keluaran</td><td>Kegiatan Pelatihan Perkoperasian</td></tr> <tr> <td>Hasil</td><td>Terciptanya para pewira usaha muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat</td></tr> </table>	Kegiatan 1	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- untuk Kegiatan Pelatihan Perkoperasian	Masukan	Rp. 275.000.000,-	Keluaran	Kegiatan Pelatihan Perkoperasian	Hasil	Terciptanya para pewira usaha muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat
Kegiatan 1	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- untuk Kegiatan Pelatihan Perkoperasian								
Masukan	Rp. 275.000.000,-								
Keluaran	Kegiatan Pelatihan Perkoperasian								
Hasil	Terciptanya para pewira usaha muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat								

Pulau Pinang, Maret 2020

Kepala

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan R.

Kabupaten Dairi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dairi
Drs. H. ZUBRIAT
Pembin Ajiyuda Muda, IV/c
NIP.196308071987031007

VERIFIKASI KEGIATAN

Inspektur KANDAM, S. Sos NIP.196706071991031004	Kepala BKD BARYANTO, S. Sos, M. I NIP.196906091989081001	Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, S. Sos NIP.196812201990091001	Kepala Dinas Sosial, P3A, BEBAY P RIZAL, S. STP, T. I NIP.198205212000221007
---	--	---	--

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 PROGRAM : Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengembangan Dampak Perubahan Iklim

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja	
PROKLIM Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam	Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim tahun 2020: -Kelompok Tani: 30 orang, Lk 10, Pr 20	Akses: Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim : 30 orang, Lk 10 orang sedangkan Pr 20	1. Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender 2. Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang dampak Perubahan Iklim; 3. Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengerusutamaan Gender	Masih rendah alokasi dana terhadap Pengembangan Dampak perubahan iklim	Bertambah jumlah kelompok peran serta masyarakat yang setara antara laki-laki dan perempuan (responsif gender)	1. Sosialisasi tentang Pengembangan Dampak Perubahan iklim yang responsive gender 2. Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan pengembangan dampak perubahan iklim	Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim tahun 2021: -Kelompok Tani: 40 orang, Lk 20, Pr 20	Input 1. Terbinaanya kelompok pengembangan dampak perubahan iklim sebanyak 40 orang 2. Terlaksananya Sosialisasi tentang pengembangan Dampak Perubahan Iklim Out put Terbentuk kelompok baru masyarakat yang peduli terhadap lingkungan yang responsif gender Out come Terbentuknya Kampung Iklim baru	
Tujuan : Membentuk kampung iklim		Partisipasi: Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim : 30 orang, Lk 10 orang sedangkan Pr 20	Control: Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan sehingga keterlibatan laki-laki dalam kelompok belum maksimal.						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			PENGUKURAN HASIL
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kii
		Manfaat : Pengembangan Dampak Perubahan iklim belum merasa penting oleh laki- laki						

Pulau Punjung, Maret 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA

(drg. ERINA, MKM)
NIP. 19620528 198802 2 001

Tim Verifikasi

Inspektur Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199103 1 004	Kepala BKD Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB Bobby P. Niza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002*
--	--	---	---

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)																				
SKPD	: Dinas Lingkungan Hidup																			
TAHUN ANGGARAN	: 2021																			
PROGRAM	Perlindungan dan Konservasi sumber daya Alam																			
KODE PROGRAM	2.05.2.05.01.05.17.																			
KEGIATAN	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim																			
HASIL/OUTPUT	Bertambah jumlah kelompok peran serta masyarakat yang setara antara laki-laki dan perempuan (responsif gender) dalam Pengembangan Dampak Perubahan Iklim																			
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim tahun 2020: Kelompok Tani: 30 orang: Lk 10, Pr 20</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim : 30 orang, Lk 10 orang sedangkan Pr 20 Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan sehingga keterlibatan laki-laki dalam kelompok belum maksimal. Pengembangan Dampak Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki <p style="margin-left: 20px;">b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang dampak Perubahan Iklim Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengerusutamaan Gender <p style="margin-left: 20px;">c. Penyebab Eksternal</p> <p style="margin-left: 40px;">Masih rendah alokasi dana terhadap Pengembangan Dampak perubahan iklim</p>																			
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2">Sosialisasi tentang Pengembangan Dampak Perubahan iklim yang responsive gender</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">Tujuan</td> <td>Terlaksananya Sosialisasi tetang pengembangan Dampak Perubahan Iklim</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2">Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan pengembangan dampak perubahan iklim</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Terbinanaya kelompok pengembangan dampak perubahan iklim sebanyak 40 orang</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total anggaran:</td> <td>Rp. 95.700.000,-</td> </tr> </table>			Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang Pengembangan Dampak Perubahan iklim yang responsive gender		Tujuan	Terlaksananya Sosialisasi tetang pengembangan Dampak Perubahan Iklim	Alokasi Anggaran		Komponen/ aktifitas 2	Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan pengembangan dampak perubahan iklim		Tujuan	Terbinanaya kelompok pengembangan dampak perubahan iklim sebanyak 40 orang	Alokasi Anggaran		Total anggaran:		Rp. 95.700.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang Pengembangan Dampak Perubahan iklim yang responsive gender																			
	Tujuan	Terlaksananya Sosialisasi tetang pengembangan Dampak Perubahan Iklim																		
	Alokasi Anggaran																			
Komponen/ aktifitas 2	Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan pengembangan dampak perubahan iklim																			
	Tujuan	Terbinanaya kelompok pengembangan dampak perubahan iklim sebanyak 40 orang																		
	Alokasi Anggaran																			
Total anggaran:		Rp. 95.700.000,-																		

CAPAIAN PROGRAM
(di level kegiatan)

Output:

Terbentuk kelompok baru masyarakat yang peduli terhadap lingkungan yang responsif gender

Outcome:

Terbentuknya Kampung Iklim baru



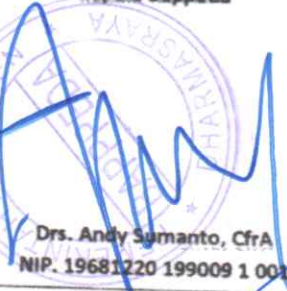

Pulau Punjung, ...Maret 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA**

(Irg. ERINA, MKM)

NIP. 19620528 198802 2 001

Tim Verifikasi

 Inspektur Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199103 1 004	 Kepala BKD Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200612 1 002
---	---	---	---

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya

PROGRAM : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan : Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan Tujuan : <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan Mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 sebanyak 241.572 jiwa orang yang terdiri atas :125.278 Jiwa laki-laki dan 116.293 Jiwa perempuan Usia Anak dari 0- 14 tahun sebanyak 72.030 Jiwa Angka Konsumsi Ikan Tahun 2018 adalah 36 Kg/Kap/tahun. Target Konsumsi Ikan Nasional Tahun 2021 > 50 Kg/Kap. 	<ul style="list-style-type: none"> Akses: 1). Tidak semua masyarakat dapat mengakses kegiatan ini. 2). Masyarakat yang ikut dalam kegiatan di dominasi oleh kaum ibu (Wanita). Partisipasi : Tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini (di dominasi oleh kaum perempuan /ibu-ibu) Manfaat : Tidak semua masyarakat menerima manfaat dari kegiatan ini. 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sumberdaya manusia untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi tubuh. Keterbatasan dukungan pembiayaan yang memadai untuk kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kepedulian dan keterlibatan masyarakat terutama laki-laki tentang manfaat makan ikan bagi tubuh terutama anak-anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan Mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan frekuensi Edukasi kepada masyarakat tentang Manfaat Makan ikan Meningkatkan Peran aktif dari seluruh unsur masyarakat dalam mengSosialisasikan manfaat makan ikan Menambah jumlah Media Sosialisasi dan Edukasi manfaat makan ikan melalui event lomba masak serba ikan , pelatihan pengolahan ikan, leaflet, baliho dan melalui media sosial lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Makan ikan yang dilaksanakan Jumlah masyarakat yang mengikuti / terlibat dalam kegiatan Jumlah Media Edukasi yang di ciptakan/di buat Jumlah Organisasi Pemerintah dan Organisasi Kemsayarakat yang berperan aktif dalam edukasi dan Sosialisasi manfaat makan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Output : 1). Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Sosialisasi dan edukasi manfaat makan ikan 2). Persentase Media yang digunakan untuk edukasi dan Sosialisasi makan ikan Outcome : 1) Angka Konsumsi Ikan Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN



<p>INSPEKTUR</p>  <p>Kandam, S.Sos</p> <p>19670607 199205 1 004</p>	<p>KEPALA BKD</p>  <p>Puryanto, S.Sos, M.T.</p> <p>NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>TIM VERIFIKASI</p> <p>KEPALA BAPPEDA</p>  <p>Drs. Andy Gumarto, CFA</p> <p>NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>KEPALA DINAS SOSIAL</p>  <p>Hobby R. Riza, S.STP, M.Si</p> <p>NIP. 19810521 20012 1 002</p>
--	--	--	---

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Pangan dan Perikanan

TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
KODE PROGRAM	3.01.2.03.01.23
KEGIATAN	Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan
HASIL/OUTPUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi tubuh dan kesehatan 2. Meningkatnya angka Konsumsi ikan perkapita masyarakat
ANALISA SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 241.572 Jiwa yang terdiri atas 125.278 Jiwa laki-laki dan 116.293 Jiwa perempuan - Usia Anak dari 0-14 Tahun sebanyak 72.030 Jiwa - Angka Konsumsi Ikan Daerah Tahun 2018 sebanyak sebesar 36 Kg/Kap/Th - Target Konsumsi Ikan Nasional > 50 Kg/Kap/th 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan Akses: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua masyarakat dapat mengakses kegiatan ini - Masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini di dominasi oleh Perempuan (kaum ibu) Partisipasi: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini (di dominasi oleh kaum perempuan/ibu-ibu) Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua masyarakat menerima manfaat dari kegiatan ini b. Penyebab Internal <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatas sumberdaya manusia untuk mengedukasi masyarakat tentang Manfaat makan ikan bagi tubuh - Keterbatasan dukungan pembiayaan yang memadai untuk kegiatan c. Penyebab Eksternal <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kepedulian dan keterlibatan masyarakat terutama laki- laki tentang manfaat makan ikan bagi tubuh terutama anak-anak
CAPAIAN PROGRAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tolak Ukur Jumlah Dana Rp. 70.000.000,- 2. Indikator dan Target Kinerja <p><u>Input :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan dana untuk kegiatan Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi tubuh sebesar Rp. 70.000.000,- <p><u>Output:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi kesehatan <p><u>Outcome :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- untuk Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan	
		Masukan	Rp 70.000.000,-
		Keluaran	Jumlah event Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi tubuh
		Hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya event Sosialisasi manfaat makan ikan bagi tubuh - Terlaksananya edukasi masyarakat tentang manfaat makan ikan melalui baliho, leaflet, lomba masak serba ikan dan pelatihan pengolahan ikan
			<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pemberian makanan berbahan ikan kepada anak-anak dalam masa emas pertumbuhan

Pulau Poniung, Maret 2020
 Kepala Dinas

PURWANTO, M.Pd
 NIP. 19620805 198308 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN

Inspektur  KANDAM, S.Sos NIP.196706071991031004	KEPALA BKD  PARYANTO, S.Sos, M.T NIP.196906091989021001	Kepala Bappeda  Drs. ANDRI SUMANTO, Cfr NIP. 196812201990091001	Kepala Dinas Sosial, P3A,  BOBY MASRAYA NIP.196812201990091002
---	---	--	--

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pendidikan

PROGRAM : Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan Mutu Tenaga dan Kependidikan Kegiatan : Pelaksanaan sertifikasi Pendidik Tujuan : Terlaksananya sosialisasi, seleksi dan Pemberkasan dokumen guru SD dan SMP peserta Sertifikasi di kabupaten Dharmasraya	*Jumlah Sertifikasi di kabupaten Dharmasraya : 1270 orang *Jumlah Guru sertifikasi Laki – Laki di kabupaten dharmasraya : 306 orang *Jumlah Guru sertifikasi Perempuan di kabupaten dharmasraya : 954 orang	Akses: * Kuota guru sertifikasi * Anggaran blm memadai Partisipasi: - Pindah tugas/ mutasi - Tidak terpenuhinya jumlah jam mengajar Control: Jumlah guru sertifikasi yang ada di kabupaten Dharmasraya Manfaat : Seleksi yang diberikan	*Masih adanya sekolah kecil / terpencil di kabupaten dharmasraya *Masih terbatasnya jumlah peserta PPG pra jabatan atau dalam jabatan	*Kurangnya anggaran untuk guru sertifikasi	Meningkatkan sosialisasi sertifikasi kepada guru – guru	*Melakukan kerja sama dengan pihak kementrian dan ditjen GTK untuk menambah kuota penerima sertifikat pendidik / sertifikasi *Memberikan pelatihan kepada guru – guru dalam melaksanakan PPG pra jabatan atau dalam jabatan. *Meningkatkan sarana dan prasarana serta minat siswa sekolah	Jumlah Guru Sertifikasi	*Terlaksananya pelaksanaan sertifikasi pendidik *Meningkatnya Guru Sertifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala Dinas,



MARIUS,S.Pd,MM

Nip. 19641116 198802 1 002

Inspektur KANDAM,S.Sos NIP.196706071991031004	KEPALA BKD PARYANTO,S.Sos,M.T NIP.196906091989021001	Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO,CfrA NIP. 196812201990091001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB BOBBY P RIZA,S.STP,M.SI NIP.198205212000121002
---	--	---	---

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	: DINAS PENDIDIKAN		
TAHUN ANGGARAN	: 2021		
PROGRAM	Peningkatan Mutu Tenaga dan Kependidikan		
KODE PROGRAM			
KEGIATAN	Pelaksanaan sertifikasi Pendidik		
HASIL/OUTPUT	Meningkatkan sosialisasi sertifikasi kepada guru – guru		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <p>Jumlah Guru Sertifikasi di kabupaten Dharmasraya : 1270 orang</p> <p>Jumlah Guru sertifikasi Laki – Laki di kabupaten dharmasraya : 306 orang</p> <p>Jumlah Guru sertifikasi Perempuan di kabupaten dharmasraya : 954 orang</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Akses:</p> <p style="padding-left: 20px;">Kuota guru sertifikasi</p> <p style="padding-left: 20px;">Anggaran blm memadai</p> <p style="padding-left: 20px;">Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pindah tugas/ mutasi - Tidak terpenuhinya jumlah jam mengajar <p style="padding-left: 20px;">Control: Jumlah guru sertifikasi yang ada di kabupaten Dharmasraya</p> <p style="padding-left: 20px;">Manfaat : Seleksi yang diberikan</p> <p>b.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya sekolah kecil / terpencil di kabupaten dharmasraya - Masih terbatasnya jumlah peserta PPG pra jabatan atau dalam jabatan <p>c. Kurangnya anggaran untuk guru sertifikasi</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Memberikan pelatihan kepada guru – guru dalam melaksanakan PPG pra jabatan atau dalam jabatan.	
		Tujuan	Meningkatnya Guru Sertifikasi
		Alokasi Anggaran	Rp.65.500.000,00
		Total anggaran	Rp.65.500.000,00
CAPAIAN PROGRAM	<p>-Terlaksnananya pelaksanaan sertifikasi pendidik</p> <p>-Meningkatnya Guru Sertifikasi</p>		

	Anggaran	
	Total anggaran	Rp.65.500.000,00
CAPAIAN PROGRAM	-Terlaksnananya pelaksanaan sertifikasi pendidik -Meningkatnya Guru Sertifikasi	




Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala Dinas,



MARIUS, S. Rd, MM

Nip. 19641116 198802 1 002

Inspektur  KANDAM, S. Sos NIP.196706071991031004	KEPALA BKD  RARYANTO, S. Sos, M.T NIP.196906091989021001	Kepala Bappeda  Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 196812201990091001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB  BOBBY P RIZA, S.STP, M.SI NIP.198205212000121002
--	--	--	---

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Monitoring Indikator Gender
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
<p>Program :</p> <p>Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</p> <p>Kegiatan :</p> <p>Pembangunan Gedung Terminal Tipe C</p> <p>Tujuan :</p> <p>Melayani Kendaraan Penumpang Umum untuk Angkutan Pedesaan (ADES).</p>	<p>Data penumpang ADES pada tahun 2019 ± 7980 Orang yg terdiri dari :</p> <p>* laki-laki</p> <p>2480 orang</p> <p>* perempuan 5500 orang</p>	<p>Akses</p> <p>Banyaknya jumlah penumpang karena terminal berada di dalam pasar.</p> <p>Partisipasi</p> <p>Belum sepenuhnya pelayanan terhadap penumpang</p> <p>Manfaat</p> <p>Memberikan fasilitas bagi penumpang perempuan dan laki-laki yang berada di</p>	<p>Belum optimalnya tempat istirahat bagi penumpang perempuan yang ada di terminal</p> <p>Karena tempat/keadaan yang belum memadai</p> <p>Belum maksimalnya pelayanan terhadap penumpang</p>	<p>Fungsi dan manfaat terminal yang masih harus ditingkatkan</p> <p>Masih kurangnya service terhadap penumpang</p>	<p>Melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Pedesaan (ADES)</p>	<p>Meningkatkan pelayanan terhadap penumpang laki-laki dan perempuan</p> <p>Membuat penumpang nyaman mungkin</p>	<p>Jumlah data penumpang ADES</p>	<p>Output : Terlaksananya pelayanan yang sempurna terhadap penumpang</p> <p>Outcome : Meningkatkan kepuasan penumpang terhadap pelayanan di terminal</p>

			terminal.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Gunting Medan, Maret 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAMILUS, SP.M.Si
 Pembina Utama Muda / IV C
 Nip. 19670918 199203 1 004

Tim Verifikasi

Inspektur Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	Kepala BKD Paryanto, S.Sos.M.T. NIP. 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda Dis. Andy Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas OSP3A PPKB Bobo P. Riza, S.STP-M.Si NIP. 19820521 200012 1 002
--	--	--	---

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)																				
SKPD TAHUN ANGGARAN	: DINAS PERHUBUNGAN : Tahun Anggaran 2020																			
PROGRAM	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan																			
KODE PROGRAM	2.09.2.09.01.18																			
KEGIATAN	Pembangunan Gedung Terminal Tipe C																			
HASIL/OUTPUT	Melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Pedesaan (ADES)																			
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <p>Data penumpang ADES pada tahun 2019 ± 7980 orang yang terdiri dari laki-laki 2480 orang dan perempuan 5500 orang.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Banyaknya jumlah penumpang perempuan karena terminal berada di dalam pasar.</p> <p>b. Belum optimalnya tempat istirahat bagi penumpang perempuan yang ada di terminal.</p> <p>c. Fungsi dan manfaat terminal yang masih harus di tingkatkan.</p>																			
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%; padding: 5px;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Meningkatkan pelayanan terhadap penumpang laki-laki dan perempuan</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Supaya penumpang senang dan nyaman</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="padding: 5px;">Rp. 50.000.000.-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="padding: 5px;">Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Membuat penumpang nyaman mungkin</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Supaya penumpang ADES meningkat</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="padding: 5px;">Rp. 20.000.000.-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Total anggaran</td> <td style="padding: 5px;">Rp. 70.000.000.-</td> </tr> </table>			Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan pelayanan terhadap penumpang laki-laki dan perempuan		Tujuan	Supaya penumpang senang dan nyaman	Alokasi Anggaran	Rp. 50.000.000.-	Komponen/ aktifitas 2	Membuat penumpang nyaman mungkin		Tujuan	Supaya penumpang ADES meningkat	Alokasi Anggaran	Rp. 20.000.000.-	Total anggaran		Rp. 70.000.000.-
Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan pelayanan terhadap penumpang laki-laki dan perempuan																			
	Tujuan	Supaya penumpang senang dan nyaman																		
	Alokasi Anggaran	Rp. 50.000.000.-																		
Komponen/ aktifitas 2	Membuat penumpang nyaman mungkin																			
	Tujuan	Supaya penumpang ADES meningkat																		
	Alokasi Anggaran	Rp. 20.000.000.-																		
Total anggaran		Rp. 70.000.000.-																		
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	<p>Output : Terlaksananya Pelayanan yang sempurna terhadap penumpang</p> <p>Outcome : Meningkatnya kepuasan penumpang terhadap pelayanan di terminal</p>																			

Gunung Medan, Maret 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

RAMILUS, SP.M.Si

Pembina Utama Muda IV/C

Nip. 19670918 199203 1 004

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas SOSPAAPKB
Kandam, S.Sos	Paryanto, S.Sos, M.I	Drs. Andy Sumanto, CFA	Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19670607 199203 1 004	NIP. 19690609 198902 1 001	NIP. 19681220 199009 1 001	NIP. 19820521 200012 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
Kegiatan : Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Tujuan : meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian	Jumlah petani Jumlah penyuluh Kelompok tani Kelompok wanita tani (KWT)	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
		Akses: damptingan yang diberikan antara perempuan dan laki-laki Partisipasi: tidak seluruh petani yang mendapatkan damptingan Control: damptingan yang di berikan	SDM tidak mencukupi Jumlah kelompok tani dan dan kelompok wanita tani	Tingkat Antusias masyarakat	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan Meningkatkan fungsi kelembagaan petani	Penyuluhan ke pada KWT dan kelompok tani	Jumlah petani Jumlah penyuluh Kelompok tani	Jumlah penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berprestasi

Manfaat : dengan penyuluhan dan dampingan yang diberikan bisa meningkatkan produksi

Pulau Punjung, Maret 2020
Kepala Dinas Pertanian

DARISMAN, SSL, MM
NIP. 19750217-200003 1001

<p>Inspektur</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Drs. Audy Sumanto, CERA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Bobby Riza, S.STP, M.Si NIP. 19630521 200012 1 002</p>
---	---	--	--

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : DINAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
KODE PROGRAM	2.01.01.15								
KEGIATAN	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis								
HASIL/OUTPUT	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan Meningkatkan fungsi kelembagaan petani								
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah petani ➤ Jumlah penyuluh ➤ Kelompok tani ➤ Kelompok wanita tani(KWT) <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Akses: dampingan yang diberikan antara perempuan dan laki-laki Partisipasi: tidak seluruh petani yang mendapatkan dampingan Control: dampingan yang di berikan Manfaat : dengan penyuluhan dan dampingan yang diberikan bisa meningkatkan produksi</p> <p>b. Penyebab Internal SDM tidak mencukupi Jumlah kelompok tani dan dan kelompok wanita tani</p> <p>c. Penyebab Eksternal Tingkat Antusias masyarakat</p>								
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td>Komponen/ Aktifitas I</td><td>Penyuluhan ke pada KWT dan kelompok tani</td></tr> <tr> <td>Tujuan</td><td>Diisi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender</td></tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td><td>Rp. 507.000.000,-</td></tr> <tr> <td>Total anggaran</td><td>Rp. 507.000.000,-</td></tr> </table>	Komponen/ Aktifitas I	Penyuluhan ke pada KWT dan kelompok tani	Tujuan	Diisi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender	Alokasi Anggaran	Rp. 507.000.000,-	Total anggaran	Rp. 507.000.000,-
Komponen/ Aktifitas I	Penyuluhan ke pada KWT dan kelompok tani								
Tujuan	Diisi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender								
Alokasi Anggaran	Rp. 507.000.000,-								
Total anggaran	Rp. 507.000.000,-								
CAPAIAN PROGRAM	Jumlah penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berprestasi								

Pulau Punjung, Maret 2020
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Dharmasraya

VERIFIKASI KEGIATAN			
INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPEDA	KEPALA DINAS
			
KANDAM S. Sos NIP.196706071991031004	PARIYANTO S. Sos NIP.196906091989021001	DRS. ANDY SUMANTO NIP.196812201990091001	BOBBY RIZA S. STP NIP.198908122000121002

DINAS PERTANIAN
DARISMAN, SSi, MM
NIP. 19750217 200003 1001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBUJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Base Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan Kemampuan Pemerintah Nagari Kegiatan : Pembinaan LPM Nagari Tujuan : Terselenggaranya pembinaan LPM yang handal	Dasar Pedoman LPM adalah Perundang-undangan No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang amanatkan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Nagari LPM terdiri dari 3 anggota kepengurusan yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara Jumlah anggota LPM 156 orang dari 52 Nagari yang hadir dalam pembinaan LPM kurang dari 50% sekitar 60 orang	Akses - Kurangnya anggaran operasional untuk kegiatan LPM - rendahnya gaji / penghasilan yang diterima oleh anggota LPM Partisipasi - Rendahnya partisipasi dan semangat anggota LPM untuk mengikuti pembinaan LPM Kontrol - Pembinaan LPM hanya sebatas memenuhi amanat Perundang-undangan No 18 Tahun 2018 - Hanya untuk mengikuti kegiatan tahunan	- LPM belum memahami dengan tugas pokok dan fungsi dari LPM - Banyak yang mengundurkan diri dari kepengurusan LPM karena keterbatasan anggaran	- Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari peserta pembinaan LPM - Peserta lebih banyak diikuti oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan - Minimnya pelaksanaan sosialisasi kepada LPM terkait pembinaan LPM - Masih minimnya informasi/pengetahuan yang dimiliki oleh anggota LPM	Terwujudnya LPM LPM yang handal dan kompeten	- Meningkatkan koordinasi dengan OPD Provinsi - Membentuk kelompok LPM yang dibagi berdasarkan wilayah kerja	- Pelaksanaan Pembinaan LPM tahun 2019 yang hadir berjumlah 60 orang peserta - Komposisi jenis kelamin 40 laki-laki dan 10 perempuan. - Komposisi elemen yang hadir dari LPM dan sekretaris seluruh Nagari di Dharmasraya - Tingkat kehadiran pada tahun 2019 di dominasi oleh laki-laki	Kegiatan 1: Pembinaan LPM Nagari Input: Rp. 175.000.000,- Output: Pembinaan LPM di Nagari Outcome: Terselenggaranya LPM Nagari yang handal dan kompeten

Pulau-Pinang, 23 Maret 2020

 Kepala Dinas
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Dharmasraya


 (HASTO KUNCORO,M.Pd.)
 NIP.19730301 199801 1 001

TIM VERIFIKASI

Lembar : 2

<p>INSPEKTUR</p>  <p>KANDAM, S. Sos NIP. 19670607 199103 1 004</p> 	<p>KEPALA BKD</p>  <p>PARYANTO, S. Sos, MT NIP. 19690909 198902 1 001</p> 	<p>KEPALA BAPPEDA</p>  <p>Drs. ANDY SUMANTO, CFA NIP. 19681220 199009 1 001</p> 	<p>KEPALA DINSOSP3APPKB</p>  <p>BOBBY P RIZA, S. STP, M. SI NIP. 19820521 200012 1 002</p> 
---	---	--	---

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN : 2021









PROGRAM	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		
KODE PROGRAM	1.02.07.1.02.07.01.18		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ol style="list-style-type: none"> Dasar Pedoman Pembentukan LPM adalah Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang mengamanatkan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Nagari LPM terdiri dari 3 anggota kepengurusan yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara Jumlah anggota LPM 156 orang dari 52 Nagari yang Hadir dalam pembinaan LPM kurang dari 50% sekitar 60 orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya anggaran operasional untuk kegiatan LPM rendahnya gaji / penghasilan yang diterima oleh anggota LPM <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya partisipasi dan semangat anggota LPM untuk mengikuti pembinaan LPM <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan LPM hanya sebatas memenuhi amanat Permendagri No 18 Tahun 2018 Hanya untuk mengikuti kegiatan tahunan <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> LPM belum memahami dengan tugas pokok dan fungsi dari LPM Banyak yang mengundurkan diri dari ke pengurusan LPM karena keterbatasan anggaran <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari peserta pembinaan LPM Peserta lebih banyak diikuti oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan Minimnya pelaksanaan sosialisasi kepada LPM terkait pembinaan LPM Masih minimnya informasi/pengetahuan yang dimiliki oleh anggota LPM 		
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <p>Jumlah Dana Rp.175.000.000,-</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p><u>Input</u></p> <p>Dana yang diusulkan sebesar 175.000.000,-</p> <p><u>Output</u></p> <p>Pembinaan LPM di Nagari</p> <p><u>Outcome</u></p> <p>Terlaksananya pembinaan LPM Nagari yang handal dan kompeten</p>		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 175.000.000,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1		
	Masukan	Rp. 175.000.000,-	
	Keluaran	Pembinaan LPM di Nagari	
	Hasil	Terlaksananya pembinaan LPM Nagari yang handal dan kompeten	

Pulau Punjung, 23 Maret 2020

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Dharmasraya

(HASTO KUNCORO, M.Pd)
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19730301 199801 1 001

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPPEDA	KEPALA DINSOSP3APKB
  KANDAM, S.Sos NIP.19670607 199103 1 004	  PARYANTO, S.Sos., MT NIP.19690609 198902 1 001	  Drs. ANDY SUMANTO, C.FrA NIP.19681220 199009 1 001	  BOBBY R RIZA, S.STP., M.Si NIP.19820521 200012 1 002

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM : Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka/ Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor yang representative	Akses : Belum tersedianya design yang responsive gender Manfaat : Bangunan yang belum responsive gender belum dapat dimanfaatkan oleh kelompok gender	- Terbatasnya info persyaratan bangunan yang responsive gender - Keterbatasan anggaran	Terbatasnya info persyaratan bangunan yang responsive gender - Keterbatasan anggaran - musrembang sentral, tetapi untuk menghadirkan mereka sulit	lansia, disabilitas	- Melakukan advokasi pentingnya bangunan yang responsive gender sesuai dengan permenpu - Membangun/ redesign toilet untuk L dan P, penyandang disabilitas - Menyediakan ruang laktasi - Menyediakan dan membangun akses bagi pemakai kursi roda - Menyediakan taman penitipan anak	- Musrembang yang dilaksanakan : diikuti oleh Laki-laki, - Perempuan, Lansia, Disabilitas, Forum anak (minimal tiga tahu -	Output : Outcome :

Sungai Dareh,

Maret 2020

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ir. JUNAEDI YUNUS

Pembin Utama Muda / IV.c
NIP. 19630929 199803 1 003

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)										
SKPD TAHUN ANGGARAN	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : 2021									
PROGRAM	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
KODE PROGRAM	1.03 . 1.03.01 . 02									
KEGIATAN	Pembangunan Gedung Kantor									
HASIL/OUTPUT										
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> - persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor yang representative <p>2. Isudat Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>Akses:</p> <p>Belum tersedianya design yang responsive gender</p> <p>Manfaat :</p> <p>Bangunan yang belum responsive gender belum dapat dimanfaatkan oleh kelompok gender</p> <p>a. Penyebab Internal</p> <p>Terbatasnya info persyaratan bangunan yang responsive gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran <p>b. Penyebab Eksternal</p> <p>Terbatasnya info persyaratan bangunan yang responsive gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran - musrembang sentral, tetapi untuk menghadirkan mereka sulit 									
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan advokasi pentingnya bangunan yang responsive gender sesuai dengan permenpu - Membangunan/ redesign toilet untuk L dan P, penyandang disabilitas </td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>lansia, disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp. 250.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Total anggaran</td> <td>Rp. 250.000.000,-</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan advokasi pentingnya bangunan yang responsive gender sesuai dengan permenpu - Membangunan/ redesign toilet untuk L dan P, penyandang disabilitas 		Tujuan	lansia, disabilitas	Alokasi Anggaran	Rp. 250.000.000,-	Total anggaran	Rp. 250.000.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan advokasi pentingnya bangunan yang responsive gender sesuai dengan permenpu - Membangunan/ redesign toilet untuk L dan P, penyandang disabilitas 									
	Tujuan		lansia, disabilitas							
	Alokasi Anggaran		Rp. 250.000.000,-							
	Total anggaran	Rp. 250.000.000,-								
CAPAIAN PROGRAM	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor yang representatif									

Sungai Dareh,

Maret 2020

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Ir. JUNAEDI YUNUS

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19630929 199803 1 003

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p> <p>KANDAM, S.Sos NIP.196706071991031004</p>	<p>KEPALA BKD</p> <p>PARYANTO, S.Sos, M.T NIP.196906091989021001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p>Drs. ANDY SUMANTO, Cfra NIP.196812201990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPI</p> <p>BOBBY P RIZA, S.STP, M.Si NIP.198205212000121002</p>
---	---	--	---

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

D : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)

GRAM : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program :</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <p>Isu Gender :</p> <p>Isu Gender : kekerasan terhadap perempuan</p> <p>Analisis :</p> <p>Analisis : kekerasan terhadap perempuan</p> <p>Hasil :</p> <p>Hasil : kekerasan terhadap perempuan</p> <p>Output :</p> <p>Output : kekerasan terhadap perempuan</p>	<p>Data tahun 2019</p> <p>a. Jumlah KDRT yang melapor 5 orang</p> <p>b. Jumlah perempuan korban kekerasan 14 orang</p> <p>c. Jumlah anak korban kekerasan 14 orang</p> <p>d. Jumlah saksi laki-laki 2 orang</p> <p>e. ABH pelaku laki-laki 9 orang (100%)</p> <p>f. ABH korban 1 orang (100%)</p> <p>g. Diversi tingkat penidik laki-laki 8 orang (100%)</p> <p>h. Pembinaan di Lapas laki-laki 1 orang (100%)</p> <p>i. 2 orang psikolog dan 2 orang peksos</p>	<p>Kontrol</p> <p>Masih ada keluarga yang tidak mau melaporkan anaknya korban kekerasan</p>	<p>- Kurangnya promosi tentang stop kekerasan pada perempuan dan anak serta adanya lembaga yang melindungi perempuan anak dari kekerasan</p>	<p>- Masyarakat masih beranggapan bahwa KDRT urusan domestik rumah tangga tidak boleh ikut campur</p> <p>- Masyarakat masih merasa malu/tabu jika melaporkan kekerasan pada perempuan dan anak</p>	<p>Menurunnya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak</p>	<p>- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>- Pendampingan kasus oleh psikolog</p>	<p>a. Jumlah KDRT yang melapor 5 orang</p> <p>b. Jumlah perempuan korban kekerasan 14 orang</p> <p>c. Jumlah anak korban kekerasan 14 orang</p> <p>d. Jumlah saksi laki-laki 2 orang</p> <p>e. ABH pelaku laki-laki 9 orang (100%)</p>	<p>Output :</p> <p>- Menurunnya KDRT dan kekerasan terhadap perempuan 14 orang</p> <p>- Menurunnya korban kekerasan terhadap perempuan 14 orang</p> <p>- Menurunnya saksi laki-laki 2 orang</p> <p>- Menurunnya ABH pelaku laki-laki 9 orang (100%)</p> <p>- Menurunnya ABH korban 1 orang (100%)</p> <p>- Menurunnya diversifikasi tingkat penidik laki-laki 8 orang (100%)</p> <p>- Menurunnya pembinaan di Lapas laki-laki 1 orang (100%)</p> <p>- Menurunnya 2 orang psikolog dan 2 orang peksos</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
	sebagai pendamping kekerasan j. Tersedianya P2TP2A dan LK3 sebagai wadah konsultasi							perempuan anak di Kal Dharmasra

Inspektur
Kandam, S.Sos
NIP. 19670607 199203 1 004

Kepala BKD
Paryanto, S.Sos, M.I
NIP. 10690609 198902 1 001

Kepala Bappeda
Drs. Andy Sumanto, CFA
NIP. 19681220 199009 1 001

Kepala Dinas SOSPP3APPKB
Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Pulau Pinang, Maret 2020
Kepala Dinas SOSPP3APPKB
Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)		
TAHUN ANGGARAN	: 2021		
PROGRAM	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		
KODE PROGRAM	2.02.1.06.01.17		
KEGIATAN	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		
HASIL/OUTPUT	Menurunnya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Dari data tahun 2019</p> <p>a. Jumlah KDRT yang melapor 5 oran</p> <p>b. Jumlah perempuan korban kekerasan 14 orang</p> <p>c. Jumlah anak korban kekerasan 14 orang laki-laki (14,3%) dan perempuan (85,7%)</p> <p>d. Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 12 terdiri dari</p> <p>1) ABH sebagai pelaku laki-laki 9 orang (100%)</p> <p>2) ABH sebagai saksi laki-laki 2 orang (100%)</p> <p>3) ABH sebagai korban 1 orang (100%)</p> <p>e. Diversi tingkat penyidik laki-laki 8 orang (100%) dan pembinaan di Lapas laki-laki 1 orang (100%)</p> <p>f. 2 orang psikolog dan 2 orang peksos sebagai pendamping kekerasan dan tersedianya P2TP2A dan LK3 sebagai wadah konsultasi</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Kontrol Masih ada keluarga yang tidak mau melaporkan anaknya sebagai korban kekerasan</p> <p>b. Penyebab Internal Penyebab internal terjadinya kesenjangan ini adalah kurangnya promosi tentang stop kekerasan pada perempuan dan anak serta adanya lembaga yang melindungi perempuan anak dari kekerasan</p> <p>c. Penyebab Eksternal Masyarakat masih beranggapan bahwa KDRT urusan domestik rumah tangga masing-masing sehingga tidak boleh ikut campur dan masih merasa malu/tabu jika melaporkan kekerasan pada perempuan dan anak</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	
		Tujuan	Meningkatnya pengetahuan anggota P2TP2A dan Masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Alokasi Anggaran	Rp. 60.000.000,-
	Komponen/ aktifitas 2	Pendampingan kasus oleh psikolog	
		Tujuan	Berkurangnya trauma yang dialami korban
		Alokasi Anggaran	Rp. 10.000.000,-
	Total anggaran		Rp. 70.000.000,-

CAPAIAN PROGRAM	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya KDRT dari 5 orang menjadi 2 orang - Menurunnya korban kekerasan pada perempuan dari 14 orang menjadi 8 orang - Menurunnya anak korban kekerasan dari 14 orang menjadi 8 orang - Menurunnya ABH pelaku dari 9 orang menjadi 5 orang <p>Out Come:</p> <p>Menurunnya tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kab. Dharmasraya</p>
------------------------	--


Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala Dinas SOSP3APPKB

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200612 1 002

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p> <p>Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p> <p>Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p>Drs. Andy Sumanto, C.FrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas SOSP3APPKB</p> <p>Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200612 1 002</p>
--	--	--	---

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		Nomor DPA SKPD	Formulir RKA-
	tahun Anggaran 2021		1.02.02.1.01.06.02.17.06	SKPD 2.2.1
Kabupaten Dharmasraya				
Tahun Anggaran 2019				
Urusan Pemerintahan	1.01	Urusa Wajib Pelayanan Dasar		
Organisasi	1.01.06.02	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana		
Program	2.02.1.06.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		
Kegiatan	2.02.1.06.01.17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		
Lokasi Kegiatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana			
Jumlah Tahun n-1	Rp.			
Jumlah Tahun n	Rp.			
Jumlah Tahun n + 1	Rp.			

Indikator	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET
Masukan	Jumlah Dana	70.000.000
Keluaran	Memfasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta ketahanan keluarga	80%
Hasil	Terfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	80%
Manfaat	Terfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	80%
Dampak	Tercapainya perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga	50%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode	Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2		3	4	5	6 = (3x5)
5	BELANJA					70.000.000
5 2	BELANJA LANGSUNG					70.000.000
5 2 1	BELANJA BARANG DAN JASA					70.000.000
5 2 1 01	Honorarium PNS					9.000.000
5 2 2 01 26	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/So					9.000.000
	pir					
	Honor narasumber provinsi		2	org	1.000.000	2.000.000
	Honor narasumber provinsi Non ASN		3	keg	1.500.000	4.500.000
	Honor narasumber kabupaten		4	org	500.000	2.000.000
	Honor pembawa acara		1	org	150.000	150.000
	Honor pembaca doa		1	org	150.000	150.000
	Moderator		1	org	200.000	200.000
5 2 2 01	Belanja bahan pakai habis					1.935.000
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					1.935.000
	BBM Premium		300	liter	6.450	1.935.000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor					11.800.000
5 2 2 03 18	Belanja jasa Dekorasi					300.000
	Pembuatan Spanduk		1	buah	300.000	300.000
5 2 2 03 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur					10.000.000
	Honor Pendamping Kasus		20	kasus	500.000	10.000.000
5 2 2 03 31	Belanja jasa pengganti transportasi					1.500.000
	transportasi narasumber luar daerah		5	org	300.000	1.500.000
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir					3.700.000
5 2 2 07 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ tempat					3.700.000
	sewa penginapan Narasumber		2	hr	350.000	700.000
	Sewa gedung pertemuan		2	hr	1.500.000	3.000.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman					9.000.000
5 2 2 11 02	Belanja Makan dan Minum Rapat					900.000
	Makan minum rapat		30	bks	30.000	900.000
5 2 2 11 06	Belanja Makan dan Minum Penunjang Kegiatan					8.100.000
	Makan Minum sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak		270	bks	30.000	8.100.000
5 2 2 15	Belanja perjalanan dinas					34.565.000
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah					10.565.000
			1	th	10.565.000	
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas Luar daerah					24.000.000
			1	th	24.000.000	
Jumlah						70.000.000

Keterangan	
Tanggal Pembahasan	
Catatan Hasil Pembahasan	

Pulau Pinang, 12 Desember 2020

Bobby Perdana Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)

PROGRAM : Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASI	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
Program : Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak Kegiatan : Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)	a. Pada Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya mendapatkan KLA untuk Kategori pertama b. Jumlah puskesmas ramah anak sebanyak 6 (42,8%) c. Jumlah sekolah ramah anak 26 (12,9%) d. Jumlah Kecamatan yang memiliki forum anak (63,6%) e. Jumlah anak korban kekerasan 14 orang laki-laki (14,3%) dan perempuan (85,7%) f. ABH pelaku laki-laki 9 orang (100%)	Partisipasi Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam KLA Mandiri Belum semua anak mendapatkan manfaat kabupaten layak anak	- Kemampuan petugas dalam mengkampanyekan KLA masih terbatas	- Masih kurangnya partisipasi dunia usaha dalam mendukung KLA - Masih kurangnya forum anak di tingkat kecamatan - Tidak tersedianya ruang bermain ramah anak	Terciptanya Kabupaten Dharmasraya Layak Anak	- Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) - Pelatihan Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan - Sosialisasi Puskesmas dan sekolah ramah anak - Pembangunan ruang bermain ramah anak	a. Jumlah puskesmas ramah anak sebanyak 6 (42,8%) b. 7 (Jumlah sekolah ramah anak 26 (12,9%) c. Jumlah Kecamatan yang memiliki forum anak 63,6% d. Jumlah anak korban kekerasan 14 orang laki-laki (14,3%) dan perempuan (85,7%) e. ABH pelaku laki-laki 9 orang (100%)	Output - Terbentuk APSA Kabu Dharmasraya - Bertumbuh Forum Anak - Meningkatnya jumlah puskesmas kecamatan yang memiliki forum anak - Meningkatnya jumlah puskesmas dan sekolah ramah anak - Menurunnya jumlah korban kekerasan - Menurunnya jumlah ABH pelaku laki-laki

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
								Outcome Terciptan Kabupaten Anak kate madya

Inspektur
Kandam, S.Sos
NIP. 19670607 199203 1 004

Kepala BKD
Panyanto, S.Sos, M.T
NIP. 10690609 198902 1 001

Kepala Bappeda
Drs. Andy Sumanto, CFA
NIP. 19681220 199009 1 001

Kepala Dinas SOSPPK
Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Pulau Panjang, Maret 2020
Kepala Dinas SOSPPK
Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
KODE PROGRAM	1.06.01.15
KEGIATAN	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)
HASIL/OUTPUT	Terciptanya Kabupaten Dharmasraya Layak Anak

ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya mendapatkan KLA untuk Kategori pratama b. Jumlah puskesmas ramah anak sebanyak 6 (42,8%) c. Jumlah sekolah ramah anak 26 (12,9%) d. Jumlah Kecamatan yang memiliki forum anak (63,6%) e. Jumlah anak korban kekerasan 14 orang laki-laki (14,3%) dan perempuan (85,7%) f. ABH pelaku laki-laki 9 orang (100%) <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam KLA - Manfaat Belum semua anak mendapatkan manfaat kabupaten layak anak b. Penyebab Internal Penyebab internal terjadinya kesenjangan ini adalah masih kurangnya kemampuan petugas dalam mengkampanyekan KLA. c. Penyebab Eksternal Penyebab eksternal terjadinya kesenjangan ini adalah masih kurangnya partisipasi dunia usaha dalam mendukung KLA, masih kurangnya forum anak di tingkat kecamatan dan tidak tersedianya ruang bermain ramah anak.
-------------------------	---

RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	
		Tujuan	Terbentuknya APSAI di Kab. Daharmasraya
		Alokasi Anggaran	Rp. 20.000.000,-
	Komponen/ aktifitas 2	Pelatihan Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan	
		Tujuan	Meningkatnya pengetahuan forum anak
		Alokasi Anggaran	Rp. 40.000.000,-
	Komponen/ aktifitas 3	Sosialisasi puskesmas dan sekolah ramah anak	
		Tujuan	Terbentuknya puskesmas dan sekolah ramah anak
		Alokai Anggaran	Rp. 40.000.000,-
	Komponen/ aktifitas 4	Pembangunan ruang bermain anak	
		Tujuan	terbentuknya ruang bermain ramah anak
		Alokasi Anggaran	Rp. 150.000.000,-
	Total anggaran		Rp. 250.000.000,-

CAPAIAN PROGRAM	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya APSAI di Kabupaten Dharmasraya - Bertambahnya Forum anak di kecamatan dari 63,6% menjadi 100%) - Meningkatkan jumlah puskesmas ramah anak dari 42,8% menjadi 50% - Meningkatkan sekolah ramah anak dari 12,9% menjadi 25% - Tersedianya ruang bermain ramah anak
------------------------	---





	Out Come: Terciptanya Kabupaten Layak Anak kategori Nidya
--	--

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala Dinas SOSP3APPKB

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 1982052112000121002

Tim Verifikasi

Inspektur  Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	Kepala BKD  Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001	Kepala Bappeda  Drs. Andy Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas SOSP3APPKB  Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 1982052112000121002
---	---	--	--

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

RKA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan	1.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi	1.06.01	Dinas Sosial , Pemberdayaana Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinas SOSPAAPPKB)
Program	1.06.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
Kegiatan	1.06.01.15.06	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak
Waktu Pelaksanaan	01-01-2021 sampai dengan 31-12-2021	
Lokasi Kegiatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB	
Sumber Dana		
Jumlah Tahun n-1	Rp.	
Jumlah Tahun n	Rp.	
Jumlah Tahun n + 1	Rp.	
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhi dan terlindunginya hak- hak anak di Kabupaten Dharmasraya secara layak	
Masukan	Jumlah Dana	250.000.000
Keluaran	mensinergikan Peran Anak agar mampu berperan dalam segala Bidang Urusan Pemerintah	
Hasil	Terbentuknya Kabupaten Dharmasraya yang Layak Anak	
Kelompok Sasaran	Anak Usia dibawah 18 th	
Kegiatan	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
KODE REKENING	URAIAN	
1	2	
5	BELANJA	
5 2	BELANJA LANGSUNG	
5 2 1	BELANJA BARANG DAN JASA	
5 2 1 01	Honorarium PNS	
5 2 2 01	Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih	
	Honor Narasumber Non ASN Provinsi	3
	Honor Narasumber Kabupaten	3
	Honor Pembawa Acara	3
	Honor Pembaca Doa	3
	Honor Moderator	3
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000

5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				3.437.850
5	2	2	01	06	Belanja bahan bakar minyak/gas				3.437.850
					BBM Premium	533	liter	6.450	3.437.850
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor				10.400.000
5	2	2	03	12	Belanja transportasi dan akomodasi				10.400.000
					Transportasi Narasumber Luar Daerah	3	org	300.000	900.000
					Transportasi Pelatihan 2P Forum Anak Kabupaten	80	oh	50.000	4.000.000
					Transportasi Pelatihan 2P Forum Anak Kecamatan	220	oh	25.000	5.500.000
					Transportasi Forum Anak dalam rangka Rapat Kerja	100	oh	50.000	5.000.000
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				4.500.000
5	2	2	06	01	Belanja Cetak				4.500.000
					Pembuatan Spanduk	15	buah	300.000	4.500.000
5	2	2	07		Belanja sewa rumah /Gedung/Gudang/Parkir				11.050.000
5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				1.200.000
					Sewa Penginapan nara sumber Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (TK/RA, MI, MTs)	1	hari	400.000	400.000
					Sewa Penginapan nara sumber APSAI	1	hari	400.000	400.000
					Sewa Penginapan nara sumber Pelatihan 2P Forum Anak Kabupaten	1	hari	400.000	400.000
5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				9.850.000
					Sewa ruang pertemuan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	1	hari	2.000.000	2.000.000
					Sewa ruang pertemuan kegiatan Pembentukan APSAI	1	hari	2.000.000	2.000.000
					Sewa ruang pertemuan Pelatihan 2P Forum Anak Kabupaten Dharmasraya	1	hari	2.000.000	2.000.000
					Sewa ruang pertemuan pelatihan 2P Forum Anak Kecamatan	11	hari	350.000	3.850.000
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman				23.100.000
5	2	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				23.100.000
					Makan minum rapat GT KLA	120	pkt	30.000	3.600.000
					Makan minum sosialisasi sekolah ramah anak (TK/RA, MI, MTs)	50	pkt	30.000	1.500.000
					Makan minum rapat kerja forum anak	100	pkt	30.000	3.000.000
					Makan minum kegiatan Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	50	pkt	30.000	1.500.000
					Makan Minum Pelatihan 2P Forum Anak Kecamatan	330	pkt	30.000	9.900.000
					Makan Minum Pelatihan 2P Forum Anak Kabupaten	80	pkt	30.000	2.400.000
					Makan Minum Pembinaan Puskesmas Ramah Anak	40	pkt	30.000	1.200.000
5	2	2	15		Belanja perjalanan dinas				40.012.150
5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				15.012.150
						1	tahun	15.012.150	15.012.150
5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas Luar daerah				25.000.000

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

KPPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)

PROGRAM : Keluarga Berencana

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Mawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
<p>Program : Keluarga Berencana</p> <p>Kegiatan : Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB</p> <p>Tujuan : Meningkatkan tingkatnya ikutsertaan laki-laki ber-KB</p>	<p>a. Jumlah Pemasangan Usia Subur (PUS) 2019 sebanyak 43.849</p> <p>b. Jumlah peserta KB aktif perempuan 95,7% dan laki-laki 0,12%</p> <p>c. Jumlah peserta KB baru perempuan 92,9% dan laki-laki 7%</p> <p>d. Alat kontrasepsi peserta KB aktif yang digunakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IUD = 5,1% - MOW = 3,7% - MOP = 0,12% - Kondom = 4,19% - Implant = 21,8% - Suntik = 49,9% - Pil = 15,2% <p>e. Alat kontrasepsi peserta KB baru</p>	<p>Partisipasi Masih banyak Laki-laki yang belum mau menggunakan alat kontrasepsi</p> <p>Manfaat Masih banyak laki-laki tidak mendapatkan manfaat ber-KB</p>	<p>- Kurangnya promosi tentang manfaat kontrasepsi bagi laki-laki</p> <p>- Kemampuan PLKB dalam mengajak laki-laki untuk ikut pelayanan pemasangan kontrasepsi KB</p>	<p>- Masyarakat masih beranggapan bahwa yang lebih berhak menggunakan alat kontrasepsi adalah perempuan bukan laki-laki.</p> <p>- Masyarakat masih beranggapan bahwa jika laki-laki ber-KB cenderung untuk selingkuh</p>	<p>Meningkatnya ikutsertaan laki-laki ber-KB</p>	<p>- Advokasi dan KIE pada Lintas sektoral</p> <p>- Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat alat kontrasepsi bagi laki-laki</p> <p>- Pelatihan tentang komunikasi efektif untuk PLKB</p> <p>- Pelayanan KB pada laki-laki</p>	<p>a. Jumlah peserta KB aktif perempuan 95,7% dan laki-laki 0,12%</p> <p>b. Jumlah peserta KB baru perempuan 92,9% dan laki-laki 7%</p>	<p>Output : - Mening peserta laki-laki 0,12% - Mening peserta laki-laki 2% - Mening peserta laki-laki menjadi Outcome Menurun kelahiran Dhamasr</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Mawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
	<p>yang digunakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IUD = 4,3% - MOW = 1,9% - MOP = 0,07% - Kondom = 6,9% - Implant = 20,4% - Suntik = 48,1% - Pil = 18,1% 							

Tim Verifikasi

Inspektur
Kandam, S.Sos
NIP. 19670607 199203 1 004

Kepala BKD
Paryanto, S.Sos, M.T
NIP. 10690609 198902 1 001

Kepala Bappeda
Drs. Andy Sumanto, CFA
NIP. 19681220 199009 1 001

Kepala Dinas SOSPPKB
Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Pulau Pinjung, Maret 2020
Kepala Dinas SOSPPKB
Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)**
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Keluarga Berencana		
KODE PROGRAM	(Kode Program sesuai RKA SKPD)		
KEGIATAN	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB		
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya keikutsertaan laki-laki ber-KB		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Pasangan Usia Subur di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 sebanyak 43.849 dengan jumlah peserta KB aktif perempuan sebanyak 95,7%, laki-laki sebanyak 0,12%, untuk peserta KB baru perempuan 92,9% sedangkan laki-laki sebanyak 7%. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan sudah terjadi kesenjangan gender dalam kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, dimana peserta KB aktif maupun baru lebih banyak perempuan dibanding laki-laki.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Masih rendahnya partisipasi Laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi dibandingkan perempuan. - Manfaat Dari segi manfaat pelayanan KB, laki-laki masih kurang mendapatkan manfaat dibandingkan perempuan <p>b. Penyebab Internal Penyebab internal terjadinya kesenjangan ini adalah kurangnya promosi tentang manfaat kontrasepsi bagi laki-laki dan kemampuan yang dimiliki PLKB dalam mengajak laki-laki untuk ikut pelayanan pemasangan kontrasepsi KB masih kurang.</p> <p>c. Penyebab Eksternal Masih adanya budaya di dalam masyarakat yang dapat mengambat laki-laki untuk menggunakan alat kontrasepsi antara lain masyarakat masih beranggapan bahwa yang lebih berhak menggunakan alat kontrasepsi adalah perempuan bukan laki-laki dan jika laki-laki ber-KB cenderung untuk selingkuh.</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Advokasi dan KIE pada lintas sektoral	
		Tujuan	Meningkatnya pengetahuan dan dukungan dari lintas sektoral
		Alokasi Anggaran	Rp. 30.250.000,-
	Komponen/ aktifitas 2	Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat alat kontrasepsi bagi laki-laki	
		Tujuan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat alat kontrasepsi laki-laki
		Alokasi Anggaran	Rp. 30.250.000,-

	Komponen/ aktifitas 3	Pelatihan tentang komunikasi efektif untuk PLKB	
		Tujuan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PLKB dalam mengajak laki-laki ber-KB
		Alokai Anggaran	Rp. 30.250.000,-
	Komponen/ aktifitas 4	Pelayanan KB pada laki-laki	
		Tujuan	Meningkatnya pelayanan KB bagi laki-laki
		Alokasi Anggaran	Rp. 30.250.000,-
	Total anggaran		Rp. 121.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM	Output : - Meningkatnya peserta KB aktif laki-laki dari 0,12% menjadi 2% - Meningkatnya peserta KB baru laki-laki dari 7% menjadi 10% Out Come: Menurunnya angka kelahiran di Kab. Dharmasraya		

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala Dinas SOSP3APPKB

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	Kepala BKD Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001	Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas SOSP3APPKB Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002
---	---	---	--



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TA. 2021

Formulir
RKA-SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Organisasi : 1.01.06.02 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.08.1.01.06.16 Keluarga Berencana
Kegiatan : 1.02.08.1.01.06.02.16.27 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TA. 2021

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Pencapaian Program	: Lintas sektor terkait, calon akseptor KB	
Masukan	: Dana yang tersedia	Rp 121.000.000
Keluaran	: Terlaksananya Advokasi KIE pada lintas sektoral dan pelayanan KB di Kab. Dharmasraya	3 Kegiatan (KKG PKK, IBI, TMKK)
Hasil	: Tercapainya PPM peserta KB baru dan terbinanya peserta KB aktif	6500 PA
Manfaat	: Menurunnya angka kelahiran	5%
Dampak	: Terkendalinya pertumbuhan penduduk di daerah	5%

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5 2	BELANJA LANGSUNG				Rp 121.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				Rp 97.200.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				Rp 5.047.000
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				Rp 5.047.000
	BBM	980	liter	5.150	Rp 5.047.000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				Rp 1.875.000
5 2 2 03 17	Belanja Dekorasi				Rp 625.000
	Dokumentasi	5	rol	125.000	Rp 625.000
5 2 2 03 18	Belanja Dekorasi				Rp 1.250.000
	Spanduk	5	ls	250.000	Rp 1.250.000
5 2 2 03 13	Biaya jasa Pengganti Transportasi				Rp 22.000.000
	Transportasi operasional penyuluhan Program Bangga Kencana	220	OH	50.000,00	Rp 11.000.000
	Transportasi bimbingan terpadu (Bindu)	220	oh	50.000,00	Rp 11.000.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				Rp 3.000.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				Rp 3.000.000
	Foto copy	10.000	lbr	300	Rp 3.000.000
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				Rp 2.893.000
5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda				Rp 2.000.000
	Sewa tenda + kursi pencahangan KB-KES IBI Tk. Kab. Dharmasraya	1	kl	2.000.000	Rp 2.000.000
5 2 2 10 07	Belanja sewa sound system				Rp 893.000
	Sewa sound system	1	kl	893.000	Rp 893.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				Rp 38.125.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp 7.000.000
	Mami rapat persiapan pencahangan Bhakti IBI-KB-KES Tk. Kab. Dharmasraya	30	org	25.000	Rp 750.000
	Mami rapat persiapan pencahangan TNI-KB-KES Tk. Kab. Dharmasraya	30	org	25.000	Rp 750.000
	Konsumsi bimbingan terpadu (BINDU)	220	bks	25.000	Rp 5.500.000
5 2 2 11 05	Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan				Rp 31.125.000
	Makan dan minum pelaksanaan pelayanan (3 keg x 10 kec x 30 org)	900	org	25.000	Rp 22.500.000
	Makan dan Minum pencahangan (TNI-KB-KES)	50	org	25.000	Rp 1.250.000
	Makan dan Minum pencahangan Bhakti Sosial IBI KB-KES Tk. Kab. Dharmasraya	75	org	25.000	Rp 1.875.000
	Konsumsi operasional penyuluhan Program Bangga Kencana	220	bks	25.000	Rp 5.500.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				Rp 24.260.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah				Rp 13.550.000
	Ess. II	4	oh	300.000	Rp 1.200.000
	Ess. III	18	oh	225.000	Rp 4.050.000
	Ess. IV	17	oh	200.000	Rp 3.400.000
	Gol III	12	oh	175.000	Rp 2.100.000
	Gol. II	12	oh	150.000	Rp 1.800.000
	Sopir	10	oh	100.000	Rp 1.000.000

5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp	10.710.000
					Luar Daerah dalam Provinsi					Rp	10.710.000
					Uang Harian					Rp	10.710.000
					Ess. II	2	oh	425.000,00		Rp	850.000
					Ess. III	4	oh	375.000,00		Rp	1.500.000
					Ess. IV	10	oh	350.000,00		Rp	3.500.000
					Gol III	10	oh	300.000,00		Rp	3.000.000
					Gol. II	6	oh	250.000,00		Rp	1.500.000
					Sopir	2	oh	180.000,00		Rp	360.000
5	2	2	25		HONORARIUM / UPAH					Rp	23.800.000
5	2	2	25	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					Rp	23.800.000
					K3 Pelayanan (3 x 10 kec)	30	kali	50.000		Rp	1.500.000
					K3 Pencanangan (IBI, TMKK)	1	paket	300.000		Rp	300.000
					Honorarium narasumber bimbingan terpadu (BINDU)	44	ok	250.000,00		Rp	11.000.000
					Honorarium narasumber operasional penyuluhan Program Bangga Kencana	44	ok	250.000,00		Rp	11.000.000

<div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> Pulau Punjung, Maret 2020 KEPALA Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 198205212000121001 </div>				
Keterangan				
Tanggal Pembahasan				
Cattan Hasil Pembahasan				
1.				
2.				
3.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
3				
4				

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DISKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)

PROGRAM : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Mawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	a. SAD hidup secara nomaden dengan mata pencaharian berburu dan mencari tumbuh-tumbuhan b. Hidup sebagai suku minoritas dan miskin yang memerlukan bimbingan dan bantuan c. Terdapat di Kecamatan IX Koto dan Koto Besar berjumlah 19 KK (77 jiwa) terdiri dari 43 laki-laki dan 34 perempuan d. Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki Tim Rencana Aksi Daerah dalam melakukan pembinaan SAD	<u>Partisipasi</u> SAD masih sulit bergabung dengan masyarakat <u>Kontrol</u> Semua keputusan ada pada ketua rombongan	- Kemampuan SDM dalam melakukan pembinaan - Sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan	Hidup secara nomaden menyebabkan SAD sulit mendapatkan kehidupan yang layak	Terbentuknya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) SAD	- Rapat Tim Rencana Aksi Daerah - Desiminasi Informasi SAD Kabupaten Dharmasraya ke SAD Muaro Bungo - Bantuan UEP untuk SAD	a. Hidup sebagai suku minoritas dan miskin yang memerlukan bimbingan dan bantuan b. Terdapat di Kecamatan IX Koto dan Koto Besar berjumlah 19 KK (77 jiwa) terdiri dari 43 laki-laki dan 34 perempuan	Output : - Terbentuknya Usaha Produktif SAD - Meningkatnya pendapatan

Tujuan :

Terbentuknya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) SAD

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator

Inspektur
Kandam, S.Sos
NIP. 19670607 199203 1 004

Kepala BKD
Paryanto, S.Sos, M.T.
NIP. 10690609 198902 1 001

Kepala Bappeda
Drs. Andy Sumanto, CFrA
NIP. 19681220 199009 1 001

Kepala Dinas SOSP3APPKE
Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Pulau Purnjung, Maret 2020
Kepala Dinas SOSP3APPKE

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)				
SKPD TAHUN ANGGARAN		: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB) : 2021		
PROGRAM		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		
KODE PROGRAM				
KEGIATAN		Pembinaan Suku Anak Dalam (SAD)		
HASIL/OUTPUT		Terbentuknya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) SAD		
ANALISIS SITUASI		<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Suku anak dalam biasa disebut dengan suku kubu atau anak rimba terdapat di Kecamatan XI Koto dan Koto Besar berjumlah 19 KK (77 jiwa) yang terdiri dari 43 laki-laki dan 34 perempuan. Mereka hidup secara nomaden dengan mata pencaharian berburu dan mencari tumbuh-tumbuhan dan sebagai suku minoritas yang miskin menyebabkan mereka memerlukan bimbingan dan bantuan, namun demikian di Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki Tim Rencana Aksi Daerah untuk melakukan pembinaan kepada SAD.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi SAD masih sulit bergabung dengan masyarakat - Kontrol Semua keputusan ada pada ketua rombongan - Manfaat SAD belum mendapatkan manfaat dari pembinaan petugas <p>b. Penyebab Internal Penyebab internal terjadinya kesenjangan ini karena masih kurangnya kemampuan SDM dalam melakukan pembinaan dan sarana serta prasaran yang dimiliki masih sangat kurang sehingga sulit menjangkau lokasi SAD.</p> <p>c. Penyebab Eksternal Hidup secara nomaden menyebabkan SAD sulit mendapatkan kehidupan yang layak</p>		
RENCANA AKSI		Komponen/ Aktifitas 1	Rapat Tim Rencana Aksi Daerah	
			Tujuan	Terbentuknya kesepakatan
			Alokasi Anggaran	Rp. 1.560.000,-
		Komponen/ aktifitas 2	Desiminasi Informasi SAD Kabupaten Dharmasraya ke SAD Muaro Bungo	
			Tujuan	Meningkatnya pengetahuan SAD Kabupaten Dharmasraya dalam pengelolaan UEP
			Alokasi Anggaran	Rp. 22.444.550,-
		Komponen/ aktifitas 3	Bantuan UEP untuk SAD	
			Tujuan	Terbentuknya 2 kelompok UEP SAD di Kabupaten Dharmasraya
			Alokai Anggaran	Rp. 26.000.000,-
Total anggaran		Rp. 50.004.550,-		
CAPAIAN PROGRAM		Output : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengetahuan SAD - Terbentuknya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) SAD sebanyak 2 kelompok 		

Out Come:
Meningkatnya pendapatan SAD


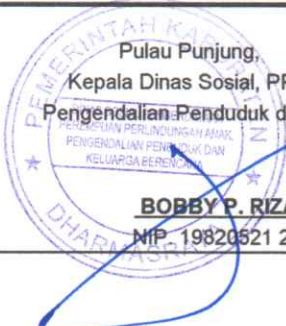
Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala Dinas SOSP3APPKB

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	Kepala BKD Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001	Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas SOSP3APPKB Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002
--	--	---	---

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021		Formulir RKA-OPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	1.06.1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Organisasi	1.06.1.06.01 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB				
Program	1.06.1.06.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				
Kegiatan	1.06.1.06.01.15.01 Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pemdamping sosial				
Lokasi Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya				
Jumlah Tahun n-1	Rp. 0				
Jumlah Tahun n	50.004.550				
Jumlah Tahun n+1	Rp. 0				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Pencapaian Program	Jumlah SAD yang diberi UEP		100%		
Masukan	Jumlah dana		50.004.550		
Keluaran	Terlatihnya SAD dalam mengelola UEP		12 bulan		
Hasil	Terbentuknya UEP SAD		2 kelompok		
Kel. Sasaran Keg.	SAD (Suku Anak Dalam)				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH				50.004.550
5 2	BELANJA LANGSUNG				50.004.550
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				50.004.550
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.444.550
5 2 2 01 06	Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas				2.444.550
	- BBM	379	Ltr	6.450	2.444.550
5 2 2 03 31	Belanja jasa pengganti transportasi				3.000.000
	- Bantuan transportasi peserta pertemuan	60	OT	50.000	3.000.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				1.560.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.560.000
	- Makan	60	bks	18.000	1.080.000
	- Minum	60	bks	8.000	480.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				17.000.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	pkt	2.000.000	2.000.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	pkt	15.000.000	15.000.000
	Bantuan yang diberikan				26.000.000
	Bantuan UEP untuk SAD	2	paket	13.000.000	26.000.000
Jumlah					50.004.550
Rencana Penarikan dana Per Triwulan					
<div style="text-align: right;"> Pulau Punjung, Maret 2020 Kepala Dinas Sosial, PP, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  BOBBY P. RIZA, S.STP. M.Si. NIP. 19820521 200012 1 002 </div>					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan:	:				
1.					
2.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM : Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah aparaturnya atau pengelola pelayanan perizinan	Akses: Masih Kurangnya fasilitas pelayanan perizinan yang responsif gender baik yang untuk pemohon yang umum maupun yang penyandang Disabilitas	- kurangnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan - Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait maupun dengan pengelola pelayanan perizinan di tingkat provinsi	- Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan perizinan	Meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparaturnya dan kemampuan aparaturnya atau pengelola pelayanan perizinan dengan cara mengalkasikan dana untuk mengikuti pelatihan dan bintek baik yang diadakan oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).	Tercapainya Target izin yang telah di rencanakan	Input : Melakukan sharing atau study banding ke daerah yang sudah mendapat predikat terbaik dalam hal pelayanan perizinan agar dapat menyerap ilmunya untuk diterapkan di Kab. Dharmasraya. Output : Meningkatnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan
Kegiatan : Penyediaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Tersedianya fasilitas pelayanan perizinan yang responsive gender baik yang umum maupun yang penyandang Disabilitas	Partisipasi: Kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha.						
Tujuan : Penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan terpadu		Manfaat : meningkatnya pengetahuan tentang perizinan bagi masyarakat atau pelaku usaha.						

Sikabau, Maret 2020
Kepala Dinas PMPTSP
Naldi, S.STP, M.Si.
Perubira Tk. I (V/b)
NIP. 19820411 200012 1 002

Tim Verifikasi

 Inspektur KANDAM, S.Sos NIP. 19670607 199103 1 004	 Kepala BKD Paryanto, S.Sos, MT NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Bappeda Drs. Anny Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala Dinas Sosial PSA PPKB BOBYP, RIZA, S.STP, M.Si NIP. 19820921 200012 1 002
--	---	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		
KODE PROGRAM			
KEGIATAN	Penyederhanaan Prosedur Perizinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal		
HASIL/OUTPUT	Penerbitan Dokumen Perizinan Dan Nonperizinan Terpadu		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jumlah aparatur atau pengelola pelayanan perizinan</p> <p>Tersedianya fasilitas pelayanan perizinan yang memadai yang responsive gender baik yang untuk pemohon yang umum maupun yang penyandang Disabilitas</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih Kurangnya fasilitas pelayanan perizinan yang responsif gender baik yang untuk pemohon yang umum maupun yang penyandang Disabilitas <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> kurangnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait maupun dengan pengelola pelayanan perizinan di tingkat propinsi <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal 		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur atau pengelola pelayanan perizinan dengan cara mengalokasikan dana untuk mengikuti pelatihan dan bimtek baik yang diadakan oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).	
		Tujuan	Tercapainya Target izin yang telah di rencanakan
	Indikator Output	Meningkatnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan	

Sikabau, Maret 2020

PIK-KEPALA DINAS PMPTSP







NALDI. S.STP.,M.Si.

RebinaTk.I (IV/b)

NIP 19820411 200012 1 002

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p>KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>Paryanto, S.Sos,M.T NIP 19609009 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial PPKB</p>  <p>BOBBY RIZA, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002</p>
--	---	--	--

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM : Kualitas dan Peningkatan Produktivitas

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Kualitas dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja</p> <p>Tujuan : Menyediakan Tenaga Kerja yg Kompeten, Produktif dan berdaya saing tinggi</p>	<p>Jml Angkatan Kerja laki2 70.324 pr. 36.689 Yg bekerja laki2 64,28% pr. 32,03% Pengangguran lk 1,44 pr. 2,26</p>	<p>Akses: * kualo pelatihan * Anggaran blm memadai Partisipasi: - Jumlah Pengangguran yang dibina laki2 1,44% dan Perempuan 2,26%</p>	<p>*Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas untuk menampung dan meningkatkan keberdayaan peserta pelatihan *masih belum adanya kerjasama dengan pihak swasta yang mau menerima /mempekerjakan peserta pelatihan *tidak adanya tindak lanjut setelah kegiatan tersebut dilakukan</p>	<p>*Rendahnya motivasi peserta pertempuran *Tidak adanya penampungan bagi peserta untuk mendapatkan pekerjaan</p>	<p>Meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja dan mengurangi kemiskinan ekonomi</p>	<p>*Dengan Instansi melakukan perekutan peserta pelatihan *Melakukan identifikasi peserta pelatihan berdasarkan jenis kelamin, usia *Meningkatkan sarana dan prasarana sehingga kegiatan yang dilakukan dapat maksimal *memberikan motivasi dan pengertian kepada peserta</p>	<p>- peserta yang akan mengikuti pelatihan berjumlah 800 orang dari keseluruhan dengan satu paket kegiatan 16 orang</p>	<p>Out put *Jumlah angkatan kerja yang mengikuti pelatihan Outcome *meningkatkan kompetensi peserta pelatihan *Jumlah tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera</p>

Pulau Pinjung,
Pjt, Kepala Dinas
Maret 2020

DINAS TRANSMIGRASI
DAN TEMGAKERIA
MARTEN YUNUS, S.Kom., M.Eng
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19740821 200212 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN

 Inspektur KANDAM, S.Sos NIP. 196706071991031004	 KEPALA BKD PABRYANTO, S.Sos, M.T. NIP. 196906094989021001	 Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, CTA NIP. 196812201990091001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB BOBBY P RIZKA, STP, M.Si NIP. 1982052120000721002
--	--	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga kerja								
KEGIATAN	Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja								
KODE KEGIATAN	14.15								
ANALISA SITUASI	<div>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</div> <div>Jika dilihat dari angkatan kerja dengan jumlah 107.013 yang bekerja laki-lak 64,28% dan Perempuan 32,03% sedangkan yang pengangguran laki laki 1,44% perempuan 2,26%, Maka dengan adanya kegiatan pelatihan bagi pencari kerja bahwasanya kaum perempuan juga memiliki peran yang baik dan bahkan juga bisa berwirausaha agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terbentuk 800 orang dari jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 16 orang per kegiatan.</div> <div>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</div> <div>a. Faktor Kesenjangan</div> <div>Akses:</div> <div><div>- Kuota pelatihan</div><div>- Anggaran belum memadai</div></div> <div>Partisipasi:</div> <div>Jumlah Pengangguran yang dibina laki laki 1,44% dan perempuan 2,26%</div> <div>Control:</div> <div>Jumlah Pengangguran yang ada di Dharmasraya</div> <div>Manfaat :</div> <div>Anggapan bahwa pelatihan ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki</div> <div>b. Penyebab Internal</div> <div>Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas untuk menampung dan meningkatkan keberdayaan peserta pelatihan.</div> <div>c. Penyebab Eksternal</div> <div>Rendahnya motivasi peserta perempuan dan tidak adanya penampungan bagi peserta untuk mendapatkan pekerjaan.</div>								
CAPAIAN PROGRAM	<div>1. Tolak Ukur</div> <div>Jumlah Dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-</div> <div>2. Indikator dan Target Kinerja</div> <div>Input :</div> <div><div>- Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,-</div></div> <div>Output:</div> <div><div>- Hasilnya terciptanya tenaga kerja yang berkomptensi yang mengikuti pelatihan</div></div> <div>Outcome :</div> <div><div>- Angkatan kerja mempunyai kemampuan dengan keahlian keterampilan, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahterah lagi.</div></div>								
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 5,000,000,000,- (Lima Milyar Rupiah)								
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	<div>Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp.5,000,000,000,- untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja</div> <table><tr><td>Masukan</td><td>Rp. 5,000,000,000,-</td></tr><tr><td>Keluaran</td><td>Kegiatan pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja</td></tr><tr><td>Hasil</td><td>Terciptanya angkatan kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat</td></tr></table>		Masukan	Rp. 5,000,000,000,-	Keluaran	Kegiatan pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja	Hasil	Terciptanya angkatan kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat
Masukan	Rp. 5,000,000,000,-								
Keluaran	Kegiatan pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja								
Hasil	Terciptanya angkatan kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat								

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Dharmasraya

MARTEN YUNUS, S.Hom.,M.Eng

Pembina TK I, IV/b

NIP.19740821 200212 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN

<p>Inspektur</p>  <p>KANDAM, S.Sos NIP.196706071991031004</p>	<p>KEPALA BKD</p>  <p>PARYANTO, S.Sos, M.I NIP.196906091989021001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 196812201990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A PPKB</p>  <p>BOBBY R RIZA, S.STP, M.Si NIP.198205212000121802</p>
---	---	--	---

: Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pulau Punjung, 26 Maret 2020

Kepala,

(Drs. Irsyad, MM)

Pembina utamamuda / IV.c

NIP. 19630810 199003 1 003

Pulau Punjung, 26 Maret 2020

Kepala,

(Drs. Irsyad, MM)

Pembina utamamuda / IV.c

NIP. 19630810 199003 1 003

Tim Verifikasi

Inspektor

Kepala BKD

Kepala Bappeda

Kepala Dinas Sosial P3A PPKE

Kandam, S. Sos

Paryanto, S.Sos, MT

Drs. Andy Sumanto, CfrA

Bobby P Riza S.STP.Msi

Nip.196706071991031004

Nip.196906091989021001

Nip.196812201990091001

Nip. 198205212000121002

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		
KODE PROGRAM	2.18.2.17.01.21		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)		
	➤ Jumlah layanan perpustakaan keliling, sekolah,nagari ,TBM,Mesjid		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender		
	a. Faktor Kesenjangan		
	➤ Kurang tersedianya sarana dan prasarana layanan ➤ Kurangnya orang berkunjung ke perpustakaan		
	b. Penyebab Internal		
	➤ Ruang baca perpustakaan yang belum memadai.		
	➤ Masih kurangnya Judul/koleksi buku pada Perpustakaan		
	c. Penyebab Eksternal		
	➤ Kemajuan Teknologi		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur: Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca		
	2. Indikator dan Target Kinerja : Jumlah pemustaka sekolah, nagari / 18.000 orang		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 239.482.000 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Melakukan perpustakaan keliling	
		Masukan	Rp. 102.015.000,-
		Keluaran	Jumlah pemustaka sekolah, nagari
		Hasil	Peningkatan Partisipasi Minat dan Budaya Baca
	Kegiatan 1	Lomba Bercerita Tingkat SD / MI	
		Masukan	Rp. 52.288.900,-
		Keluaran	Bertambahnya jumlah minat dan budaya baca
		Hasil	Meningkatnya pengunjung perpustakaan

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala,

(Drs. Hsyad, MM)
DPRM Muda / IV.c
NIP. 19630810 199003 1 003

Inspektur	Kepala BKD	Tim Verifikasi	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial P3A
Kamdani, S.Sos Nip.196706071991031004	Paryanto, S.Sos, MT Nip.196306091989021001		Drs. Andri Sumanto, CfrA Nip.196812201990091001	Bobby P Riza S.STP, Msi Nip.198205212000121002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

:Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

:Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kegiatan/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
1. Analisis Kearsipan	- Jumlah pengelola arsip Perangkat Daerah yang mengikuti bimtek Lebih banyak Perempuan dari pada Laki laki, karena Perempuan lebih menguasai tentang Pengelolaan Kearsipan	Akses: - Belum tersedianya SDM yang handal Partisipasi: - Adanya pembatasan jenis kelamin laki-laki dan perempuan Control: - Data pengelola arsip yang mengikuti bimtek kearsipan Manfaat : - Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan baik	- Keterbatasan anggaran	- Kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip	Terbinanya pengelola arsip laki-laki dan perempuan yang handal, komprehensif dan terpadu	- Melaksanakan bimtek kearsipan bagi pengelola arsip nagari	Bimtek kearsipan yang akan dilaksanakan diikuti oleh pengelola arsip laki-laki dan perempuan sebanyak 52 orang	-Output Jumlah SDM, pengelola arsip Nagari yang memperoleh bimtek kearsipan -Outcome Arsip nagari dikelola dengan baik

Pulau Punjung, 26 Maret 2020

Kepala,

(Drs. Irsyad, MM)

Pembina utamamuda / IV.c

NIP. 19630810 199003 1 003

Inspektur
Kamdani, S.Sos
Nip. 196706071991031004

Tim Verifikasi
Kepala BKD
Paryanto, S.Sos, MM
Nip. 196906091980021001

Kepala Bappreda
Drs. Andy Sumanto, CfrA
Nip. 196812201990091001

Kepala Dinas Sosial P3A-PPKB
Bobby P Riza S.STP, Msi
Nip. 198205212000121002

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		
KODE PROGRAM	2.18.2.17.01.15		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)		
	➤ Jumlah pengelolala arsip Perangkat Daerah yang mengikuti bimtek Laki laki dan perempuan		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender		
	a. Faktor Kesenjangan		
	➤ Belum tersedianya SDM yang handal		
	b. Penyebab internal		
	➤ Keterbatasan anggaran		
	c. Penyebab Eksternal		
	➤ Kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur: Pengelola arsip Perangkat Daerah yang memahami aturan kearsipan		
	2. Indikator dan Target Kinerja :Jumlah SDM Pengelola Arsip Perangkat Daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan kearsipan/ 52 orang		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp.160.836.000 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1		Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Kearsipan dan Pelaporan Kearsipan
		Masukan	Rp. 100.000.000
		Keluaran	Jumlah SDM Pengelola Arsip Perangkat Daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan kearsipan
		Hasil	Meningkatnya SDM pengelola kearsipan
	Kegiatan 2		Melakukan Monitoring Evaluasi
		Masukan	Rp. 50.000.000,-
		Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Arsip secara Baku.
		Hasil	Arsip tertata sesuai dengan aturan yang berlaku

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala,

(Drs. Irsyad, MM)

Pembina Utama muda / IV.c

M. 19830810 199003 1 003

Tim Verifikasi			
Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial P3A
Kamdani, S.Sos Nip.196706071991031004	Pawanto, S.Sos MT Nip.196906091989021001	Drs. Andy Sumanto, CfrA Nip.196812201990091001	Bobby P Riza S.STP, Msi Nip. 198309212000121002

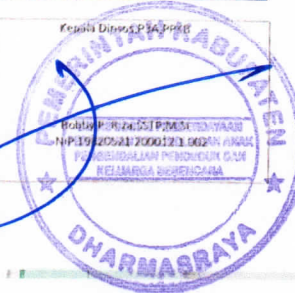
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Inspektorat Kab. Dharmasraya

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
Kegiatan: Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa & Aparatur	* Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 perempuan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Tujuan : Agar diklat dapat diikuti oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan		* akses : Diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui * Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga yang bisa melakukan secara profesional adalah	* Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga * Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan	* Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relatif lama	Pelaksanaan diklat d disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan keikutsertaan laki- laki dan perempuan dengan mempertimbangkan lamanya diklat serta lokasi pelaksanaan diklat	Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut	Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 perempuan	Output: Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi. Outcome: Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesuai program/ kegiatan yang ada

sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Kegiatan: Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/pemeriksaan rutin	Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 perempuan	Penyusunan anggota tim pemeriksaan dilakukan secara acak dan lokasi objek pemeriksaan yang cenderung jauh sehingga terdapat kemungkinan wanita hamil/menyusui dengan APIP yang sudah tua /yering sakit dalam satu tim dan mendapatkan lokasi obrik yang jauh sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan fisik	Penyusunan anggota tim secara acak (belum responsif gender)	Lokasi objek pemeriksaan yang cenderung jauh dan membutuhkan pemeriksaan fisik	Penyusunan tim pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan	Penyusunan anggota tim pemeriksaan telah memperhatikan pemerataan APIP sesuai kebutuhan untuk pemeriksaan dan memperhatikan lokasi objek pemeriksaan	Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 perempuan	Output: Tersusunnya tim pemeriksaan sesuai kebutuhan objek pemeriksaan. Outcome: Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesuai program/ kegiatan yang ada
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pulau Punjung, Maret 2020
Inspektur

Kandam, S.Sos
NIP.19670607 199103 1 004



FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)							
SKPD TAHUN ANGGARAN	: Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya : 2021						
PROGRAM	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHI						
KODE PROGRAM	3.07.3.07.01.05.01						
KEGIATAN	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/ pemeriksaan rutin						
HASIL/OUTPUT	Tersusunnya tim pemeriksaan sesuai kebutuhan objek pemeriksaan						
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah APIP pada Inspektorat Kab. Dharmasraya sebanyak 28 orang, yang terdiri dari 15 orang laki laki dan 13 orang perempuan. <p>2. <u>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan anggota tim pemeriksaan dilakukan secara acak dan lokasi objek pemeriksaan yang cenderung jauh sehingga terdapat kemungkinan wanita hamil/menyusui dengan APIP yang sudah tua /sering sakit dalam satu tim dan mendapatkan lokasi obriki yang jauh sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan fisik Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan rutin/berkala maupun cek fisik Lokasi objek pemeriksaan yang cenderung jauh dan membutuhkan pemeriksaan fisik 						
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td>Komponen/ Aktifitas 1</td> <td>Penyusunan tim pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Tersusunnya tim pemeriksaan sesuai kebutuhan objek pemeriksaan</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp. 1.500.000.000,-</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	Penyusunan tim pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan	Tujuan	Tersusunnya tim pemeriksaan sesuai kebutuhan objek pemeriksaan	Alokasi Anggaran	Rp. 1.500.000.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	Penyusunan tim pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan						
Tujuan	Tersusunnya tim pemeriksaan sesuai kebutuhan objek pemeriksaan						
Alokasi Anggaran	Rp. 1.500.000.000,-						
CAPAIAN PROGRAM	Terlaksananya pengawasan internal sesuai PKPT						

Kep

Bob
NIP.1

Pulau Punjung, Maret 2020
Inspektur

Kandam, S.Sos
NIP.19670607 199103 1 004

TIM VERIFIKASI

 Kepala BPD Kandam, S.Sos NIP.19670607 199103 1 004	 Kepala BPD Purwanto, S.Sos, MT NIP.19690609 198002 1 001	 Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, CFA NIP.19681220 199009 1 001	 Kepala Dinsos, PIA, PTSD Bobby T. Kiki, SSTP, M.Si NIP.19800511 200012 1 001
--	--	---	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Inspektorat Kab. Dharmasraya

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan: Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa & Aparatur Tujuan : Agar diklat dapat diikuti oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan	Data Pembuka Wawasan * Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 perempuan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan *akses : Diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui * Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga yang bisa melakukan secara profesional adalah	Sebab Kesenjangan Internal * Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga * Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan	Sebab Kesenjangan Eksternal * Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relatif lama	Reformulasi Tujuan Pelaksanaan diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan lamanya diklat serta lokasi pelaksanaan diklat	Rencana Aksi Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut	Data Dasar (Baseline) Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 perempuan	Indikator Gender Output: Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi. Outcome: Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesuai program/ kegiatan yang ada

	<p>APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil yang umumnya tidak dimiliki oleh APIP perempuan, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/ program/ kegiatan</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Pulau Punjung, Maret 2020
Inspektur

Kandam, S.Sos
NIP.19670607 199103 1 004

TIM VERIFIKASI

Inspektur

Kandam, S.Sos
NIP.19670607 199103 1 004

Kepala BKD

Paryanto, S.Sos, MT
NIP.19690609 198902 1 001

Kepala Bappeda

Drs. Andy Sumanto, CfrA
NIP.19681220 199009 1 001

Kepala Dinsos, PSA, PPKB

Bobby P. Riza, SSP, M. Si
NIP.19820521 200012 1 002

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD TAHUN ANGGARAN	: Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya : 2021	
PROGRAM	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
KODE PROGRAM	3.07.3.07.01.05.01	
KEGIATAN	Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa & Aparatur	
HASIL/OUTPUT	Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi	
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah APIP pada Inspektorat Kab. Dharmasraya sebanyak 28 orang, yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Terdapat perbedaan latar belakang pendidikan dan kemampuan APIP, sedangkan APIP dituntut untuk mampu melakukan pengawasan pada semua bidang, program/kegiatan <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> Diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga yang bisa melakukan secara profesional adalah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil yang umumnya tidak dimiliki oleh APIP perempuan, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/ program/ kegiatan Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relatif lama 	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat

		serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut	
		Tujuan	Agar diklat dapat diikuti oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan
		Alokasi Anggaran	Rp. 550.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM	Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi		

Pulau Punjung, Maret 2020
Inspektur

Kandam, S.Sos

NIP.19670607 199103 1 004

TIM VERIFIKASI

Inspektur

Kandam, S.Sos

NIP.19670607 199103 1 004

Kepala BKD

Paryanto, S.Sos, MT

NIP.19690609 198902 1 001

Kepala Bappeda

Drs. Andy Sumanto, CfrA

NIP.19681220 199009 1 001

Kepala Dinsos, P3A, PKB

Bobby P. Riza, SSTP, M.Si

NIP.19820521 200012 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Penerangan Agama Islam	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Kegiatan yang akan dianalisis.	-Jumlah Penyuluh Agama Islam 71	Kemajuan Informasi dan Teknologi	Masih rendahnya Kemampuan Penyuluh Agama	Fokus pada sebab eksternal lembaga dan pada proses implementasi di masyarakat	- Tersedianya Penyuluh Agama Islam yang profesional	Menetapkan rencana aksi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bagi Penyuluh Agama Islam	Jumlah Penyuluh Agama Islam	Ukuran untuk memperlihatkan:
Pembinaan Penyuluh Agama Islam	Laki Laki 40 Orang Perempuan 31 Orang	Tingkat Kemampuan Penyuluh Agama Dalam Memanfaatkan Kemajuan Informasi dan Teknologi	menmanfaatkan IT di sebabkan keterbatasan SDM Penyuluh Agama Islam Kurangnya pembinaan bagi Penyuluh itu sendiri		- Terukurnya kinerja Penyuluh Agama Islam		Kwalifikasi Bakat dan Minat	Meningkatnya SDM Penyuluh Agama Islam
Identifikasi tujuannya Peningkatan SDM Penyuluh Agama Islam								

Pulau Punjung, Maret 2020
 An. Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Dharmasraya
 Kasi Bimas Islam


 ZULHENDRI

Tim Verifikasi

 <p>INSPEKTUR KANDAM, S.SOS NIP.196706071991031004</p>	 <p>KEPALA BKD PARYANTO, S.SoS, MT NIP.196906091989021001</p>	 <p>KEPALA BAPPEDA Drs. ANDY SUMANTO, Cfr.A NIP.196812201990091001</p>	 <p>KEPALA DINAS SOSIAL, P3A,PPKB BOBBY F. RIZA, S.STP,M.S.i NIP. 198205212000121002</p>
---	---	---	---



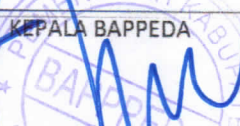
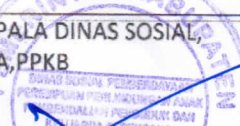
FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD		: Kementerian Agama Kab Dharmasraya	
TAHUN ANGGARAN		: 2020	
PROGRAM	Penerangan Agama Islam		
KODE PROGRAM	025.03.6639502123.004.b		
KEGIATAN	Pembinaan Penyuluh Agama Islam		
HASIL/OUTPUT	Tersedianya Penyuluh Agama Islam yang profesional		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Jumlah Penyuluh Agama Islam 71 Orang Laki Laki + 41 Orang Perempuan 31 Orang</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Tingkat Kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam berdakwah Melalui media Sosial.</p> <p>b. Rendahnya kesadaran Penyuluh Agama mengikuti perkembangan Metode Dakwah</p> <p>c. Keterbatasan anggaran dalam Pembinaan Penyuluh Agama Islam</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Peningkatan Penyuluh Agama Islam	
	Alokasi Anggaran	Dipa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 pada Seksi Bimas Islam	
	Komponen/ aktifitas 2	Meningkatkan Kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam memanfaatkan IT	
	Tujuan	Penyuluh Agama dapat berdakwah melalui Media Sosial	
	Alokasi Anggaran		
	Total anggaran	36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Tersedinya Penyuluh Agama Islam yang Profesional		

Pulau Punjung, Maret 2020
 An. Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Dharmasraya
 Kasi Bimas Islam

Zulhendri

Tim Verifikasi

INSPEKTUR  KANDAM, S.SOS NIP.196706071991031004	KEPALA BKD  PARYANTO, S.Sos, MT NIP.196906091989021001	KEPALA BAPPEDA  Drs. ANDY SUMANTO, Cfr.A NIP.196812201990091001	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB  BOBBY P. RIZA, S.STP, M.S. NIP.198205212000121002
---	--	--	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kecamatan : Asam Jujuhan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2017 : 110 org Tahun 2018 : 115 org Tahun 2019 : 105 org Tahun 2020 : 82 org Tahun 2018, dari 115 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 84 orang peserta laki-laki dan 31 Orang peserta perempuan Tahun 2019, dari 105 Orang ada, diikuti oleh	<u>Akses :</u> <u>Terbatasnya akses peserta musrenbang perempuan karena geografis Khusus bagi nagari Lubuk besar dan nagari Tanjung Alam</u> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang <u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat mengetahui	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - Masih rendahnya	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang	Terumuskannya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara internal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 75 % dan perempuan 25% meningkatnya wawasan Peserta Laki-laki 75% menjadi 90% dan perempuan meningkat dari 1 % menjadi 4%	Output : Meningkatnya Peran usulan laki – laki dari 11 % menjadi 60 % Perempuan dari 11% menjadi 30 % Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD yang Responsif Gender

<p>sebanyak 82 orang peserta laki-laki dan 23 Orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2020, dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 55 orang peserta laki-laki dan 25 Orang peserta perempuan</p> <p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 jumlah yang dundang 130. lak –lak i yang hadir sebanyak 55 Orang.. dan yang menyampaiakn 15 usulan(11 %)</i></p> <p><i>peserta perempuan yang di nundang 75. orang dan nyang hadir 25. Orang serta yang menyampaiakn usulan sebanyak 4 Usulan (1%)</i></p>	<p>manfaat dari kegiatan Musrenbang terutama perempuan</p> <p>Kontrol Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p>	<p>Sdm pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p> <p>- Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan belum paham betul tentang peengasutan an geender</p>	<p>Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p> <p>Kondisi jalan yang belum memadai terutama bagi peserta perempuan nagari Lubuk Besar dan Nagari Tanjung Alam</p>	<p><i>Hasil musrenbang difokuskan untuk peningkatan kelas jalan Nagari Lubuk Besar dan nagari Tanjung Alam</i></p> <p><i>Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musenbang</i></p> <p><i>Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat</i></p>	<p>Msrenbang Tahun 2020, dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 55 orang peserta laki-laki dan 25 Orang peserta perempuan</p> <p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 jumlah yang dundang 130. lak –lak i yang hadir sebanyak 55 Orang.. dan yang menyampaiakn 15 usulan(11 %)</i></p> <p><i>peserta perempuan yang di nundang 75. orang dan nyang hadir 25. Orang serta yang menyampaiakn usulan sebanyak 4 Usulan (1%)</i></p>	
---	--	---	---	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sungai Lmau, Maret 2020



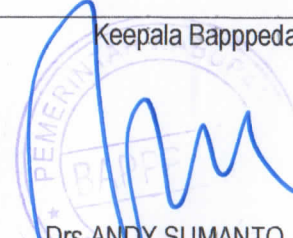

CAMAT ASAM JUJAHAN



IMAM MAHFURI, SE

Nip. 196910131993031002

TIM VERIFIKASI

<p>Inspektur</p>  <p>KANDAM, S.Sos Nip. 19680607 199103 1004</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>PARYANTO, S.Sos.M.T Nip. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Keepala Bappeda</p>  <p>Drs.ANDY SUMANTO, CfrA Nip. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Keepala Dinas Sosial, P3APKB</p>  <p>BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si Nip. 19820521 2000121 002</p>
---	---	---	---

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)															
SKPD	: Kecamatan Asam Jujuhan														
TAHUN ANGGARAN	: 2021														
PROGRAM	Koordinasi Kecamatan														
KODE PROGRAM	4.01.4.01.12.86.04														
KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan														
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya prioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD yang responsif gender														
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya di Kecamatan dengan jumlah peserta yang mengikuti musrenbang dari Tahun : Tahun 2017 : 110 orang Tahun 2018 : 115 orang Tahun 2019 : 105 Orang Tahun 2020 : 82 orang Pada musrenbang tahun 2020 dari 80 Orang peserta musrenbang yang terdiri dari 55 Orang Peserta Laki-Laki dan 25 Orang Peserta Perempuan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Pada Musrenbang tingkat Kehadiran Sangat sedikit yang disebabkan oleh akses jalan sangat jelek khususnya bagi Nagari Lubuk Besar dan Nagari Tanjung Alam dan walupun hadir sangat rendah persentasenya yang berani menyampaikan usulan</p> <p>b. Peserta Musrenbang sangat sedikit Keterwakilan perempuan yang disediakan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan yang selama ini sangat rendahnya pemahaman Sumberdaya manusia dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang.</p> <p>c. Ketidak ingin tahuan perempuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh tidak adanya informasi yang jelas tentang pentingnya musrenbang, disamping itu masih mengutamakan kepentingan pribadi, juga faktor sosial budaya minangkabau yang membatasi ruang gerak perempuan, terlebih lagi akses jalan yang sangat sulit dilalui oleh perempuan untuk mengikuti musrenbang yang berasal dari nagari Lubuk besar dan Nagari Tanjung Alam</p>														
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Memilih dan memilih usulan kegiatan pembangunan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Prioritas usulan peningkatan kelas jalan</td> </tr> </table>			Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas		Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender	Alokasi Anggaran		Komponen/ aktifitas 2	Memilih dan memilih usulan kegiatan pembangunan yang responsif gender		Tujuan	Prioritas usulan peningkatan kelas jalan
Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas														
	Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender													
	Alokasi Anggaran														
Komponen/ aktifitas 2	Memilih dan memilih usulan kegiatan pembangunan yang responsif gender														
	Tujuan	Prioritas usulan peningkatan kelas jalan													

			dari Nagari Lubuk Besar menuju Kantor Camat Asam Jujuhan, begitu juga jalan dari Nagari Tanjung Alam Menuju Kantor Camat Asam Jujuhan, sehingga perempuan tidak akan merasa takut lagi untuk melewati jalan tersebut.
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		Rp. 7.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang KPD Kabupaten yang responsif gender		

Sungai Limau, Maret 2020


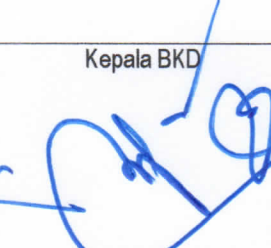


CAMAT ASAM JUJUHAN



IMAM MAHFURI, SE

Nip. 196910131993031002

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3APPKB
			
KANDAM, S.Sos Nip. 19680607 199103 1004	PARYANTO, S.Sos.M.T Nip. 19690609 198902 1 001	Drs. ANDY SUMANTO, CfrA Nip. 19681220 199009 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si Nip. 19820521 200012 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya	Akses: Partisipasi: Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang	Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKP Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari	Meningkatkan kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur	Output: Meningkatkan a peran usulan laki-laki dari 17 % menjadi 60 %, peran usulan perempuan dari 4 % menjadi 40 %
TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKP	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2017 : 130 org Tahun 2018 : 149 org Tahun 2019 : 158 org Tahun 2020 : 165 org Tahun 2018, dari 149 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 101 orang peserta laki-laki	Manfaat: Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang		Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang		Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang	Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan,	Outcome : Usulan Musrenbang tertampung

	dan 48 Orang peserta perempuan					berjalan lancar	perbandingan nya laki-laki 62% dan perempuan 38%	di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Tahun 2019, dari 158 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 117 orang peserta laki-laki dan 41 Orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2020, dari 165 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 111 orang peserta laki-laki dan 54 Orang peserta perempuan</p> <p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 120 orang yang hadir 111 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 60 (%)</p>	<p>Kontrol</p> <p>Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p>	<p>Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p> <p>- Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</p>	<p>Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p>		<p>Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang kelengkapan perempuan dalam kegiatan Musrenbang</p> <p>Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang</p>	<p>Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 17 % dan perempuan meningkat dari 0 % menjadi 3%</p> <p>Musrenbang 2020 jumlah peserta laki-laki yang diundang 120 orang yang hadir 111 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 60% peserta</p>	

	peserta perempuan yang diundang sebanyak 70 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 50%						perempuan yang diundang sebanyak 70 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 50%	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIM VERIFIKASI

Inspektur KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD PARYANTO, S.Sos, M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, CFA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial, AP3A, PPKB BOBAY P. RIZY, S.STP, M.Si. NIP 19820521 200012 1 002
---	--	---	---

Koto Baru, 20 Maret 2020
Camat Koto Baru
BERLIAN, S.Sos
NIP. 196601101993031008

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	: Kecamatan Koto Baru
TAHUN ANGGARAN	: 2021
PROGRAM	Koordinasi Kecamatan
KODE PROGRAM	4.01.4.01.08.86
KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya usulan Program Prioritas dan Kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang Responsif Gender
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya. ➢ Masing-masing Nagari mengutus Peserta mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 158 orang, Tahun 2020 165 orang) ➢ Tahun 2019 dari 158 peserta diikuti oleh sebanyak 117 orang peserta laki-laki dan 41 orang opeserta perempuan. ➢ Tahun 2020 dari 165 peserta diikuti oleh sebanyak 111 orang peserta laki-laki dan 54 orang peserta perempuan ➢ Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 120 orang yang hadir 111 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 60% peserta perempuan yang diundang sebanyak 70 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 50% <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p style="padding-left: 20px;">Partisipasi : Masih Banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan Musrenbang</p> <p style="padding-left: 20px;">Manfaat : Belum semua Peserta perempuan mengetahui manfaat dari Musrenbang</p> <p style="padding-left: 20px;">Kontrol : Dalam Musrenbang Peserta Perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang ➢ Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari keterwakilan unsure perempuan yang disediakan ➢ Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kurangnya keinginan atau minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang ➢ Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang ➢ Adanya kesibukan lain dari calon peserta Musrenbang ➢ Sosial budaya Minang Kabau dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat.

RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari	
		Tujuan	Mengetahui jumlah usulan Nagari
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 2	Merekap data untuk usulan prioritas Kecamatan	
		Tujuan	Memilah usulan nagari menjadikan usulan prioritas kecamatan
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 3	Distribusi undangan ke nagari	
		Tujuan	Memberitahu waktu pelaksanaan Musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 4	Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	
		Tujuan	Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak terkait
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 5	Merekomendasikan kepada BAPPEDA untuk membuat regulasi / kebijakan Tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	
		Tujuan	Supaya perempuan bias banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 6	Melakukan sosialisasi internal tentang pentingnya keterwakilan perempuan pada Musrenbang	
		Tujuan	Agar Perempuan lebih paham tentang kedudukan dan perannya pada acara Musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran	Rp. 20.000.000,-	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output: Meningkatnya peran usulan Laki-laki dari 10% menjadi 60% dan peran usulan perempuan dari 6% menjadi 40%		
	Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang OPD yang Resposif Gender.		

Koto Baru, 20 Maret 2020
Camat Koto Baru

BERLIAN, S.Sos
NIP. 196601101993031008

Inspektur  KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD  PARYANTO, S.Sos., M.F. NIP 19690609 198802 1 001	Kepala Bappeda  Drs. ANDY SUMANTO, CFA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PRKB  BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si NIP 19820521 200012 1 002
--	--	--	---

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
KECAMATAN KOTO BESAR**

Program : Program Koordinasi Kecamatan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Data Pembebasan Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya	Faktor Kesenjangan Akses: Partisipasi: Masih banyak kaum perempuan yang kurang diikutkan dalam kegiatan musrenbang	Isu Gender Sub Kesenjangan Internal Belum adanya regulasi yang mengatur representasi dan laki-laki pada musrenbang	Sebab Kesenjangan Eksternal Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk mengabdikan Musrenbang	Reformulasi Tujuan Teruskan nya usulan program dan kebijakan untuk Rencana RKP	Rencana Aksi Mengumpulkan DURKP bagi perempuan dan Menetapkan Musrenbang dari berbagai unsur, tersusunnya usul-prioritas kecamatan.	Data Dasar (Baseline) Mengingatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur, tersusunnya usul-prioritas kecamatan.	Indikator Gender Output : Meningkatnya Peran usulan Perempuan dan Anak dalam musrenbang dari 15% menjadi 50 % Outcome : Usulan hasil Musrenbang yang bertampung dalam RKP
TUJUAN: Peningkatan Hasil Musrenbang Kecamatan yang bertampung dalam RKP	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2019 : yang diundang 200 orang yang hadir 145 Orang (72,5%) dari undangan yg terkirim terdiri dari laki-laki : 101 orang	Menganalisa: Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	Sedikitnya jumlah hakikat a peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang di sertakan	Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang	Anggaran 2021 yang responsif gender	Mengalir koordinasi dan sosialisasi dengan internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Dari kehadiran tahun 2019, lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingan ya lak-laki 70% dan perempuan 30%	Responsif Gender

<p>(70%) perempuan : 44 orang (30%)</p>	<p>Tahun 2020 : jumlah yang diundang 154 yang hadir : 125 Orang (81%) terdiri dari : laki-laki : 84 orang (67,2%) dan Perempuan : 41 orang (32,8%)</p>	<p>menyampaikan usulannya</p>	<p>komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p>	<p>tidak bersedia memberikan pendapat</p>	<p>Adanya Mutasi Pegawai Pengekha Musrenba ng Kecamatan n, dan pejabat pengganti SIDM yang ada sekarang belum memahami seputar a tentang pelaksanaan Musrenba ng di Kecamatan n.</p>	<p>akan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang</p>	<p>kegiatan tahun 2020, juga masih dominan laki- laki dari pada perempuan, perbandingan ya laki-laki 67,2% dan perempuan 32,8%</p>	<p>Membuat himbauan atau sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan perwakilan perempuan dalam kegiatan Musrenbang</p>	<p>Meningkatnya partisipasi Pereserta perempuan sebesar 2,8% dari 30% menjadi 32,8%</p>	
---	--	-----------------------------------	--	---	--	---	--	--	---	--

<p>Dari Nontien Usulan Mawarhang 2020 peserta laki-laki sebanyak 76 asuhan/ 85 % dari 89 asuhan semua bidang dan peserta perempuun sebanyak 13 Usulan (15 %, dari 89 asuhan semua bidang</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Kep. Besar, Maret 2020
 Kepala Korp Besar

H. YUSRI, SKM, MH
 NIP. 196803241990031002

Inspektur
KANDAM, S.Sos
 NIP. 19690607 199103 1 004
 Kepala BKD
PARYANTO, S.Sos, M.T.
 NIP. 19690609 196902 3 001
 Tim Verifikasi
 Kepala Bappeda
Drs. ANDY SUMANTO, CPA
 NIP. 19681220 199009 1 001
 Kepala Dinas Sosial, P3A, P3A
BOBBI P. RIZA, S.STP, M.Si.
 NIP. 19820521 200012 1 002



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

OPD	: KECAMATAN KOTO BESAR
TAHUN ANGGARAN	: 2021
PROGRAM	KOORDINASI KECAMATAN
KODE PROGRAM	4.01.4.01.08.86
KEGIATAN	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun anggaran 2021 yang responsif Gender
ANALISIS SITUASI	<ul style="list-style-type: none"> • Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya • Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang • Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2019 : Jumlah yang diundang 200 orang yang hadir 145 Orang (72,5%) dari undangan yg terkirim terdiri dari laki-laki : 101 orang (70%) perempuan : 44 orang (30%) • Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang Tahun 2020 : Jumlah yang diundang 154 yang hadir : 125 Orang (81%) terdiri dari laki-laki : 84 orang (67,2%) dan Perempuan : 41 orang (32,8%) • Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 peserta laki-laki sebanyak 76 usulan (85 %) dari 89 usulan semua bidang dan peserta perempuan sebanyak 13 Usulan (15 %) dari 89 usulan semua bidang • Isu dan Faktor Kesenjangan Gender <ul style="list-style-type: none"> • Faktor Kesenjangan <ul style="list-style-type: none"> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang dilibatkan dalam kegiatan musrenbang <u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang <u>Kontrol :</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya • Penyebab Internal <ul style="list-style-type: none"> • belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang • Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan • Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang • Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan, dan pejabat pengganti SDM yang ada sekarang belum memahami sepenuhnya tentang pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan.

	c) Penyebab Eksternal <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya keinginan/minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang • Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang • Adanya kesibukan/kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang • Sosial Budaya Minangkabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat 	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP nagari
		Tujuan Mengetahui jumlah usulan nagari Alokasi Anggaran
		Merekap data sesuai usulan prioritas kecamatan
	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan Memilih usulan Nagari menjadikan usulan prioritas Kecamatan Alokasi Anggaran
		Distribusi undangan ke nagari
		Tujuan Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang Alokasi Anggaran
	Komponen/ Aktifitas 4	Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar
		Tujuan Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak Alokasi Anggaran
		Merekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang
	Komponen/ Aktifitas 5	Tujuan Supaya peserta perempuan meningkat dan bisa seimbang dengan peserta laki-laki Alokasi Anggaran
		Membuat himbauan atau sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan perwakilan perempuan dalam kegiatan Musrenbang
		Tujuan Perempuan lebih memahami tentang kedudukannya dan peran sertanya dalam musrenbang. Alokasi Anggaran
	Total Anggaran Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Indikator Output Meningkatnya Peran usulan Perempuan dan Anak dalam musrenbang dari 15% menjadi 50 %	

	Indikator Outcome : Usulan hasil Musrenbang Yang tertampung dalam RKPD Tahun anggaran 2021 yang Responsif Gender
--	--

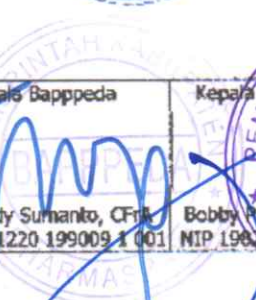
Koto Besar, Maret 2020
 Camat Koto Besar



H. YUSRIAL SKM.MM
 NIP. 196803211990031002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Kandam, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Paryanto, S.Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Drs. Andy Sumanto, CFik NIP 19661220 199009 1 001	Bobby P. Riza, S.STP., M.Si. NIP 19830531 200012 1 002



GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN KOTO SALAK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Data Pemantauan Wawasan Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang	Isu Gender			Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Monitoring Indikator Gender
		Faktor Kesenjangan Akses: Partisipasi:	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKP	Tahun 2019, dari 70 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 49 orang peserta laki-laki dan 21 Orang peserta perempuan Tahun 2020, dari 70 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 52 orang peserta laki-laki dan 18 Orang peserta perempuan	Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang Manfaat: Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dan unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	Kurangnya kegiatan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang	Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKP Tahun 2021 yang responsif gender	Mengumpulkan DUKRP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dan kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 64 % dan perempuan 36%	Output : Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 10 % menjadi 60 %, peran usulan perempuan dari 6 % menjadi 40 % Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKP Yang Responsif Gender

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 52 orang yang hadir 45 Orang yang menyampaikan usulan sebanyak 11 orang (10 %). peserta perempuan yang diundang sebanyak 18 orang yang hadir 12 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (2%)	Kontrol Dalam musrenbang 9 Peserta perempuan masih sedikit yang beranl menyampaikannya	Masih rendahnya SDM dan pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang	Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Mekomendasikan ke Bappenda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 52 orang yang hadir 45 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 11 orang (10 %)	
			Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan			Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterampilan perempuan di musrenbang	peserta perempuan yang diundang sebanyak 18 orang yang hadir 12 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (2%)	

KOTO SALAK, 26 MARET 2020
CAMAT KOTO SALAK
MARCO ANDRIAS, S.I.P. MM
NIP.198806032007011001

Inspektur
KANDAM, S.Sos
NIP.19670607.199103.1.004

Tim Verifikasi
Drs. ANDY SUMANTO, CFA
NIP.19681122.199009.1.001

Kepala Bappenda
Drs. ANDY SUMANTO, CFA
NIP.19681122.199009.1.001

Kepala Dinas Sosial, P3A, POKB
BOBBY R. RIZA, S.STP., M.Si.
NIP.19610521.200012.1.002

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	: KECAMATAN KOTO SALAK		
TAHUN ANGGARAN	: 2021		
PROGRAM	KOORDINASI KECAMATAN		
KODE PROGRAM	4 01.4 01.11.86.04		
KEGIATAN	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN		
HASIL/OUTPUT	Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya ➤ Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang ➤ Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 70 orang, tahun 2020 70 orang) ➤ Tahun 2019, dari 70 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 49 orang peserta laki-laki dan 21 Orang peserta perempuan ➤ Tahun 2020, dari 70 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 52 orang peserta laki-laki dan 18 Orang peserta perempuan ➤ Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 52 orang yang hadir 45 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 11 orang (10 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 18 orang yang hadir 12 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (25%) <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p><u>Partisipasi</u> : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang</p> <p><u>Manfaat</u> : Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang</p> <p><u>Kontrol</u> : Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p> <p>b. Penyebab Interna</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang ➤ Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan ➤ Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang <p>c. Penyebab Eksterna</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang ➤ Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang ➤ Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang ➤ Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat 		
RENCANA AKSI	Komponen / Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari	
		Tujuan	Mengetahui Jumlah usulan Nagari
		Alokasi Anggaran	
	Komponen / aktifitas 2	Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	
		Tujuan	Memilah usulan nagari menjadikan usulan prioritas kecamatan
		Alokasi Anggaran	
	Komponen / aktifitas 3	Distribusi undangan ke nagari	
		Tujuan	Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen / aktifitas 4	Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	
		Tujuan	Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak terkait
		Alokasi Anggaran	

	Komponen / aktifitas 5	Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang
	Tujuan	Supaya perempuan bisa banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
	Alokasi Anggaran	
	Komponen / aktifitas 6	Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang
	Tujuan	Perempuan lebih paham tentang kedudukannya dan perannya dalam musrenbang
	Alokasi Anggaran	
Total anggaran		Rp. 6.500.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)		
Output : Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 10 % menjadi 60 %, peran usulan perempuan dari 2 % menjadi 40 %		
Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender		

KOTO SALAK, 26 MARET 2020
CAMAT KOTO SALAK
MARCO ANDRIAS S.IP. MM
NIP. 198806032007011001

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, PAA, PPKB
Kandam, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Paryanto, S.Sos. M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Br. Andy Suminto, CFA NIP 19681220 199009 1 001	Br. Rudy, S.STP., M.Si. NIP 19820901 200012 1 003

090 : Kecamatan Padang Laweh

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya	Akses : Terbatasnya akses peserta musrenbang perempuan karena geografis	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang	Terumuskan- nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan	Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 24 % menjadi 29 %, peran usulan perempuan dari 1 % menjadi 7 %
TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2017 : 92 org Tahun 2018 : 76 org Tahun 2019 : 145 org Tahun 2020 : 130 org Tahun 2018, dari 76 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 59 orang peserta laki-laki dan 17 Orang peserta perempuan Tahun 2019, dari 145 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 101 orang peserta laki-laki dan 44 Orang peserta perempuan Tahun 2020, dari 130 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 102 orang	- kondisi jalan yang belum memadai seperti jalan batu rijal muaro sopan <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang <u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang <u>Kontrol</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	- Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang	Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat Kondisi jalan yang belum memadai terutama bagi peserta perempuan		Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang Melakukan sosialisasi internal tentang penting	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 78% dan perempuan 21% Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 24% menjadi 29% dan perempuan meningkat dari 1 % menjadi 7% Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 110.	Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>peserta laki-laki dan 28 Orang peserta perempuan</p> <p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 110 orang yang hadir 102 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 25 orang (29%)</p> <p>peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 28 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (7 %)</p>		<p>- Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</p> <p>- SDM yang ada sekarang belum sepenuhnya memahami tentang pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</p>			<p>keterwakilan perempuan di musrenbang</p> <p>Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang</p> <p>Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang</p>	<p>orang yang hadir 102 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 25 (29%)</p> <p>peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 28 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (7 %)</p>	

Padang Laweh, 20 Maret 2020
Camat Padang Laweh
HENDRI S Ag, M Si
NIP.197111122006041015

Inspektur KANDAM, S.Sos NIP 19570607 199103 1 004	Kepala BKD PARYANTO, S.Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, CFA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial, PPK, PPKB PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGELOMPOKAN PENDUKUNG ANAK, KELUARGA BERSAMA S BOESTY PRILZA S.Sos, M.Si NIP 19820521 200012 1 002
---	---	---	--

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : KECAMATAN PADANG LAWEH			
TAHUN ANGGARAN : 2021			
PROGRAM	Koordinasi Kecamatan		
KODE PROGRAM	4.01.4.01.14.86		
KEGIATAN	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan		
HASIL/OUTPUT	Terumuskan-nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang responsif gender		
ANAI SIS SITUASI	<div>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</div> <div><div>- Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya</div><div>- Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</div><div>- Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 145 orang, tahun 2020 130 orang)</div><div>- Tahun 2019 : dari 145 orang ada, diikuti oleh sebanyak 101 orang peserta laki-laki dan 44 orang peserta perempuan</div><div>- Tahun 2020 : dari 130 orang ada, diikuti oleh sebanyak 102 orang peserta laki-laki dan 28 orang peserta perempuan</div><div>- Dari Notulen usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 110 orang yang hadir 102 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 25 orang (29%), peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 28 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (7 %)</div></div> <div>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</div> <div><div>a. Faktor Kesenjangan</div><div><div>Partisipasi : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang</div><div>Manfaat : Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang</div><div>Kontrol : Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</div></div><div>b. Penyebab Internal</div><div><div><div>• belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang</div><div>• Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan</div><div>• Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</div><div>• Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</div></div><div>c. Penyebab Eksternal</div><div><div><div>• Kurangnya keinginan/minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang</div><div>• Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang</div><div>• Adanya kesibukan/kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang</div><div>• Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberi pendapat</div></div></div></div></div>		
RENCANA AKSI	Komponen/	Mengumpulkan DURKP Nagari	
	aktifitas 1	Tujuan	Mengetahui Jumlah usulan Nagari
		Alokasi anggaran	
	Komponen/	Merekap data untuk usulan priorotas Kecamatan	
	aktifitas 2	Tujuan	Memilah usulan Nagari menjadikan usulan prioritas Kecamatan
		Alokasi anggaran	
	Komponen/	Distribusi undangan ke Nagari	
	aktifitas 3	Tujuan	Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang
		Alokasi anggaran	
	Komponen/	Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan musrenbang berjalan lancar	

	aktifitas 4	Tujuan	Mendapat kepastian kehadiran pihak-pihak terkait
		Alokasi anggaran	
	Komponen/ aktifitas 5	Merekondasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	
		Tujuan	Supaya perempuan bisa banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
		Alokasi anggaran	
	Komponen/ aktifitas 6	Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang	
		Tujuan	Perempuan lebih paham tentang kedudukannya dan perannya dalam Musrenbang
		Alokasi anggaran	
	Total Anggaran		Rp.14.000.000
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Indikator Ouput		
	Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 24 % menjadi 29% peran usulan perempuan dari 1% menjadi 7%		
	Indikator Outcome :		
	Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RPKD yang Responsif Gender		



Tim Verifikasi			
Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, PDA, PPKB
Kandam, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Paryanto, S.Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Drs. Andy Sumanto, CFA NIP 19681220 199009 1 001	Bobby F. Riza, S.STP., M.Si. NIP 19820521 200012 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN SEMBILAN KOTO

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Monitoring
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2018 : 105 org Tahun 2019 : 115 org Tahun 2020 : 100 org Tahun 2018, dari 105 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 79 orang peserta laki-laki dan 36 Orang peserta perempuan Tahun 2019, dari 115	Akses : Terbatasnya akses peserta musrenbang karena geografis - (kondisi jalan yang ada yang ada dikacamatan blm lancar Partisipasi : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang Manfaat : Belum semua masyarakat	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang Masih rendahnya pemahaman	Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKP Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar Membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan	Meningkatkan kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 62% dan perempuan 38% Meningkatnya wawasan Peserta Laki-laki 79% menjadi 88% dan perempuan	Output : Meningkatkan usulan laki-laki menjadi 60% Outcome : Usulan Musrenbang Responsif Gender

	Orang ada, diikuti oleh sebanyak 80 orang peserta laki-laki dan 35 Orang peserta perempuan	mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang	dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		perempuan dalam kegiatan Musrenbang Sosialisasi ke masyarakat pentingnya Musrenbang	meningkat dari 0 % menjadi 3%	
	Tahun 2020, dari 100 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 79 orang peserta laki-laki dan 21 Orang peserta perempuan	<u>Kontrol</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan	Kondisi jalan yang belum memadai terutama bagi peserta perempuan			Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 100 orang yang hadir 79 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 20 (%)	
	Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 100 orang yang hadir 79 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 20 (%)						peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 21 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : KECAMATAN SEMBILAN KOTO
TAHUN : 2021
ANGGARAN

PROGRAM	Program Koordinasi Kecamatan		
KODE PROGRAM	4.01.4.01.09.86.04		
KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan		
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya usulan program dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsive gender		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang untuk tahun Tahun 2019 = 115 orang Tahun 2020 = 100 orang Untuk tahun 2020 dari 100 peserta musrenbang terdiri dari 79 peserta laki-laki dan 21 orang peserta wanita</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan perbandingan laki-laki 79% dan perempuan 21%; 2. Peserta Musrenbang diserahkan kepada pemerintah Nagari; 3. Kecenderungan peserta usulan laki-laki lebih diakomodasi dari pada usulan perempuan; <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender ; 2. Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan gender yang disediakan; 3. Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbatasnya keinginan masyarakat dalam Musrenbang; 2) Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang; 3) Adanya kesibukan/ kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURK Nagari	
		Tujuan	Mengetahui usulan Nagari.
		Alokasi Anggaran	
		Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	

	Komponen/ aktifitas 2	Tujuan	Memilah usulan nagari menjadi usulan prioritas kecamatan
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 3	Distribusi undangan ke nagari	
		Tujuan	Memberi tahu waktu pelaksanaan musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 4	Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan musrenbang berjalan dengan lancar	
		Tujuan	Mendapatkan kepastian pihak pihak terkait untuk dapat hadir
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 5	Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	
		Tujuan	Mendapat hak-hak perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang
Total anggaran		Rp. 12.855.000,-	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output : Meningkatnya kehadiran perempuan dan usulan peserta Musrenbang Input : Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsive gender		



Silago, Maret 2020
Camat Sembilan Koto

H.SYAIFUL ANWAR.S.Pd.M.Pd
NIP. 19670927 198802 1 001

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPEDA	KEPALA DINAS P3APPKB
KANDAM, S.Sos NIP.19670607 199103 1 004	PARYANTO, S.Sos, MT NIP.19690609 198902 1 001	Drs. ANDY SUMANTO, C.FrA NIP.19681220 199009 1 001	BOBBY RIZA, S.STP, M.Si NIP.19670521 200012 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN SITUNG

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Akses : Partisipasi:								
TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPd	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2017 : 100 Orang Tahun 2018 : 102 Orang Tahun 2019 : 106 Org Tahun 2020 : 86 Org	Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	Kurangnya keinginan /minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang	Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPd Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 70% dan perempuan 30% Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 17 % dan perempuan meningkat dari 0 % menjadi 3%	Output : Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 1 % menjadi 65 %, per usulan perempuan dari 5 % menjadi 35 % Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPd Yang Responsif Gen
	Tahun 2017, dari 100 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 63 orang peserta laki-laki dan 37 Orang peserta perempuan Tahun 2018, dari 102 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 67 orang peserta laki-laki dan 35 Orang peserta perempuan	Manfaat: Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang		Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Tahun 2019, dari 106 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 57 orang peserta laki-laki dan 49 Orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2020, dari 86 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 47 orang peserta laki-laki dan 39 Orang peserta perempuan</p> <p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 80 orang yang hadir 47 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 15 orang (15 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 39 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (5%)</p>	<p>Kontrol Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p>	<p>- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p> <p>- Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</p>	<p>Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p>		<p>Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang</p> <p>Melakukan sosialisasi internal tentang penting, keterwakilan perempuan di musrenbang</p>	<p>Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 80 orang yang hadir 47 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 15 orang (15 %)</p> <p>peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 39 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (5%)</p>	

Sitiung, 20 Maret 2020

Pihak Pertama
CAMAT SITIUNG

H.HAMIDI, S.Sos
NIP. 196304051985031011

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p> <p>KANDAM, S.Sos</p> <p>NIP 19670607 199103 1 004</p>	<p>Kepala BKO</p> <p>PARYANTO, S.Sos., M.T. NIP</p> <p>19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p>Drs. ANDY SUMANTO, CFA</p> <p>NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p> <p>BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si.</p> <p>NIP 19820521 200012 1 002</p>
--	--	--	--

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)						
SKPD	: KECAMATAN SITIUNG					
TAHUN ANGGARAN	: 2021					
PROGRAM	KOORDINASI KECAMATAN					
KODE PROGRAM	4.01.4.01.10.86.04					
KEGIATAN	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN					
HASIL/OUTPUT	Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender					
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya ➤ Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang ➤ Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 106 orang, tahun 2020 86 orang) ➤ Tahun 2019, dari 106 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 57 orang peserta laki-laki dan 49 Orang peserta perempuan ➤ Tahun 2020, dari 86 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 47 orang peserta laki-laki dan 39 Orang peserta perempuan ➤ Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 80 orang yang hadir 47 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 15 orang (15 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 39 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 8 orang (8%) <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p><u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang</p> <p><u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang</p> <p><u>Kontrol.</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang ➤ Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan ➤ Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang ➤ Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang ➤ Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang ➤ Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta 					
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	<p>Mengumpulkan DURKP Nagari</p> <table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Mengetahui Jumlah usulan Nagari</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> </table>	Tujuan	Mengetahui Jumlah usulan Nagari	Alokasi Anggaran	
Tujuan	Mengetahui Jumlah usulan Nagari					
Alokasi Anggaran						
	Komponen/ aktifitas 2	<p>Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan</p> <table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Memilah usulan nagari menjadikan usulan prioritas kecamatan</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> </table>	Tujuan	Memilah usulan nagari menjadikan usulan prioritas kecamatan	Alokasi Anggaran	
Tujuan	Memilah usulan nagari menjadikan usulan prioritas kecamatan					
Alokasi Anggaran						
	Komponen/ aktifitas 3	<p>Distribusi undangan ke nagari</p> <table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> </table>	Tujuan	Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang	Alokasi Anggaran	
Tujuan	Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang					
Alokasi Anggaran						
	Komponen/ aktifitas 4	<p>Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar</p> <table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak terkait</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> </table>	Tujuan	Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak terkait	Alokasi Anggaran	
Tujuan	Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak terkait					
Alokasi Anggaran						

	Komponen/ aktifitas 5	Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	
		Tujuan	Supaya perempuan bisa banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 6	Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang	
		Tujuan	Perempuan lebih paham tentang kedudukannya dan perannya dalam musrenbang
		Alokasi Anggaran	
Total anggaran		Rp. 20.000.000,-	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output : Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 15 % menjadi 65 %, peran usulan perempuan dari 8 % menjadi 35 %		
	Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender		

Sitiung, 20 Maret 2020

Pihak Pertama
CAMAT SITIUNG

H.HAMIDI, S.Sos
NIP. 196204051985031011

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Kandam, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Paryanto, S.Sos, M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Drs. Andy Sumanto, CFA NIP 19681220 199009 1 001	Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP 19820521 200012 1 002

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)						
SKPD	: KECAMATAN SUNGAI RUMBAI					
TAHUN ANGGARAN	: 2021					
PROGRAM	KOORDINASI KECAMATAN					
KODE PROGRAM	4.01.4.01.08.86					
KEGIATAN	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN					
HASIL/OUTPUT	Terumuskan-nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender					
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya ➢ Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang ➢ Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 100 orang, tahun 2020 100 orang) ➢ Tahun 2019, dari 100 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 71 orang peserta laki-laki dan 29 Orang peserta perempuan ➢ Tahun 2020, dari 135 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 85 orang peserta laki-laki dan 50 Orang peserta perempuan ➢ Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 65 orang yang hadir 46 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 10 orang (10 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 6 orang (6%) <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p><u>Partisipasi</u> : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang</p> <p><u>Manfaat</u> : Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang</p> <p><u>Kontrol</u>. Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p> <p>b. Penyebab Interna</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang ➢ Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan ➢ Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang ➢ Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan <p>c. Penyebab Eksterna</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang ➢ Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang ➢ Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang ➢ Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat 					
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	<p>Mengumpulkan DURKP Nagari</p> <table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Mengetahui Jumlah usulan Nagari</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> </table> <p>Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan</p>	Tujuan	Mengetahui Jumlah usulan Nagari	Alokasi Anggaran	
Tujuan	Mengetahui Jumlah usulan Nagari					
Alokasi Anggaran						

	Komponen/ aktifitas 5	Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	
		Tujuan	Supaya perempuan bisa banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 6	Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang	
		Tujuan	Perempuan lebih paham tentang kedudukannya dan perannya dalam musrenbang
		Alokasi Anggaran	
Total anggaran		Rp. 14.500.000,-	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output : Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 10 % menjadi 60 %, peran usulan perempuan dari 6 % menjadi 40 % Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender		

Sungai Rumbai, 20 Maret 2020

Camat Sungai Rumbai,

MASNAL, SE

NIP. 19640101 198602 1 004

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Kandam., S.Sos. NIP 19670607 199103 1 004	Panyanto, S.Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Drs. Andy Sumanto, C.Fr.A. NIP 19681220 199009 1 001	Robby P. Riza, S.STP., M.S. NIP 19820521 200012 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPd	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2019 : 100 org Tahun 2020 : 100 org	Akses : Partisipasi : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang	Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPd Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menialin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 62% dan perempuan 38% Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 17 % dan perempuan meningkat dari 0 % menjadi 3%	Output : Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 1 % menjadi 60 %, per usulan perempuan d 6 % menjadi 40 % Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPd Yang Responsif Gen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 65 orang yang hadir 46 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 10 orang (10 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 6 orang (6%)	Kontrol Dalam Musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang - Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan	Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 65 orang yang hadir 46 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 10 orang (10 %) peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 6 orang (6%)	



Sungai Rumbai, 20 Maret 2020
CAMAT SUNGAI RUMBAI,
MASNAL, SE
NIP. 19640101 198602 1 004

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p> <p>KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p> <p>PARYANTO, S.Sos, M.T. NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p>Drs. ANDY SUMANTO, CFA NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p> <p>BOBRI P RIZA, S.STP, M.Si. NIP 19630521 200012 1 002</p>
---	--	---	---

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN TIMPEH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan Akses:	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya	Partisipasi: Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang	Terumuskan-nya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKP Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur	Output : Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 15 % menjadi 65 %, peran usulan perempuan dari 5 % menjadi 35 %
TUJUAN: Persetase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPd	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2019 : 120 org Tahun 2020 : 120 org	Manfaat: Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang	Distribusi undangan ke nagari	Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingan nya laki-laki 70% dan perempuan 30%	Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPd Yang Responsif Gender

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 75 orang yang hadir 56 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 15 orang (15 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 45 orang yang hadir 64 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (5%)	Kontrol Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan	Sosial Budaya Milang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 75 orang yang hadir 56 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 10 orang (10 %) peserta perempuan yang diundang sebanyak 45 orang yang hadir 64 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (5%)

<p>Inspektur</p> <p>KANDAM, S.Sos NIP. 19670607 199103 1 004</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p>PARYANTO, S.Sos., M.T. NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKA</p> <p>BOBBY RIZA, S.SIP., M.Si. NIP. 19891221 200012 1 002</p>
--	--	---

Tim Verifikasi

Tabek, 20 Maret 2020

Carnet Triwen

ZULKIFLI, S.Pd.MM

NIP. 19621119 198203 1 003

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	: KECAMATAN TIMPEH		
TAHUN ANGGARAN	: 2021		
PROGRAM	KOORDINASI KECAMATAN		
KODE PROGRAM	4.01.4.01.10.86.04		
KEGIATAN	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN		
HASIL/OUTPUT	Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender		
ANALISIS SITUAS	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya ➢ Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang ➢ Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 120 orang, tahun 2020 120 orang) ➢ Tahun 2019, dari 120 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 84 orang peserta laki-laki dan 36 Orang peserta perempuan ➢ Tahun 2020, dari 145 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 85 orang peserta laki-laki dan 60 Orang peserta perempuan ➢ Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 70 orang yang hadir 65 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 15 orang (15 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 55 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 8 orang (8%) <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a.</p> <p>Faktor Kesenjangan</p> <p><u>Partisipasi</u> : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang</p> <p><u>Manfaat</u> : Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang</p> <p><u>Kontrol</u> : Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang ➢ Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan ➢ Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang ➢ Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang ➢ Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang ➢ Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang ➢ Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari	
		Tujuan	Mengetahui Jumlah usulan Nagari
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 2	Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	
		Tujuan	Memilah usulan nagari menjadikan usulan prioritas kecamatan
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 3	Distribusi undangan ke nagari	
		Tujuan	Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 4	Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	
		Tujuan	Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak terkait
		Alokasi Anggaran	

	Komponen/ aktifitas 5	Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	
		Tujuan	Supaya perempuan bisa banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 6	Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang	
		Tujuan	Perempuan lebih paham tentang kedudukannya dan perannya dalam musrenbang
		Alokasi Anggaran	
Total anggaran		Rp. 25.000.000,-	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)		Output : Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 15 % menjadi 65 %, peran usulan perempuan dari 8 % menjadi 35 % Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender	

Tabek, 20 Maret 2020
Camet Timpeh

ZULKIFLI, S.S. Pd.MM
NIP. 19621119 198302 1 003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial PPKB
Kandam, S. Sos NIP 19670607 199103 1 004	Paryanto, S. Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Drs. Andy Sumanto, C.FrA NIP 19681226 199009 1 001	Bobby F. Riza, S.STP., M.Si NIP 19620521 200012 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN TIUMANG

Program : Program Koordinasi Kecamatan

Program		: Program Koordinasi Kecamatan		Monitoring				
Program	Date	ISU GENDER	KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN	MONITORING				
Program Koordinasi Kecamatan	Date Pembukaan Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan akan setiap tahunnya	Absen: Partisipasi:	belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang Sedikitnya jumlah kuota peserta musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan Masih rendahnya SDM dan pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang Adanya mutasi pejabat pengaba musrenbang kecamatan	Kurangnya informasi/ minat masyarakat untuk mengikuti musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan/ kegiatan lain dan calon peserta Musrenbang Social budaya Minang abau dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat	Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rencana RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsive gender	Mengumpulkan DURKP ngan Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dan berbagai unsur terurusnya usulan prioritas kecamatan	Meningkatnya peran usulan laki-laki dan 17 % menjadi 60 % peran usulan perempuan dan 4 % menjadi 40%
	TUJUAN: Persentase Musrenbang kecamatan yang Tertampung RKPD	Masing-masing nagari mengusulkan peserta untuk mengikuti Musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2018 60 Orang Tahun 2019 60 Orang Tahun 2020 60 Orang	Manifest: Belum semua masyarakat (perempuan) mengikuti kegiatan musrenbang			Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan sinergitas secara internal dengan pihak lain terkait sehingga kegiatan musrenbang berjalan lancar	Dari kehadiran tahun 2020 lebih dari 60% dan 40%	Outcome : Usulan musrenbang tertampung di musrenbang RKPD Tahun 2021 yang responsif gender
Tahun 2018, dari 60 orang ada diikuti sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 10 orang peserta perempuan		Kontrol: dalam musrenbang						

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

OPD : KECAMATAN TIUMANG
TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	Program Koordinasi Kecamatan		
KODE PROGRAM	4.01.4.01.15.01.57		
KEGIATAN	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		
HASIL/OUTPUT	Kesesuaian Dokumen Perencanaandan Aturan Perencanaan		
TUJUAN	Memperoleh usulan pembangunan dari seluruh nagari		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2018 : 60 Orang Tahun 2019 : 60 Orang Tahun 2020, dari 60 Peserta ada sebanyak 40 peserta laki-laki dan 20 peserta perempuan</p> <p>2. Isuduan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jumlah peserta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan perbandingan laki-laki 60% dan perempuan 40%;2) Peserta Musrenbang diserahkan kepada pemerintah Nagari;3) Kecenderungan peserta usulan laki-laki lebih diakomodasi daripada usulan perempuan; <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none">1) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender ;2) Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan gender yang disediakan;3) Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none">1) Terbatasnya keinginan masyarakat dalam Musrenbang;2) Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang;3) Adanya kesibukan/ kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang		
RENCANA AKSI	Komponen 1	Memberikanadvokasi	
		Tujuan : Meningkatkan pemahaman bahwa keterwakilan gender merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan.	
	Komponen 2	Melaksanakan sosialisasi	
		Tujuan : Memberikan informasi awal tentang Musrenbang tingkat Kecamatan dan Nagari	
Total Anggaran		Rp. 4.000.000 (empat Juta Rupiah)	

Indikator Output

Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender

Indikator Outcome

Jumlah RKPD Tahun 2021 yang responsif gender

Tumang, 20 Maret 2020



Tim Verifikasi

Inspektur

Kepala BKD

Kepala Bappeda

Kepala Dinas Sosial, PPKB

Kandam, S.Sos

NIP 19670607 199103 1 004

Paryanto, S.Sos., M.T

NIP 19690609 198902 1 001

Drs. Andy Sumarto, CPM

NIP 19681220 199008 1 001

Rahay P. Riza, S.STP, M.Si

NIP 19620321 200012 1 001



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Pengadilan Agama Pulau Punjung

PROGRAM : Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang diluar gedung

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Data Perkara pada tahun 2019: 1. Cerai Gugat : 50 2. Cerai Talak : 25 3. Isbat Nikah : 15 4. Dispensasi nikah : 2	Akses: Masyarakat Pencari Keadilan khususnya perempuan yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang mampu di Kabupaten Dharmasraya	- Peraturan pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	- Ketidak mampuan secara ekonomi bagi para pihak istri untuk biaya proses peradilan. - Faktor budaya dan kebiasaan suatu daerah bagi pihak perempuan tidak biasa untuk mengajukan gugatan perceraian kepada suami.	Memberikan Pembebasan Biaya Kepada Pencari Keadilan khususnya Perempuan yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga di Kabupaten Dharmasraya.	- Advokasi dan sosialisasi kepada semua kecamatan di kabupaten dharmasraya terkait tentang Pembebasan biaya perkara ke masyarakat kurang mampu.	- Data Perkara sampai bulan Maret 2020 : 1. Cerai Gugat : 53 2. Cerai Talak : 13 3. Isbat Nikah : 11 4. Dispensasi 14	Output : - Sudah banyaknya pihak pencari keadilan mendapat akses peradilan
Kegiatan : Perkara Prodeo yang tertuang dalam DIPA		Partisipasi Yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga yang ingin mengajukan gugatan perceraian di Kabupaten Dharmasraya	- Proses perencanaan dan manajemen pelaksanaan harus diusulkan terlebih dahulu setiap tahunnya dalam Anggaran DIPA.			- Perlu nya kerjasama dengan instansi lain khususnya pemerintah kabupaten Dharmasraya melalui Kantor camat dan Kantor wali nagari, Kantor Urusan Agama, dan Dinas pencatatan sipil.		Outcome : - Meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan
Tujuan : Memberikan Pembebasan biaya bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan Peradilan		Manfaat Memberikan keringan biaya kepada Para Pencari Keadilan khususnya Perempuan dengan profesi Ibu rumah tangga.	- Belum tersedianya Ruang Bernah anak dan Ruang Laktasi bagi Ibu menyusui.					

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Perkara ditingkatkan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Kondisi Geografis Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga sulit di akses terlebih oleh para pihak terutama perempuan.	Akses: Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga secara biaya transportasi dan ketidak mampuan para pencari keadilan terlebih bagi perempuan dalam mengakses Pengadilan	- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Sidang Luar Gedung - Proses perencanaan dan managemen pelaksanaan harus diusulkan terlebih dahulu setiap tahunnya dalam Anggaran DIRA.	Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga secara biaya transportasi dan ketidak mampuan para pencari keadilan terlebih bagi perempuan dalam mengakses Pengadilan	1. Mengadakan kegiatan sidang keliling secara rutin tiap tahunnya 2. Menjadikan bentuk layanan terhadap masyarakat kurang mampu dalam hal biaya transportasi untuk proses berperkara	- Sosialisasi kepada semua kecamatan di kabupaten dharmasraya terkait tentang Adanya pelaksanaan Sidang Keliling sehingga program ini di ketahui oleh masyarakat di daerah terpencil	Data Perkara Sidang Keliling Tahun 2020 : 1. Cerai Talak : 2 2. Cerai Gugat : 7	Output : - Terbantu masyarakat pencari keadilan yang berdomisili di daerah terpencil dalam proses berperkara Outcome : - Meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan
Kegiatan : Perkara diselesaikan melalui sidang di luar gedung yang tertuang dalam DIPA	- Data Perkara Sidang Keliling Tahun 2019 1. Cerai Talak : - 2. Cerai Gugat : -	Partisipasi Masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala biaya transportasi ketika ingin mengajukan gugatan penceraian di Kabupaten Dharmasraya						
Tujuan : Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karen a alasan jarak, transportasi dan biaya.		Manfaat Memberikan keringan biaya kepada Para Pencari Keadilan Khususnya Perempuan kurang mampu dan terkendala jarak dan biaya transportasi				- Perluunya kerjasama dengan instansi lain khususnya pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Kantor camat dan kantor wali nagari, Kantor Urusan Agama, dan Dinas pencatatan sipil.		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja

Pulau Punjung, Maret 2020
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung

Salman, SHI., MA
NIP. 19790407 200704 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	Kepala BKD Paryanto, S.Sos, M.P. NIP. 10690609 198402 1 001	Kepala Bappeda Drs. Andy Samanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas SOSPA/PMB Robby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002
--	---	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Pengadilan Agama Pulau Punjung
TAHUN ANGGARAN : 2020





PROGRAM	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
KODE PROGRAM	
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p><i>Data Perkara pada tahun 2019:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cerai Gugat : 50 2. Cerai Talak : 25 3. Isbat Nikah : 15 4. Dispensasi nikah : 2 <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga sulit di akses terlebih oleh para pihak terutama perempuan. - Data Perkara Sidang Keliling Tahun 2019 <ol style="list-style-type: none"> 1. Cerai Talak : - 2. Cerai Gugat : - <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p><u>Akses:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Pencari Keadilan Khususnya perempuan yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang mampu di Kabupaten Dharmasraya. - Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga secara biaya transportasi dan ketidak mampuan para pencari keadilan terlebih bagi perempuan dalam mengakses Pengadilan <p><u>Partisipasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga yang ingin mengajukan gugatan perceraian di Kabupaten Dharmasraya - Masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala biaya transportasi ketika ingin mengajukan gugatan perceraian di Kabupaten Dharmasraya. <p><u>Manfaat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan keringan biaya kepada Para Pencari Keadilan Khususnya Perempuan dengan profesi Ibu rumah tangga. - Memberikan keringan biaya kepada Para Pencari Keadilan Khususnya Perempuan kurang mampu dan terkendala jarak dan biaya transportasi <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Sidang Luar Gedung - Proses perencanaan dan manajemen pelaksanaan harus diusulkan terlebih dahulu setiap tahunnya dalam Anggaran DIPA

	<p>-Belum tersedianya Ruang Bermain anak dan Ruang Laktasi bagi ibu menyusui.</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidak mampuan secara ekonomi bagi para pihak istri untuk biaya proses peradilan. - Faktor budaya dan kebiasaan suatu daerah bagi pihak perempuan tidak biasa untuk mengajukan gugatan perceraian kepada suami. - Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga secara biaya transportasi dan ketidak mampuan para pencari keadilan terlebih bagi perempuan dalam mengakses Pengadilan 		
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan khususnya kaum perempuan 		
	<p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah banyaknya pihak pencari keadilan mendapat akses peradilan - Terbantunya masyarakat pencari keadilan yang berdomisili di daerah terpencil dalam proses berperkara <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan khususnya kaum perempuan 		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 21.500.000,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang diluar gedung	
		Masukan	Rp. 21.500.000,-
		Keluaran	- Terbantunya masyarakat pencari keadilan yang berdomisili di daerah terpencil dalam proses berperkara
		Hasil	- Meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan khususnya kaum perempuan

Pulau Punjung, Maret 2020
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung


Salman, SHI., MA
NIP. 19790407 200704 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas SOSP3APPKB
 Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	 Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001	 Drs. Andy Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	 Bobby R. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : RSUD SUNGAI DAREH

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</p> <p>Kegiatan : Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit</p> <p>Tujuan : Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit</p>	<p>a. Pembangunan gedung baru rumah sakit merupakan pembangunan gedung untuk pelayanan spesialis dan rawatan pasien rawat inap dengan pemisahan pasien laki-laki dan perempuan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana</p> <p>b. Data kunjungan pasien rawat inap</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tahun 2018 9620 orang (laki-laki 42,87% dan perempuan 57,13%) ● Tahun 2019 9929 orang (laki-laki 41,76% dan perempuan 58,24%) 	<p>Dengan belum tersedianya sarana untuk pemisahan pasien laki-laki dan perempuan akan menimbulkan kesenjangan dilihat dari aspek berikut :</p> <p>Akses: Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana</p> <p>Manfaat Pemahaman dan kesadaran pengguna fasilitas di RS belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran yang tersedia - Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung - Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien laki-laki dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultan perencanaan belum memahami pembangunan gedung baru berbasis gender - Masyarakat belum memahami konsep gender 	<p>Peningkatan mutu pelayanan, dengan menyediakan sarana yang responsif gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan gedung baru rumah sakit 	<p>Data kunjungan pasien rawat inap</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tahun 2018 9620 orang (laki-laki 42,87% dan perempuan 57,13%) ● Tahun 2019 9929 orang (laki-laki 41,76% dan perempuan 58,24%) 	<p>Output : Terbangunnya gedung baru rumah sakit</p> <p>Outcome : Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat yang ditandai dengan survey tingkat kepuasan masyarakat</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja

Pulau Pinjung, Maret 2020
Direktur RSUD Sungai Dareh

Dr. Chusnul Othofimah Subekti, MPH
NIP. 19730412 200312 2 005

Inspektur Kandam, S.Sos NIP. 19670601 199203 1 004	Kepala BKB Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001	Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Bobby R. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002
--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : RSUD Sungai Dareh

TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		
KODE PROGRAM	26.35		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Data kunjungan pasien rawat inap Tahun 2018 9620 orang (laki-laki 42,87% dan perempuan 57,13%) Tahun 2019 9929 orang (laki-laki 41,76% dan perempuan 58,24%)</p> <p>Dari data kunjungan terdapat peningkatan pasien dari tahun sebelumnya.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan <u>Akses:</u> Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana sehingga belum bisa dipisahkan pasien rawat inap antara laki-laki dan perempuan</p> <p><u>Manfaat</u> Pemahaman dan kesadaran pengguna fasilitas di RS belum optimal</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran yang tersedia - Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung - Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien laki-laki dan perempuan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung berbasis gender - Masyarakat belum memahami konsep gender 		
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Terlaksananya pembangunan gedung baru rumah sakit</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Output : Terbangunnya gedung baru rumah sakit dengan adanya pemisahan rawat inap pasien laki-laki dan perempuan</p> <p>Outcome : Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang ditandai dengan survey tingkat kepuasan masyarakat</p>		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 17.800.000.000,-		
RENCANA AKSI RENCANA AKSI	Kegiatan	Pembangunan gedung baru rumah sakit	
		Masukan	Rp. 17.800.000.000,-
		Keluaran	Terlaksananya pembangunan gedung baru rumah sakit
		Hasil	Tercapainya sarana dan prasarana yang responsif gender

Pulau Punjung, Maret 2020

Direktur RSUD Sungai Dareh

Drg. Chusnul Chotimah Subekti, MPH
NIP. 19730412 200312 2 005

Tim Verifikasi

Inspektur Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	Kepala BKD Paryanto, S.Sos, M.I NIP. 10690609 198902 1 001	Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas SOSPA PRKB Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820621 200012 1 002
--	--	--	---

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)															
SKPD	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran														
TAHUN ANGGARAN	: 2021														
PROGRAM	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan														
KODE PROGRAM	1.05.1.05.01.01.15														
KEGIATAN	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat														
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan														
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan[Data Pilah Gender]. Dalam Operasi penertiban Pelajar, yang terjaring kebanyakan siswa laki-laki dibanding perempuan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP lebih banyak bermanfaat bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki. b. Jumlah Patroli rutin Satpol PP yang masih belum mencapai target SPM. c. Masih kurangnya Pengawasan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah 														
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td>Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya penyakit masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp. 12.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Komponen/ aktifitas 2</td> <td>Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Patroli rutin</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp. 18.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Total anggaran</td> <td>Rp. 30.000.000</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki	Tujuan	Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya penyakit masyarakat	Alokasi Anggaran	Rp. 12.000.000,-	Komponen/ aktifitas 2	Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp	Tujuan	Patroli rutin	Alokasi Anggaran	Rp. 18.000.000,-	Total anggaran	Rp. 30.000.000
Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki														
Tujuan	Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya penyakit masyarakat														
Alokasi Anggaran	Rp. 12.000.000,-														
Komponen/ aktifitas 2	Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp														
Tujuan	Patroli rutin														
Alokasi Anggaran	Rp. 18.000.000,-														
Total anggaran	Rp. 30.000.000														
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Meningkatkan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan														

Putau Punjung, Juni 2019
Kepala Satpol PP dan Damkar,

AKRIAL S.Pd. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600402 198011 1 002

TIM VERIFIKASI,

Inspektur KANDAM, S.Sos NIP. 196706071991031004	KEPALA-BKD PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 989021001	Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, CHA NIP. 196812201990091001	Kepala Dinas Sosial, P3A, BIDAS SOSIAL, PEMBINA UTA PEREMPUAN, PERLINDUNGAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN PUTAU PUNJUNG BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si NIP. 198205232000121002
--	--	--	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengendalian dan gangguan dari kegiatan Masyarakat	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
		<p>Akses : Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP lebih banyak bermanfaat bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki.</p> <p>Partisipasi: Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit masyarakat.</p> <p>Control: Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang</p>	<p>Jumlah Patroli rutin Saatpol PP yang masih belum mencapai target SPM.</p> <p>Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender</p>	<p>Masih kurangnya Pengawasan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah</p> <p>Peraturan sekolah tentang kedisiplinan siswa</p> <p>Kurangnya peran masyarakat tentang pengawasan</p>	<p>Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan</p>	<p>Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki</p> <p>Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp</p>	<p>Jumlah kasus</p>	<p>Output : Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Penyakit Masyarakat di lingkungan sekolah terutama ditingkat SLTP dan SLTA.</p> <p>Outcome : - Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan</p>

Satpol PP	pada jam pelajaran diindikasikan menggunakan / menghisap lem	dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat. Manfaat : Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang bahaya penyakit masyarakat	bersama terhadap anak sekolah				
-----------	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Palau Panjang, Juni 2019
Kepala Satpol PP dan Samkar,

AKRAT, S.Pd, MEd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196004021980111002

Inspektur	KEPALA BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPA
KANDAM, S.Sos NIP. 196706071991031004	PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 196906091989021001	Dis. ANDY SUMANTO, Ctra NIP. 196812201990091001	BERRY P. RIZA, S.STP, M.Si NIP. 198205112000121002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Sekretariat DPRD

PROGRAM : Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</p> <p>Kegiatan: Kunjungan kerja dan pimpinan anggota DPRD</p> <p>Tujuan : Untuk menentukan arahkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok sekretariat DPRD</p>	<p>Jika dilihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi kinerja sekretariat DPRD belim optimal,sebab memiliki tantangan- tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya,sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini para kaum laki-laki lebih dominan, maka dengan adanya kunjungan kerja tidak tertutup kemungkinan perempuan juga memiliki peran yang baik dan belajar untuk memiliki tekad agar tidak terjadi ketimbangan atau kesenjangan genjer. Dalam kegiatan ini terbentuk 30 orang anggota DPRD dari sekian praksi dan 18 oamg</p>	<p><u>Akses:</u> - Pada mumnya di dominasi oleh kaum laki-laki</p> <p><u>Partisipasi:</u> - Perempuan kurang merasa percaya diri karena banyak tantangan - tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh lainnya</p> <p><u>Control:</u> - Kurangnya sebuah tujuan dalam menerapkan etika birokrasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan</p>	<p>- Kurangnya sebuah tujuan dalam menerapkan etika birokrasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehingga bisa menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dan maju dan bisa menghambat pada proses visi,misi program kepala daerah sehingga tidak mampu membangun berbagai potensi daerah.</p>	<p>-Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak usah terlalu aktif dalam kegiatan kunjungan kerja apalagi keluar daerah,sebaliknya ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki.</p>	<p>- Terwujudnya dhamasraya yang berilmu pengetahuan dan paham teknologi danTerangkatnya Perekonomian masyarakat dan terciptanya arah kebijakan yang ingin dicapai serta secara merata sumber kemajuan ekonomi yang beragam(laki-laki dan perempuan)</p>	<p>- Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 11.223.800.000,00,- untuk kegiatantersebut</p> <p>- Memberikan penjelasan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menuju dhamasraya mandiri dan berbudaya</p>	<p>- Dalam kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh 48 orang dari jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 30 orang per kegiatan dengan satu kali tahapan kunjungan kerja berjumlah 5 /8 orang.</p> <p>- Sementara itu diperkirakan yang akanmelakukan kunjungan hanya sekitar 40 Orang dari jumlah keseluruhan kegiatan</p>	<p><u>Input :</u> - Hasilnya terciptanya identitas budaya dhamasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan sehingga meningkatnya kecakapan dan keahlian masyarakat</p> <p><u>Outcome :</u> - Kesejahteraan masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahterah lagi.</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
	pegawai ASN dengan satu kali tahapan kunjungan kerja berjumlah 5/8 orang.	Manfaat : -Anggapan bahwa kunjungan kerja ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki						

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala

Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya



SETWAN
NUSUTION, S.Pd, MM

Nip. 19640101 198603 1 040

TIM VERIFIKASI,

<p>Inspektur</p> <p>KANDAM, S.Sos NIP.19670607 199103 1 004</p>	<p>KEPALA BKD</p> <p>PARYANTO, S.Sos, M.T NIP.19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p> <p>BOBBY R RIZA, S.STP, M.Si NIP.19820521 200012 1002</p>
---	---	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD

: Sekretariat DPRD

TAHUN ANGGARAN

: 2021

PROGRAM	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		
KEGIATAN	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD		
KODE KEGIATAN	15.06		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jika dilihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi kinerja sekretariat DPRD belum optimal, sebab memiliki tantangan- tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya, sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini para kaum laki-laki lebih dominan, maka dengan adanya kunjungan kerja tidak tertutup kemungkinan perempuan juga memiliki peran yang baik dan belajar untuk memiliki tekad agar tidak terjadi ketimbangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terbentuk 30 orang anggota DPRD dari sekian praksi dan 18 orang pegawai ASN dengan satu kali tahapan kunjungan kerja berjumlah 5/8 orang.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada umumnya di dominasi oleh kaum laki-laki <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan kurang merasa percaya diri karena banyak tantangan –tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh lainnya <p>Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sebuah tujuan dalam menerapkan etika birokrasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan <p>Manfaat :</p> <p>Anggapan bahwa kunjungan kerja ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sebuah tujuan dalam menerapkan etika birokrasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehingga bisa menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dan maju dan bisa menghambat pada proses visi, misi program kepala daerah sehingga tidak mampu membangun berbagai potensi daerah. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak usah terlalu aktif dalam kegiatan kunjungan kerja apalagi keluar daerah, sebaliknya ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki.</p>		
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Jumlah Dana sebesar Rp. 11.223.800.000,00,-</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 11.223.800.000,00,- <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasilnya terciptanya identitas budaya dharma raya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan sehingga meningkatnya kecakapan dan keahlian masyarakat <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesejahteraan masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi. 		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 11.223.800.000,00,- (Sebelas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu rupiah)		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 11.223.800.000,00,- untuk Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	
		Masukan	Rp. 11.223.800.000,00,-
		Keluaran	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
		Hasil	Terciptanya dharma raya mandiri dan berbudaya dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara baik dan berkualitas.

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala
Sekretaris DPRD Kabupaten
Dharmasraya



NASUTION S.Pd, MM
NIP. 196401011986031040

VERIFIKASI KEGIATAN

<p>Inspektur</p>  <p>KANDAM, S.Sos NIP. 196706071991031004</p>	<p>KEPALA BKD</p>  <p>PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 196906091989021001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 196812201990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p>  <p>BOBBY P RIZA, S.STP, M.Si NIP. 198205212000121002</p>
--	--	--	---